

**TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)**

**PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KELURAHAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

**Disusun Oleh:
DIANA MARGARETHA ASA
NIM. 11.24.071**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
(TEKNIK PLANOLOGI)
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2015**

SECRET
CONFIDENTIAL

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS
WASHINGTON, D. C.

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY
FOR INTERNATIONAL AFFAIRS
WASHINGTON, D. C.

THIS DOCUMENT IS UNCLASSIFIED AND IS AVAILABLE
FOR REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART BY ANY
PERSON WITHOUT PERMISSION OF THE ASSISTANT
SECRETARY FOR INTERNATIONAL AFFAIRS
WASHINGTON, D. C.



PT BNU (PERSERO) MALANG
BAUK NAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigara-gara No. 2, Telp. (0341) 551431, Muring, Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karangrejo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

LEMBAR PENGESAHAN

Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan

Skripsi Dipertahankan Dihadapan Majelis Penguji Sidang Skripsi

Jenjang Strata Satu (S-1)

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 2 September 2015

Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

Disusun oleh:

Diana Margaretha Asa

11.24.071

Disahkan oleh,

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT

Ir. Titiek Poerwati, MT

Arief Setiyawan, ST-MT

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi)



Ida Soewarni, ST., MT.
NIP. Y.1039 600 293



PT. IBI (PENSER) MALANG
BANGUN NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : J. Bendungan Sigura-gura No. 2, Telp. (0341) 581431 (Hunting), Fax (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : J. Raya Karangrejo, Km. 2 Telp. (0341) 417636 Fax (0341) 417634 Malang

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Diana Margaretha Asa

Nim : 11.24.071

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi)

Judul Skripsi : Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan
Panggungrejo Kota Pasuruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir ini adalah jiplakan/plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, September 2015

Yang membuat pernyataan



Diana Margaretha Asa

NIM : 11.24.071



PT INP (PENSERHO) MALANG
BANGUN Negeri MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I J. Bendungan Sigura-gura No. 2, Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II J. Raya Karangajene Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

PERSETUJUAN SKRIPSI

Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan

Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik Planologi S-1
Institut Teknologi Nasional Malang

Disusun oleh:

Diana Margaretha Asa

11.24.071

Menyetujui

Pembimbing I

Ir. Agustina Nurul Hidayati, MTP.

Pembimbing II

Ida Soewarni, ST., MT

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

(Teknik Planologi)



Ida Soewarni, ST., MT.

NIP. Y.1039 600 293



PT. IAIN (PERSERIKAH) MALANG
BANK NISADA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : J. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting) Fax. (0341) 953019 Malang 65145
Kampus II : J. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

LEMBAR PERBAIKAN

Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi) :

Nama : Diana Margaretha Asa

Nim : 11.24.071

Hari/Tanggal : Rabu, 2 September 2015

Judul : Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan
Panggungrejo Kota Pasuruan

Terdapat kekurangan yang meliputi :

- tipologi permukiman

- Deskripsi Penanganan

Malang, September 2015

Dosen Penguji I

Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT



PT. BNI PERSEKUTUAN MALANG
BANK NAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : J. Bendungan Sigurguri No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting) Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : J. Raya Karanglo Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

LEMBAR PERBAIKAN

Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi) :

Nama : Diana Margaretha Asa

Nim : 11.24.071

Hari/Tanggal : Rabu, 2 September 2015

Judul : Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan
Panggungrejo Kota Pasuruan

Terdapat kekurangan yang meliputi :

Deskripsi alasan penentuan penanganan

Malang, September 2015

Dosen Penguji II


Ir. Titiek Boerwati, MT



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting) Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karangrejo, Km. 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

LEMBAR PERBAIKAN

Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi) :

Nama : Diana Margaretha Asa

Nim : 11.24.071

Hari/Tanggal : Rabu, 2 September 2015


Judul : Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan
Panggungrejo Kota Pasuruan

Terdapat kekurangan yang meliputi :

- Penilaian bersifat keseluruhan (kelurahan)
- Tahap - tahap penanganan

Malang, September 2015

Dosen Penguji III


Arief Setiyawan, ST.MT

ABSTRACT

Settlement condition that health safe, harmonious and sustainable is a dream of everyone to achieve welfare of every families. Based of Spatial Planning for Year 2011-2031 Pasuruan city village of Panggungrejo as slums, with 58 hectares owned total area. The goal of this research is to establish slum treatment efforts accordance with the conditions and character of Panggungrejo village, Pasuruan. This study used a qualitative descriptive methods, weighting and participatory prospective analysis. Based on the research that has been done, Panggungrejo village consists of two levels namely low slum and medium slum. Variables that be a driving factor in overcoming the slums are education levels, population density, building density, income and poverty index. Treatment efforts is required in addressing slum in Panggungrejo village involving the government and the whole society.

Keywords: *Characteristics, level of untidiness, Handling*

ABSTRAK

Kondisi permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan merupakan idaman setiap orang untuk mencapai kesejahteraan hidup setiap keluarga. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 Kelurahan Panggungrejo tergolong permukiman kumuh, dengan luas wilayah yang dimiliki 58 Ha. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menetapkan upaya penanganan permukiman kumuh yang sesuai dengan kondisi dan karakter Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pembobotan dan analisis prospektif partisipatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Kelurahan Panggungrejo terdiri atas dua tingkat kekumuhan yakni kumuh rendah dan kumuh sedang. Variabel yang menjadi faktor penggerak dalam mengatasi permukiman kumuh adalah tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, pendapatan dan tingkat kemiskinan. Diperlukan upaya penanganan dalam mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo yang melibatkan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Karakteristik, Tingkat Kekumuhan, Penanganan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan judul “Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan”. Adapun penyusunan tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana, Jurusan teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang.

Permasalahan permukiman kumuh merupakan masalah global dan mendapat banyak perhatian dari para pemangku kepentingan di berbagai negara. Penanganan permukiman kumuh memerlukan kerjasama dari semua pihak. Kelurahan Panggungrejo merupakan salah satu kelurahan yang tergolong permukiman kumuh di Kota Pasuruan. Penelitian ini diharapkan mampu menetapkan upaya penanganan permukiman kumuh yang sesuai dengan karakter dan tingkat kekumuhan di Kelurahan Panggungrejo agar dapat menciptakan aktivitas permukiman yang terkendali sesuai dengan tatanan lingkungan yang seimbang.

Atas tersusunnya tugas akhir ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materi
2. Ibu Ir. Agustina Nurul Hidayati, MT, selaku dosen pembimbing I
3. Ibu Ida Soewarni, ST, MT, selaku dosen pembimbing II
4. Seluruh dosen, staf dan rekan mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, yang telah mendukung dan memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa didalam tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam hal penyajian maupun dalam pembahasan materi. Penulis sangat mengharapkan masukan, bimbingan, petunjuk serta kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan tugas akhir ini.

Malang, Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Lembar Persetujuan Skripsi	iii
Lembar Perbaikan Penguji	iv
Abstrak Inggris.....	vii
Abstrak Indonesia	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Peta.....	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Diagram	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Rumusan Masalah	4
1.3	Tujuan	5
1.4	Sasaran	5
1.5	Ruang Lingkup.....	5
	1.5.1 Lingkup Materi.....	5
	1.5.2 Lingkup Lokasi.....	6
1.6	Keluaran Yang Diharapkan.....	9
1.7	Kegunaan Penelitian	9
	1.7.1 Kegunaan Praktis	9
	1.7.2 Kegunaan Akademis	9
1.8	Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Karakter Permukiman Kumuh	12
	2.1.1 Pengertian Permukiman Kumuh	12
	2.1.2 Karakteristik Permukiman Kumuh	14
	2.1.3 Penyebab Utama Timbulnya Permukiman Kumuh	17
	2.1.4 Kriteria Penilaian Kawasan Kumuh.....	17

2.2	Penanganan Permukiman Kumuh	18
2.3	Landasan Penelitian	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Metode Pengumpulan Data dan Penentuan Sampel	31
3.1.1	Survey Primer	31
3.1.2	Survey Sekunder	33
3.2	Metode Analisis Data	33
3.2.1	Analisa deskriptif	34
3.2.2	Analisa Pembobotan	34
3.2.3	Analisa Prospektif Partisipatif	34

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.2	Kondisi Fisik Bangunan	41
4.2.1	Keteraturan Bangunan	41
4.2.2	Kepadatan Bangunan	42
4.2.3	Kepadatan hunian	44
4.2.4	Kualitas Bangunan	45
4.2.5	Drainase	48
4.2.6	Jalan	48
4.2.7	Air Bersih	52
4.2.8	Sanitasi	54
4.2.9	Jaringan Sampah	56
4.2.10	Fasilitas Pendidikan	58
4.2.11	Fasilitas Kesehatan	61
4.2.12	Fasilitas Peribadatan	61
4.2.13	Ruang Terbuka Hijau	62
4.2.14	Legalitas Tanah	63
4.2.15	Frekuensi Banjir	64
4.2.16	Frekuensi Kebakaran	64
4.3	Sosial Kependudukan	67
4.3.1	Jumlah Penduduk	67
4.3.2	Kepadatan Penduduk	67
4.3.3	Tingkat Pendidikan	68
4.3.4	Penyakit	69
4.3.5	Tingkat Kriminalitas	70

4.4	Sosial Ekonomi	70
4.4.1	Tingkat Pendapatan	70
4.4.2	Tingkat Kemiskinan.....	71
BAB V ANALISA		
5.1	Analisis Karakteristik Permukiman Kumuh	72
5.1.1	Hasil Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh	74
5.1.2	Analisis Tingkat Kekumuhan di Kelurahan Panggungrejo	79
5.2	Analisis Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo	95
5.2.1	Analisis Prospektif Partisipatif	95
5.2.2	Analisis Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat Kekumuhan dan Analisis Prospektif Partisipatif	98
BAB VI ANALISA		
6.1	Kesimpulan	112
6.1.1	Karakteristik Permukiman Kumuh	112
6.1.2	Tingkat Kekumuhan	112
6.1.3	Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo	113
6.2	Saran	113
6.2.1	Saran Untuk Pemerintah Setempat	113
6.2.2	Saran Untuk Penelitian selanjutnya	114
	Daftar Pustaka	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Lingkup Materi Aspek Fisik Bangunan, Sarana dan Prasarana, Legalitas Tanah, Lokasi, Sosial Kependudukan dan Sosial Ekonomi.....	7
Tabel 2.1	Rangkuman Teori.....	21
Tabel 2.2	Variabel Penelitian.....	29
Tabel 3.1	Kuisisioner Masyarakat.....	33
Tabel 4.1	Gambaran Umum Kelurahan Panggungrejo.....	37
Tabel 4.2	Distribusi Kuisisioner.....	38
Tabel 4.3	Keteraturan Bangunan.....	41
Tabel 4.4	Kepadatan Bangunan.....	42
Tabel 4.5	Kepadatan Hunian.....	44
Tabel 4.6	Kualitas Bangunan.....	47
Tabel 4.7	Sumber Air Bersih.....	53
Tabel 4.8	Jenis Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga.....	55
Tabel 4.9	Frekuensi Pengangkutan Sampah.....	57
Tabel 4.10	Jumlah Fasilitas Pendidikan.....	59
Tabel 4.11	Jumlah Fasilitas Peribadatan.....	62
Tabel 4.12	Status Kepemilikan Lahan.....	63
Tabel 4.13	Jumlah Penduduk.....	67
Tabel 4.14	Kepadatan Penduduk.....	68
Tabel 4.15	Tingkat Pendidikan.....	68
Tabel 4.16	Tingkat Pendapatan.....	70
Tabel 4.17	Jumlah KK Miskin.....	71
Tabel 5.1	Penilaian Variabel.....	72
Tabel 5.2	Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW I.....	74
Tabel 5.3	Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW II.....	75
Tabel 5.4	Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW III.....	76
Tabel 5.5	Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW IV.....	78
Tabel 5.6	Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW V.....	79
Tabel 5.7	Komponen Penilaian Tingkat Kekumuhan.....	80
Tabel 5.8	Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Aspek Fisik Bangunan.....	81

Tabel 5.9	Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Aspek Sarana dan Prasarana	82
Tabel 5.10	Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Aspek <i>Legalitas Tanah</i>	83
Tabel 5.11	Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Aspek Lokasi	84
Tabel 5.12	Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Sosial Kependudukan	85
Tabel 5.13	Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Sosial Ekonomi	86
Tabel 5.14	Tingkat Kekumuhan di Lingkungan Permukiman Kumuh Kelurahan Panggungrejo	87
Tabel 5.15	RW Prioritas dan Masalah Kekumuhan	98
Tabel 5.16	Penanganan Permukiman Kumuh RW V	100
Tabel 5.17	Penanganan Permukiman Kumuh RW III	103
Tabel 5.18	Penanganan Permukiman Kumuh RW I	106
Tabel 5.19	Penanganan Permukiman Kumuh RW IV	108
Tabel 5.20	Penanganan Permukiman Kumuh RW V	110

DAFTAR PETA

Peta 1.1	Batas Administrasi Kelurahan Panggungrejo	8
Peta 4.1	Penggunaan Lahan.....	39
Peta 4.2	Pembagian RW	40
Peta 4.3	Keteraturan Bangunan	43
Peta 4.4	Kualitas Bangunan.....	49
Peta 4.5	Jaringan Drainase	50
Peta 4.6	Jaringan Jalan	51
Peta 4.7	Fasilitas Pendidikan.....	60
Peta 4.8	Fasilitas Kesehatan	65
Peta 4.9	Fasilitas Peribadatan	66
Peta 5.1	Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Fisik Bangunan ...	88
Peta 5.2	Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Sarana Dan Prasarana	89
Peta 5.3	Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Legalitas Tanah...	90
Peta 5.4	Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Lokasi.....	91
Peta 5.5	Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Sosial Kependudukan.....	92
Peta 5.6	Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Sosial Ekonomi ...	93
Peta 5.7	Tingkat Kekumuhan Di Kelurahan Pannggungrejo...	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Rumah Permanen Baik	45
Gambar 4.2	Rumah Permanen Buruk.....	46
Gambar 4.3	Rumah Non Permanen Baik	46
Gambar 4.4	Rumah Non Permanen Buruk.....	47
Gambar 4.5	Kondisi Jalan	48
Gambar 4.6	PDAM	52
Gambar 4.7	Warga Yang Membeli Air	52
Gambar 4.8	MCK Bersama	69
Gambar 4.9	MCK Pribadi	55
Gambar 4.10	Sampah Yang Diangkut.....	56
Gambar 4.11	Sampah di Tambak.....	57
Gambar 4.12	Fasilitas Pendidikan.....	59
Gambar 4.13	Fasilitas Kesehatan	61
Gambar 4.14	Fasilitas Peribadatan.....	62
Gambar 4.15	Ruang Terbuka	63
Gambar 5.1	Skor Pengaruh Antar Variabel.....	96
Gambar5.2	Hasil Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar Variabel.....	97

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Keteraturan Bangunan	42
Diagram 4.2 Kepadatan Hunian	45
Diagram 4.3 Kualitas Bangunan	48
Diagram 4.4 Sumber Air Bersih.....	53
Diagram 4.5 Jenis Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga	56
Diagram 4.6 Frekuensi Pengangkutan Sampah.....	58
Diagram 4.7 Tingkat Pendidikan.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota merupakan pusat kreativitas, budaya dan perjuangan keras manusia. Kota, selain merefleksikan vitalitas dan berbagai peluang umat manusia, juga melambangkan kemajuan sosial dan ekonomi. Di kota, jutaan orang, bahkan milyaran orang, menikmati berbagai fasilitas umum, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, rekreasi, pekerjaan, pendidikan, dan berpartisipasi dalam menegakkan demokrasi. Kota juga merupakan tempat pemusatan atau cabang kekuatan politik dan ekonomi serta menjadi motor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pola-pola sosial ekonomi yang berkembang telah mengakibatkan terjadinya eksodus penduduk pedesaan secara besar-besaran, peningkatan penduduk seperti terpusat di wilayah perkotaan. Menurut perkiraan, lebih dari setengah umat manusia akan tinggal di wilayah perkotaan pada akhir abad, dan enam puluh persen pada tahun 2020¹.

Meskipun terdapat peluang ekonomi dan sosial di kota dan daya tarik yang secara nyata mendasari gejala demografi, masalah dan tantangan yang ada dalam komunitas perkotaan sudah terbukti dengan sendirinya. Keuntungan yang timbul akibat pertumbuhan ekonomi memerlukan biaya besar, tetapi tidak dapat dinikmati. Kota memang merupakan sebuah teka-teki. Kota merupakan mikrokosmis masalah, disamping peluang, dari umat manusia ketika komunitas perkotaan tumbuh menjadi lebih besar dan padat hingga tidak bisa dikendalikan lagi. Interaksi umat manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia terletak pada kualitas kehidupan bagi jutaan-mungkin juga milyaran orang diseluruh dunia, dan pengalaman pun menjadi tercampur-baur. Berbagai akibat lingkungan yang merugikan yang menjadi sifat dari pusat-pusat perkotaan sudah banyak diketahui dan memang benar adanya. Masalah-masalah tersebut memberikan tantangan besar dengan akibat yang langsung dan mendasar bagi eksistensi umat manusia. Kota merupakan beban bagi sumber-sumber alam dan mengotori udara dan air, menimbulkan polusi lingkungan, baik ditingkat daerah, kota, nasional, maupun global. Pembangunan perkotaan secara nyata merusak lingkungan alam dan wilayah-wilayah disekitarnya. Penduduk perkotaan memberikan tuntutan besar bahkan kadang-kadang tak terpenuhi

¹ *World Resources Institute, "A Guide to the Global Environment: The Urban Environment."* Dalam buku *Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Terhadap Masyarakat Berwawasan Ekologi*, penerjemah Rasti Suryandani. 2003. Hal.1

atas persediaan air bersih, sistem pembuangan kotoran, pengaturan sampah, perumahan, dan transportasi yang aman dan pantas. Diseluruh Negara berkembang, diperkirakan sedikitnya 220 juta penduduk kota tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih; lebih dari 420 juta orang tidak memiliki akses ke WC umum; satu dua pertiga sampah padat yang dihasilkan tidak terkumpul; dan lebih dari 1,1, milyar orang tinggal di wilayah perkotaan dengan polusi udara yang melebihi ambang keamanan².

Perkembangan suatu kota tidak terlepas dari jumlah penduduk yang selalu meningkat pada tiap tahunnya. Jumlah penduduk yang terus meningkat ini tentu menimbulkan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal, sarana dan prasarana yang memadai. Dampak yang ditimbulkan dari jumlah penduduk yang terus meningkat adalah sulitnya memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Terbatasnya kemampuan untuk membangun tempat tinggal yang layak dan semakin terbatasnya lahan perkotaan untuk membangun permukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat mengakibatkan munculnya permukiman kumuh.

Daerah kumuh di kota-kota, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, pada umumnya terjadi karena masih rendahnya penghasilan sebagian besar masyarakat disamping sebab-sebab lain. Disamping itu, daerah kumuh juga terjadi karena pesatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota, dan karena mahalnya harga tanah sehingga masyarakat ini terpaksa harus hidup berdesakan dan berdempetan. Karena keterbatasan penghasilan, kemampuan mereka untuk meningkatkan mutu dan ketertiban lingkungan pun menjadi sangat kurang.³

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor strategis dalam upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Disamping sebagai salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) manusia, "papan" juga berfungsi strategis di dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang yang berjati diri. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjati diri, mandiri, dan produktif bagi setiap orang/keluarga, telah ditetapkan menjadi visi penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia sampai dengan Tahun 2020⁴.

Sebuah lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan merupakan idaman setiap orang untuk mencapai kesejahteraan

² *Ibid.* Hal.2

³ Yudohusodo, S dkk. 1991. "Rumah Untuk Seluruh Rakyat". Jakarta: INKOPPOL. Hal.30

⁴ Syarifuddin. 2005. "Kondisi Fisik Permukiman Penduduk Di Pesisir Pantai Teluk Palu". Jurnal SMARTek Vol. 3 No. 3, Agustus 2005. Hal. 14

hidup dan menjamin kesehatan keluarga. Faktor penentu dari lingkungan permukiman tersebut meliputi kondisi fisik rumah tinggal beserta lingkungan di sekitarnya, pola hidup individu dan komunitas, kondisi sosial-ekonomi-budaya, dan dukungan dari pemerintah (melalui penyediaan prasarana dan sarana pelayanan).

Penanganan permukiman kumuh tidak bisa hanya oleh satu-dua sektor atau menjadi beban utuh dari pemerintah, disinilah perlu minat dan kehendak dari seluruh insan yang terpenggil baik karena jabatan dan tanggung jawabnya, para cerdas cendekia, juga para penentu kebijakan, para pengusaha di sektor swasta dan bahkan mereka yang berada dalam masalah tersebut yaitu masyarakat yang tinggal dalam lingkungan permukiman kumuh; untuk menggalang suatu keterpaduan dan berbagi peran serta berkoordinasi dengan mantab untuk mendapatkan solusi penanganan permukiman kumuh tanpa melukai hati masyarakat, tidak juga membiarkan terjadinya pelanggaran hukum, ataupun tidak merugikan pihak-pihak tertentu⁵. Perlu kerja keras dari semua pihak untuk mewujudkan 0% kawasan kumuh di tahun 2019, sesuai cita-cita negeri ini yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Kota Pasuruan adalah Ibukota Pasuruan, Jawa Timur dengan luas wilayah 35,29 Km². Ditinjau dari segi transportasi darat, saat ini Kota Pasuruan berada pada posisi strategis yaitu terletak di persimpangan jalur regional Surabaya-Probolinggo-Malang, serta termasuk dalam rencana jalan nasional arteri primer Surabaya-Sidoarjo-Gempol-Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi⁶. Kondisi ini merupakan potensi yang sangat menguntungkan bagi perkembangan kota. Perkembangan Kota Pasuruan, selain berpengaruh terhadap bagian dalam kota, secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap kawasan pinggiran kota dan kota-kota yang ada disekitarnya. Namun data awal di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Pasuruan belum merata, dimana pada bagian utara kota masih dapat ditemui kondisi sosial ekonomi masyarakat dan prasarana sarana perumahan permukimannya masih tertinggal, salah satunya adalah Kelurahan Panggungrejo di Kecamatan Panggungrejo.

Kelurahan Panggungrejo merupakan salah satu kelurahan yang tergolong permukiman kumuh di Kota Pasuruan (RTRW Kota Pasuruan Tahun 2011-2031). Ketergantungan hidup masyarakat di Kelurahan Panggungrejo akan wilayah tempat tinggal mereka ini tidak diimbangi dengan perilaku mereka yang turut menjaga dan merawat kelestarian

⁵ <http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/v2/ebook.php#prettyPhoto%5Biframe%5D/5/> diakses pada 31/03/2015 12:34 WIB

⁶ <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/pasuruan.pdf> diakses pada 30/3/2015 11:34 WIB

lingkungan permukiman. Jika hal ini dibiarkan, maka akan timbul masalah permukiman yang lebih kompleks lagi.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka perlu dilakukan studi penelitian mengenai penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo. Diharapkan melalui studi penelitian ini dapat diketahui karakteristik dan tingkat kekumuhan di Kelurahan Panggungrejo sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi serta dapat menciptakan aktivitas permukiman yang terkendali sesuai dengan tatanan lingkungan yang seimbang.

1.2 Rumusan Masalah

Permukiman yang menjadi tempat hunian masyarakat Kelurahan Panggungrejo sebagian termasuk dalam kategori hunian padat, dengan kondisi lingkungan yang buruk, baik dari aspek fisik (kondisi bangunan dan prasarana fisik lingkungannya), sosial, maupun ekonomi. Beberapa penduduk ataupun warga disekitar permukiman tersebut mengeluh dengan kondisi lingkungan yang tidak nyaman untuk mereka tinggal. Jika kondisi tersebut dibiarkan tanpa penanganan lebih lanjut, dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Permasalahan permukiman kumuh bukan sekedar masalah fisik belaka, sehingga pemecahan masalah yang dilakukan harus ikut menitikberatkan masalah sosial ekonomi dan kemampuan sumber daya manusia yang seringkali justru menjadi penyebab utama kekumuhan. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap penanganan permukiman kumuh kawasan tersebut. Permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakter fisik bangunan, karakter sarana dan prasarana, karakter legalitas tanah, karakter lokasi, karakter sosial kependudukan, dan karakter sosial ekonomi di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan?
2. Bagaimanakah tingkat kekumuhan permukiman di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan?
3. Bagaimanakah upaya penanganan yang mampu mengatasi masalah permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan?

Berdasarkan kondisi permasalahan diatas, maka perlu diadakan suatu penelitian untuk mengetahui penanganan mengatasi masalah permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian, tujuan yang ingin dicapai adalah menetapkan upaya penanganan permukiman kumuh yang sesuai dengan kondisi dan karakter Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan.

1.4 Sasaran

Sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan penelitian meliputi:

1. Identifikasi karakteristik fisik bangunan, karakteristik sarana dan prasarana, karakteristik lokasi dan legalitas tanah, karakteristik sosial kependudukan dan karakteristik sosial ekonomi di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan;
2. Tingkat Kekumuhan di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan;
3. Upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri atas lingkup materi dan lingkup lokasi. Lingkup materi membatasi hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini dan lingkup lokasi terkait dengan wilayah penelitian yang dilakukan.

1.5.1 Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui karakteristik fisik, sarana dan prasarana, lokasi, legalitas tanah, sosial kependudukan dan sosial ekonomi, mengetahui tingkat kekumuhan di Kelurahan Panggungrejo, serta penyusunan upaya penanganan permukiman kumuh yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kekumuhan di Kelurahan Panggungrejo. Adapun materi yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Identifikasi karakteristik fisik bangunan, sarana dan prasarana, lokasi, legalitas tanah, sosial kependudukan dan sosial ekonomi. Untuk mengetahui karakteristik dari permukiman kumuh digunakan UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dan referensi lainnya yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman. Adapun aspek yang akan dikaji dapat dilihat pada tabel 1.1.
2. *Analisa tingkat kekumuhan di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan* berdasarkan aspek fisik bangunan, sarana dan prasarana, lokasi, legalitas tanah, sosial kependudukan dan sosial ekonomi..
3. Penyusunan upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan berdasarkan karakteristik, tingkat

kekumuhan dan faktor prioritas yang mempengaruhi timbulnya permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan.

1.5.2 Lingkup Lokasi

Lokasi penelitian adalah permukiman di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan. Kelurahan Panggungrejo merupakan satu dari tigabelas kelurahan yang ada di Kecamatan Panggungrejo. Luas wilayah penelitian adalah 58Ha. Adapun batas wilayah administrasi Kelurahan Panggungrejo sebagai berikut:

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------------------|
| o | Sebelah Utara | : | Selat Madura |
| o | Sebelah Selatan | : | Kelurahan Mandaranrejo |
| o | Sebelah Barat | : | Sungai Gembong |
| o | Sebelah Timur | : | Kelurahan Mandaranrejo |

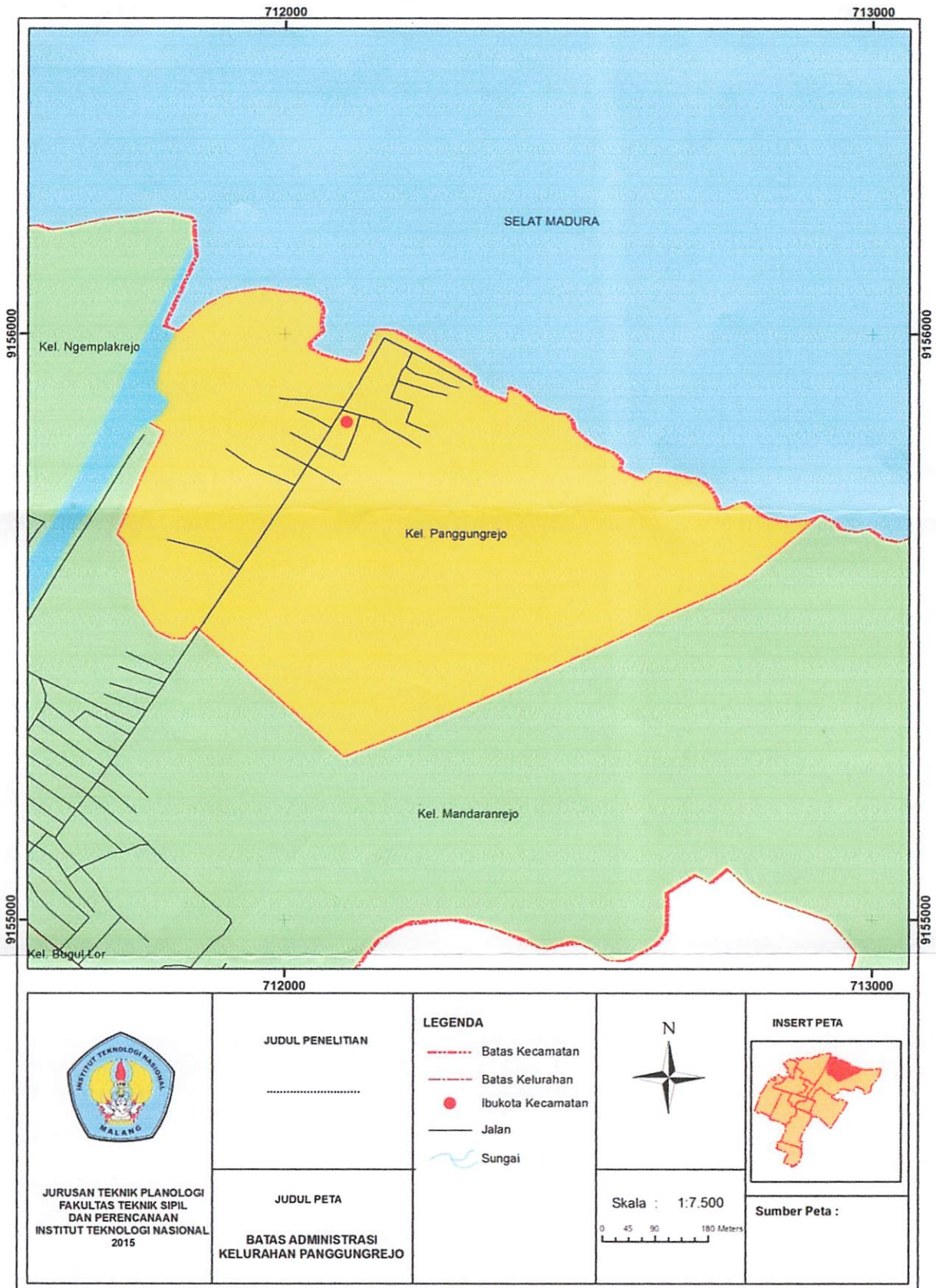
Untuk lebih jelasnya terkait lokasi penelitian, dapat dilihat pada peta 1.1.




Tabel 1.1
Lingkup Materi Aspek Fisik Bangunan, Sarana dan Prasarana, Legalitas Tanah, Lokasi, Sosial Kependudukan dan Sosial Ekonomi

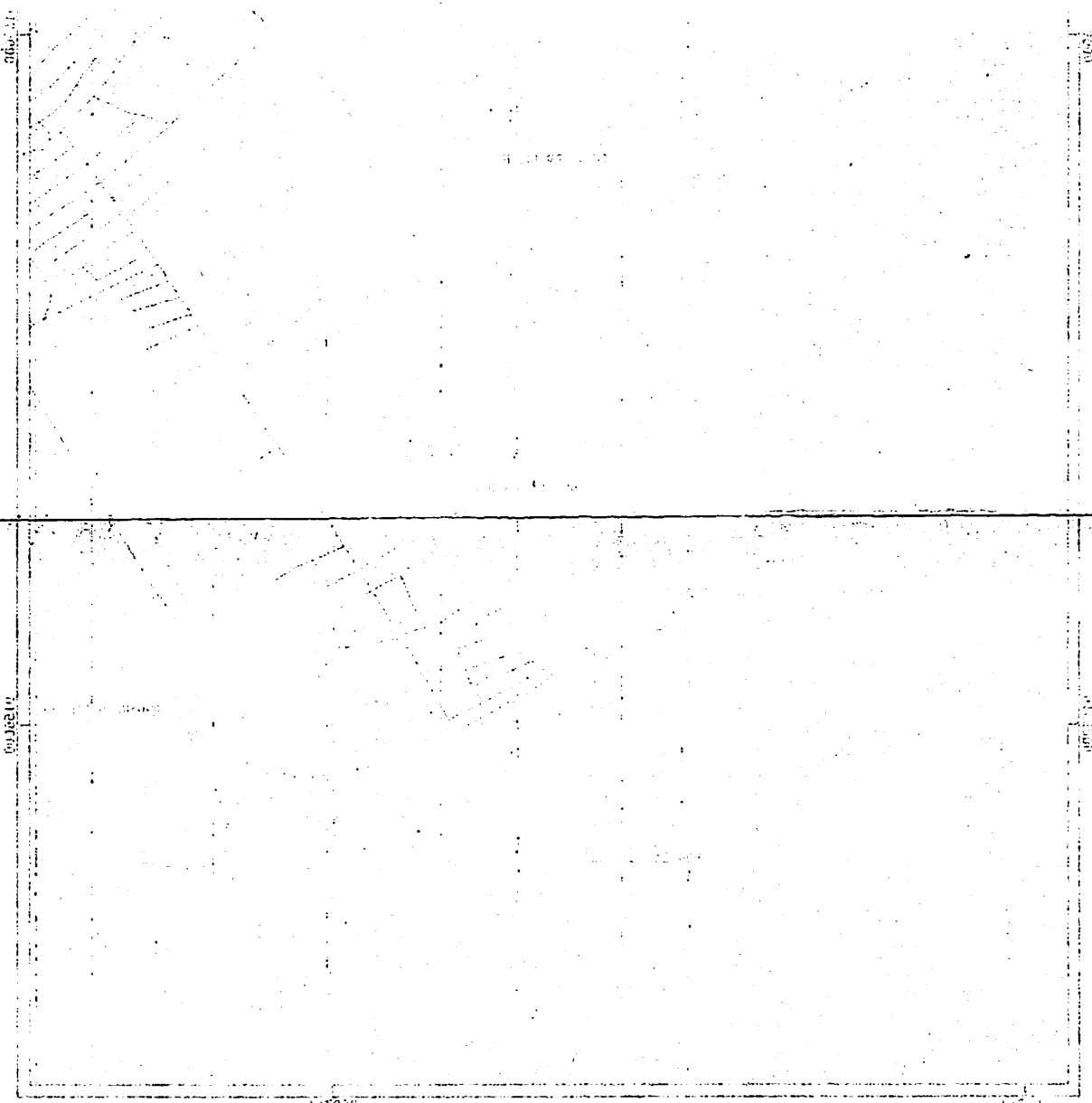
Fisik Bangunan	Sarana dan Prasarana	Legalitas Tanah	Lokasi	Sosial Kependudukan	Sosial Ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> - Rasio keteraturan bangunan - Tingkat kepadatan bangunan - Tingkat kualitas bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio kelancaran Drainase - Rasio pelayanan Air bersih - Rasio jenis Sanitasi - Tingkat pelayanan pengangkutan sampah domestic - Tingkat kondisi perkerasan jalan - Rasio fasilitas pendidikan - Rasio fasilitas kesehatan - Rasio fasilitas sosial budaya - Rasio Ruang Terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> - Status Kepemilikan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi Banjir - Frekuensi Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepadatan penduduk - Kepadatan hunian - Tingkat pendidikan - Penyakit - Tingkat kriminalitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendapatan - Tingkat kemiskinan

Sumber : Kajian Teori, 2015

Peta 1.1 Batas Administrasi Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan



<p>ՀԱՅ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ՕՐԱԿԵՄԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆՏՐՈԼԻՆԳԻ ԵՎ ԳՐԱՆՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ</p> 	<p>ՌԵՍՊՈՒԿԱՆ ԵՎ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՆԳ ՓՈՒՆԴ ԿՈՄԻՏԵԻՍԻՐ</p> <p>ՊՈՒՆԴ ԿԵՆՏՐՈՆ</p> <p>ՊՈՒՆԴ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐՈՒՄ ԵՎ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՆԳ</p> <p>ՎԵՐՈՒՄ ԵՎ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՆԳ ՎԵՐՈՒՄ ԵՎ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՆԳ</p> <p>ԴԵՍԵՄԲՐ</p>	<p>ՎԵՐՈՒՄ ԵՎ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՆԳ ՎԵՐՈՒՄ ԵՎ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՆԳ ՎԵՐՈՒՄ ԵՎ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՆԳ</p>	<p>ՊՈՒՆԴ ԿԵՆՏՐՈՆ</p> 	<p>ՓՈՒՆԴ ԿԵՆՏՐՈՆ</p>  <p>ՎԵՐՈՒՄ ԵՎ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՆԳ</p>
	1:10000			1:10000



ՔՈՍՏ ԲՆԱՅՆ ԳՐԱՆՈՒՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԿՈՍՏ ԲՆԱՅՆ

1.6 Keluaran Yang Diharapkan

Keluaran yang diharapkan dari sasaran penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hasil identifikasi karakteristik fisik, karakteristik sosial dan karakteristik ekonomi di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan;
2. Hasil analisa tingkat Kekumuhan di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan berdasarkan standar Dirjen Perumahan dan Permukiman;
3. Upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan.

1.7 Kegunaan Penelitian

Luaran penelitian yang dihasilkan memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis

1.7.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Pasuruan khususnya Kecamatan Panggungrejo dalam penyusunan program penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan, sehingga perencanaan program dapat tepat sasaran dan tepat manfaat. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat setempat terkait dengan karakteristik, tingkat kekumuhan dan upaya penanganannya.

1.7.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai referensi ilmiah dan bahan informasi dalam pengembangan penelitian selanjutnya di bidang penanganan permukiman kumuh.

1.8 Sistematika Penulisan

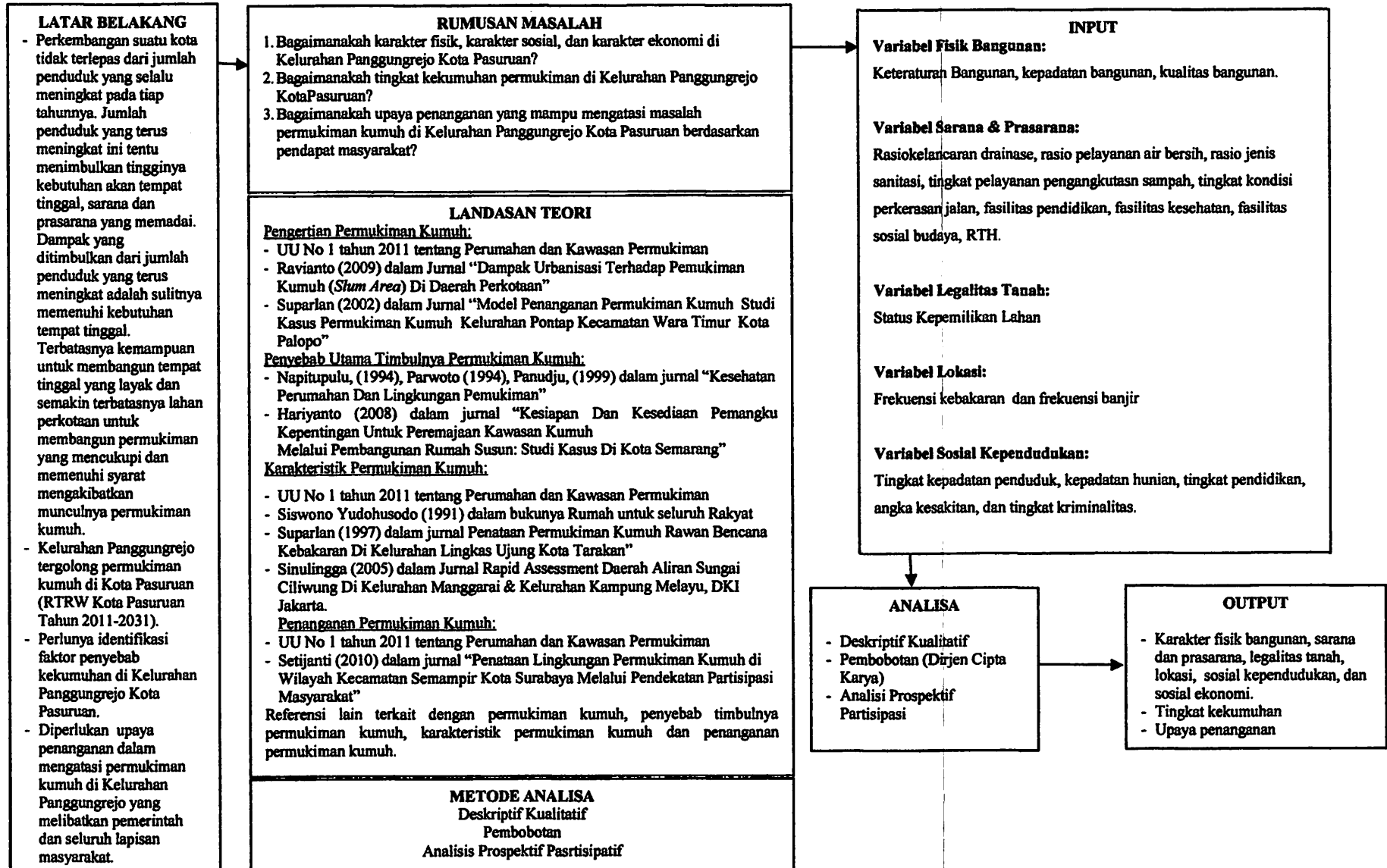
Sistematika penulisan proposal judul penelitian ini, terdiri atas:

1. Bab I Pendahuluan
Pada bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup, luaran yang diharapkan dan sistematika penulisan penelitian.
2. Bab II Tinjauan Pustaka
Bab tinjauan pustaka menjelaskan hasil penelusuran kepustakaan ilmiah, dasar-dasar teori dan perumusan landasan penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian
Menjelaskan jenis pendekatan, lokasi dan waktu, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode analisa data dan kerangka penelitian.

4. **Bab IV Gambaran Umum**
Memaparkan kondisi fisik bangunan, sarana dan prasarana. Legalitas tanah, lokasi, sosial kependudukan dan sosial ekonomi di Kelurahan Panggungrejo.
5. **Bab V Analisa**
Menjelaskan hasil analisa karakteristik, tingkat kekumuhan dan penanganan permukiman kumuh di lokasi studi.
6. **Bab VI Penutup**
Pada bab penutup memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

KERANGKA PEMIKIRAN :

PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori dan perkembangan konsep, yang menjadi referensi kepustakaan untuk merumuskan landasan penelitian terkait penanganan permukiman kumuh. Fokus pembahasan dalam tinjauan pustaka ini adalah permukiman, permukiman kumuh dan penanganan permukiman kumuh.

2.1 Karakter Permukiman Kumuh

Permukiman Kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program telah dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman kumuh di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian, penyebab dan karakteristik dari permukiman kumuh.

2.1.1 Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman adalah wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya dan para penghuninya. Tidak hanya menyangkut kuantitas melainkan juga kualitas. Tidak hanya menyangkut tempat hunian rumah, tetapi juga tempat kerja, berbelanja dan bersantai (Eko Budiharjo dalam Alfian 2014)⁶. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kuswartojo dan Salim (1997:21)⁷ bahwa permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada didalamnya. Berarti permukiman memiliki arti lebih luas daripada perumahan yang hanya merupakan wadah fisiknya saja, sedangkan permukiman merupakan perpaduan antara wadah (alam, lingkungan, dan jaringan) dan isinya (manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya).

Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut:

⁶ Alfian. 2014. "Peran Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Dalam Penataan Perumahan Pemukiman Kawasan Garis Sempadan Sungai Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang", eJournal Ilmu Pemerintahan Vol.2. ISSN 2338-3651. Hal.2457

⁷ *Ibid*

- Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Ravianto (2009) dalam Suparto (2014)⁸ mengemukakan bahwa perumahan kumuh atau permukiman kumuh adalah lingkungan hunian atau tempat tinggal/rumah beserta lingkungannya, yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat.

Pengertian permukiman kumuh oleh Hetty Adriasih (2004) dalam Rahayu (2007)⁹ adalah lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah berfungsi sekedar tempat istirahat dan melindungi diri dari panas, dingin dan hujan, lingkungan dan tata permukiman tidak teratur, bangunan sementara, acak-acakan tanpa perencanaan, prasarana kurang (MCK, air bersih, saluran buangan, listrik, gang, lingkungan jorok dan menjadi sarang penyakit), fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan), umumnya mata pencaharian penghuninya tidak tetap dan usahanya nonformal, tanah bukan milik penghuni, pendidikan rendah, penghuni sering tidak tercatat sebagai warga setempat (pendatang dari luar daerah), rawan banjir dan kebakaran serta rawan terhadap timbulnya penyakit.

⁸ Suparto. 2014. "Evaluasi Permukiman Dan Perumahan Kumuh Berbasis Lingkungan Di Kel. Kalibanteng Kidul Kota Semarang", Majalah Ilmiah Pawiyatan. Vol. XXI, No. 1. Maret. Hal. 35

⁹ Rahayu, M dan Rutiana D. 2007. "Strategi Perencanaan Pembangunan Permukiman Kumuh, Kasus Permukiman Bantaran Sungai Bengawan Solo, Kelurahan Pucangawit, Surakarta", Gema Teknik – No. 1/Tahun X Januari 2007 Hal. 24

Menurut Wicaksono (2010) dalam Sukari (2010)¹⁰ permukiman kumuh adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya. Bahkan dapat pula dikatakan bahwa para penghuninya benar-benar berada dalam lingkungan yang sangat membahayakan kehidupannya. Secara umum permukiman kumuh terlihat tingkat kepadatan penduduk, hunian, bangunan sangat tinggi, kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi infrastruktur fisik dan sosial seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka, rekreasi, sosial, atau fasilitas pelayanan kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai tingkat pendapatan penghuninya yang rendah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah serta kohesivitas komunitas yang rendah karena beragamnya norma sosial budaya yang dianut.

2.1.2 Karakteristik Permukiman Kumuh

Menurut Siswono Yudohusodo (1991)¹¹ dalam bukunya Rumah untuk seluruh Rakyat, mengemukakan lingkungan permukiman kumuh merupakan lingkungan perumahan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- Kondisi fisik lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, yaitu kurangnya atau tidak tersedianya prasarana, sarana, fasilitas lingkungan. Walaupun ada, kondisinya sangat buruk dan di samping itu, tata letak bangunan tidak teratur;
- Kondisi bangunan yang sangat buruk serta bahan-bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan bangunan yang bersifat semi permanen;
- Kepadatan bangunan dengan KDB yang besar dari yang diijinkan, dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi (lebih dari 500 jiwa per ha); dan
- Fungsi-fungsi kota yang bercampur dan tidak beraturan.

Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Suparlan (1997) dalam Oktaviansyah (2012)¹² adalah:

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai;

¹⁰ Sukari. 2010. " Permukiman Kota Dan Masalahnya – Kasus Kota Yogyakarta", JANTRA Vol. V, No.10, Desember 2010, ISSN 1907 – 9605.

¹¹ Yudohusodo, S dkk. 1991. " Rumah Untuk Seluruh Rakyat". Jakarta:INKOPPOL. Hal 333-334

¹² Oktaviansyah, E. 2012. "Penataan Permukiman Kumuh Rawan Bencana Kebakaran Di Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarakan", Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 4, No. 2, Desember 2012. Hal-33

2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin;
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya;
4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komunitas yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai:
 - a. Sebuah komunitas tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
 - b. Satuan komunitas tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
 - c. Sebuah satuan komunitas tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
5. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut; dan
6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal

Beberapa ciri-ciri daerah kumuh menurut Rikhwanto (2009) dalam Suparto (2014)¹³ antara lain:

1. Dihuni oleh penduduk yang padat, baik karena pertumbuhan penduduk akibat Kelahiran mau pun karena adanya urbanisasi;
2. Dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, atau memproduksi sub sistem yang hidup di bawah garis kemiskinan;
3. Rumah-rumah yang merupakan rumah darurat yang terbuat dari bahan-bahan bekas dan tidak layak;
4. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, biasanya ditandai oleh lingkungan fisik yang jorok dan mudahnya tersebar penyakit menular;
5. Langkanya pelayanan kota seperti: air bersih, fasilitas MCK, listrik, dan sebagainya;

¹³ Suparto. *loc.cit.* Hal.35

6. Pertumbuhannya tidak terencana sehingga penampilan fisiknya pun tidak teratur dan tidak terurus, seperti: jalan yang sempit, halaman rumah tidak ada, dan sebagainya;
7. Kuatnya gaya hidup “pedesaan” yang masih tradisional;
8. Ditempati secara ilegal atau status hukum tanah yang tidak jelas (bermasalah); dan
9. Biasanya ditandai oleh banyaknya perilaku menyimpang dan tindak kriminal.

Sedangkan menurut Sinulingga (2005) dalam Muhtar (2012)¹⁴ permukiman kumuh memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Penduduk sangat padat antara 250 - 400 jiwa/ha. Pendapat para pakar perkotaan (MMUDP,90) menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah mencapai 80 jiwa/ha maka timbul masalah akibat kepadatan ini, antara kawasan perumahan yang dibangunkan tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologikal, psikologikal dan perlindungan terhadap penyakit;
2. Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi di sebalik atap-atap rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain;
3. Kemudahan perparitan tidak mencukupi dan terdapat jalan-jalan tanpa perparitan sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah tenggelam oleh air;
4. Kemudahan pembuangan air kotor/buangan sangat minimum sekali. Ada di antaranya yang langsung membuang buangan ke saluran yang dekat dengan rumah, ataupun ada juga yang membuangnya ke sungai yang terdekat; dan
5. Kemudahan penyediaan air bersih sangat minimum, memanfaatkan air telaga cetek, air hujan atau membeli daripada penjual air di sekeliling.

Ciri-ciri kekumuhan menurut Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman adalah :

1. Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
2. Ketidaklengkapan prasarana, saana dan utilitas umum;
3. Penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
4. Pembangunan rumah, perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

¹⁴ Muhtar dkk. 2012. *Rapid Assessment* Daerah Aliran Sungai Ciliwung Di Kelurahan Manggarai & Kelurahan Kampung Melayu, DKI Jakarta. Jakarta: P3KS Press (Anggota IKAPI)

2.1.3 Penyebab Utama Timbulnya Permukiman Kumuh

Faktor yang berpengaruh dalam turunnya kualitas permukiman adalah tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah; lingkungan fisik, biologi, sosial dan budaya setempat yang belum mendukung; tingkat kemajuan teknologi pembangunan perumahan masih terbelakang; serta belum konsistennya kebijaksanaan pemerintah dalam tata guna lahan dan program pembangunan perumahan untuk rakyat (Napitupulu, 1994; Parwoto, 1994; Panudju, 1999 dalam Keman 2005)¹⁵.

Faktor penyebab munculnya kawasan kumuh (*slum*) dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung (Hariyanto, 2008 dalam Santosa 2012)¹⁶. Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan). Faktor lingkungan perumahan yang menimbulkan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB). Faktor sanitasi lingkungan yang menimbulkan permasalahan meliputi kondisi air bersih, mandi cuci kakus (MCK), pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase, dan jalan. Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan, tetapi faktor-faktor ini berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan. Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial, dan budaya masyarakat.

2.1.4 Kriteria Penilaian Kawasan Kumuh

Tingkat kekumuhan suatu lingkungan permukiman dapat diukur dari beberapa derajat kekumuhan yang signifikan dan sangat berpengaruh terhadap terjadinya kekumuhan suatu lingkungan permukiman. Sebagai panduan, Kriteria dibawah ini dapat digunakan sebagai dasar penentuan tingkat kekumuhan, atau dapat juga dilakukan penyesuaian terhadap kondisi masing-masing. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman (2002)¹⁷ kriteria-kriteria dalam penentuan tingkat kekumuhan antara lain dapat dilihat pada tabel berikut.

¹⁵ Keman, S. 2005. "Kesehatan Perumahan Dan Lingkungan Permukiman", Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, NO. 1, Juli 2005 Hal.29

¹⁶ Santosa, Budi. 2012. "Kesiapan Dan Kesiediaan Pemangku Kepentingan Untuk Peremajaan Kawasan Kumuh Melalui Pembangunan Rumah Susun: Studi Kasus Di Kota Semarang", Jurnal Perkotaan Vol. 4 No. 2 Desember 2012

¹⁷ Kamal, Mustofa. 2005. "Manfaat Penataan Permukiman Kumuh Terhadap Masyarakat Nelayan di Kawasan Bandengan Kabupaten Kendal", Tesis.

Kriteria berdasarkan lokasi	<ul style="list-style-type: none"> - Status legalitas tanah - Status penguasaan bangunan - Frekuensi bencana - Frekuensi bencana banjir - Frekuensi bencana tanah longsor
Kriteria berdasarkan kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepadatan penduduk - Rata-rata jumlah anggota keluarga dalam 1 kepala keluarga (KK) - Jumlah kepala keluarga (KK) per rumah - Tingkat pertumbuhan penduduk - Angka kematian kasar - Status Gizi Balita - Angka kesakitan malaria - Angka kesakitan diare - Angka kesakitan demam berdarah - Angka kesakitan ISPA
Kriteria berdasarkan kondisi bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas struktur bangunan - Kepadatan bangunan - Kesehatan dan kenyamanan bangunan - Penggunaan luas lantai bangunan
Kriteria berdasarkan kondisi sarana dan prasarana dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pelayanan air bersih - Kondisi sanitasi lingkungan - Kondisi persampahan - Kondisi drainase - Kondisi jalan - Ruang terbuka
Kriteria berdasarkan kondisi sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kemiskinan - Tingkat pendapatan - Tingkat pendidikan - Tingkat kerawanan keamanan

2.2 Penanganan Permukiman Kumuh

Target pemerintah 0% permukiman kumuh di tahun 2019 merupakan hal besar yang harus dicapai. Dibutuhkan upaya penanganan yang sangat serius dalam memenuhinya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata penanganan memiliki arti proses, cara atau perbuatan menangani. Konsep penanganan permukiman kumuh mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, yaitu melalui kegiatan pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali (Pasal 97 ayat 1):

1. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni;

2. Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar; dan
3. Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.

Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan permukiman.

Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun 2015 – 2019 oleh kementerian perumahan rakyat Republik Indonesia, berisi bahwa upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilaksanakan dengan azas:

1. Pendekatan tridaya sebagai satu kesatuan upaya penataan sosial kemasyarakatan, penataan lingkungan fisik, dan pengembangan kegiatan usaha;
 2. Pemberdayaan setiap kegiatan diarahkan pada proses pemampuan, penggalian sumber daya lokal serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan sebagai pelaku utama (leading actors); dan
 3. Perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat
- Komponen penanganan permukiman kumuh adalah sebagai

berikut:

1. Pembangunan fisik lingkungan meliputi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), air dan sanitasi, dan sertifikasi lahan.
 2. Pembangunan sosial meliputi pendidikan dan kesehatan.
 3. Pembangunan ekonomi meliputi pelatihan kewirausahaan dan pinjaman modal usaha.
 4. Capacity building meliputi pembinaan pengelolaan sarana dan pelatihan pemetaan swadaya.
- Prinsip dasar penanganan permukiman kumuh adalah sebagai

berikut:

1. Pemerintah Daerah Sebagai “Panglima”
Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh sedangkan Pemerintah Pusat berperan sebagai pendamping Daerah dan menciptakan kondisi yang kondusif
2. Partisipasi Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan Program
Pelibatan masyarakat melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pengawasan.
3. Kolaborasi Dan Komprehensif

Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun non-fisik melalui kolaborasi antar para pemangku kepentingan dalam perencanaan yang terpadu

4. Terintegrasi Dengan Sistem Kota

Keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana pembangunan kota, serta keterpaduan prasarana kota dan kawasan permukiman

5. Menjamin Keamanan Bermukim

Perumahan merupakan hak dasar manusia, dan penduduk yang tinggal dan menghuni rumah, baik legal maupun ilegal, memperoleh perlindungan dari penggusuran yang sewenang-wenang.

Dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh terdapat 3 pendekatan (Setijanti, 2010)¹⁸, yakni:

1. Pendekatan partisipatori, yang mampu mengeksplorasi masukan dari komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang memfokuskan pada permintaan lokal, perubahan perilaku dan yang mampu mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan pemeliharaannya.
2. Pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan menaruh perhatian utama pada pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi dan komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan.
3. Pendekatan secara fisik dari sisi tata ruang, pendekatan ini pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh merupakan bagian dari rencana umum tata ruang kota dan merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ruang kota secara integral. Bentuk-bentuk penanganan dengan pendekatan aspek keruangan dibedakan menjadi 2 bagian, yakni :
 - Redefinisi merupakan penanganan permukiman dengan melakukan intervensi program permukiman tanpa merubah struktur ruang

¹⁸Butar, D. dan R.Setiawan. 2010. "Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat", Jurnal Teknik POMITS Vol. 1, No. 1, 2012.

- yang telah ada dan berjalan, yang terdiri dari kegiatan seperti revitalisasi dan rehabilitasi.
- Restrukturisasi merupakan suatu proses penstruktur kembali pola ruang atau struktur ruang yang telah ada, meliputi renewal, redevelopment dan restorasi.

Tabel 2.1 Rumusan Variabel

Sumber Referensi	Aspek	Variabel
UU No 1 Tahun 2011	Fisik dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Keteraturan Bangunan • Kepadatan Bangunan • Kualitas bangunan • Sarana • Prasarana
Ravianto (2009) Dalam Jurnal "Evaluasi Pemukiman Dan Perumahan Kumuh Berbasis Lingkungan Di Kel. Kalibanteng Kidul Kota Semarang" Suparto, Vol : XX I, No : 1, Maret 2014 Majalah Ilmiah Pawiyan. Hal.35	Fisik dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana • Prasarana • Fasilitas Pendidikan • Fasilitas Kesehatan • Sarana dan prasarana sosial budaya
	Sosial Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan Penduduk
Hetty Adriasih (2004) Dalam Jurnal " Strategi Perencanaan Pembangunan Permukiman Kumuh, Kasus Pemukiman Bantaran Sungai Bengawan Solo, Kelurahan Pucangsawit, Surakarta" Rahayu, Murtanti Jani dan Rutiana D , No. 1 Tahun X Januari 2007 Gema Teknik – Hal 43	Fisik dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan hunian <ul style="list-style-type: none"> • Luas Bangunan • Jumlah Penghuni • Keteraturan Bangunan • Bahan Bangunan • Prasarana <ul style="list-style-type: none"> • MCK • Air Bersih • Saluran buangan • Listrik • Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Kesehatan • Sosial • Banjir • Kebakaran • Legalitas Tanah
	Sosial Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pendidikan • Status Penghuni • Penyakit
	Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Mata pencaharian

Sumber Referensi	Aspek	Variabel
Wicaksono (2010)	Fisik dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan hunian <ul style="list-style-type: none"> • Luas Bangunan • Jumlah Penghuni • Kepadatan bangunan • Bahan Bangunan • Sarana Prasarana <ul style="list-style-type: none"> • Air bersih • Jalan • Drainase • Sanitasi • Listrik • Fasilitas <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Kesehatan • Sosial • Perdagangan & Jasa • RTH • Rekreasi
	Sosial Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan Penduduk • Tingkat pendidikan • Tingkat Keterampilan • Tingkat privasi Keluarga • Kohesivitas komunitas
Hariyanto, 2008 Santosa, Budi. 2012. "Kesiapan Dan Kesiediaan Pemangku Kepentingan Untuk Peremajaan Kawasan Kumuh Melalui Pembangunan Rumah Susun: Studi Kasus Di Kota Semarang", Jurnal Perkotaan Vol. 4 No. 2 Desember 2012	Fisik dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi rumah • Status kepemilikan lahan • Kepadatan bangunan • Kondisi air bersih • MCK • Pengelolaan sampah • Pembuangan air limbah RT • Drainase • Jalan
	Sosial Kependudukan dan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomi masyarakat • Sosial Masyarakat

Sumber Referensi	Aspek	Variabel
Napitupulu (1994), Parwoto (1994), Panudju (1999) Kernan, Soedjajadi. 2005. "Kesehatan Perumahan Dan Lingkungan Pemukiman", Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, NO. 1, Juli 2005 : 29 -42	Fisik, lingkungan, sosial kependudukan, sosial ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat ekonomi • Lingkungan fisik • Sosial • Budaya • Kemajuan teknologi pembangunan perumahan • Kebijakan pemerintah
Yudohusodo, S dkk. 1991. "Rumah Untuk Seluruh Rakyat". Jakarta:INKOPPOL. Hal 333-334	Fisik, lingkungan dan sosial kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Prasarana • Sarana • Fasilitas lingkungan • Keteraturan bangunan • Kondisi bangunan dilihat dari bahan bangunan • Kepadatan bangunan • Kepadatan penduduk • Fungsi kota bercampur
Rikhwanto (2009) Suparto Vol : XX I, No : 1, Maret 2014 Majalah Ilmiah Pawiyatan. Hal.35	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan bangunan • Sanitasi • Tingkat kesehatan • Air bersih • Fasilitas MCK • Listrik • Keteraturan bangunan • Jalan • Status kepemilikan lahan • Tingkat kriminalitas
	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan penduduk <ul style="list-style-type: none"> • Kelahiran • Urbanisasi
	Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan • Pekerjaan tidak tetap • Kemiskinan
Simulingga (2005) Muhtar dkk. 2012. Rapid Assessment Daerah Aliran Sungai Ciliwung Di Kelurahan	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Luas Jalan • Kondisi Drainase • Pembuangan limbah RT • Penyediaan air bersih

Sumber Referensi	Aspek	Variabel
Manggarai & Kelurahan Kampung Melayu, DKI Jakarta. Jakarta: P3KS Press (Anggota IKAPI)	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan penduduk
Suparlan (1997) Oktaviansyah, E. 2012. "Penataan Permukiman Kumuh Rawan Bencana Kebakaran Di Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarakan", Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 4, No. 2, Desember 2012	Fisik dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Umum • Kondisi bangunan • Penggunaan ruang dalam rumah • Kepadatan Bangunan • Keteraturan Bangunan
	Sosial Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan penduduk
	Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Mata pencaharian • Tingkat ekonomi
Direktorat Jenderal dan Perumahan dan Permukiman (2002) Kamal, Mustofa. 2005. "Manfaat Penataan Permukiman Kumuh Terhadap Masyarakat Nelayan di Kawasan Bandengan Kabupaten Kendal", Tesis.	Fisik Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi • Legalitas tanah • Status penguasaan bangunan • Frekuensi bencana kebakaran • Frekuensi bencana banjir • Frekuensi bencana tanah longsor • Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan penduduk • Rata-rata jumlah anggota keluarga dalam 1 KK • Jumlah KK/rumah • Pertumbuhan penduduk • Angka kematian kasar • Status gizi balita • Malaria • Diare • Demam berdarah • ISPA • Kondisi bangunan <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas struktur bangunan • Kepadatan bangunan • Kesehatan & kenyamanan bangunan • Penggunaan luas lantai

Sumber Referensi	Aspek	Variabel
		bangunan <ul style="list-style-type: none"> • SarPras dasar • Pelayanan air bersih • Sanitasi lingkungan • Persampahan • Drainase • Jalan • RTH • Sosial ekonomi • Kemiskinan • Pendapatan • Pendidikan • Kerawanan keamanan
Undang-undang No 20 Tahun 2011	Konsep Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemugaran • Peremajaan • Permukiman Kembali
Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun 2015 – 2019 oleh kementerian perumahan rakyat RI	Komponen Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Fisik • Pembangunan Sosial • Pembangunan Ekonomi • Capacity Building
Setijanti (2010) Butar, Debora Catherine Butar dan Rulli Pratiwi Setiawan. 2010. "Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat", Jurnal Teknik POMITS Vol. 1, No. 1, 2012.	Pendekatan	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipatori • Pembangunan berkelanjutan • Secara fisik dari sisi tata ruang

Sumber : Kajian Pustaka, 2015

2.3 Landasan Penelitian

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah didapat dari berbagai referensi terkait penanganan permukiman kumuh, dapat dibuat suatu rangkuman untuk menyimpulkan unsur-unsur penting dalam penelitian yang akan dilakukan. Unsur-unsur penting yang dimaksud adalah teori-teori yang mampu membentuk variabel yang akan diteliti yang menjadi landasan penelitian. Dari berbagai referensi teori yang sudah dikumpulkan, disunting dan dipilah sesuai dengan kebutuhan. Landasan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengertian permukiman kumuh adalah adalah suatu lingkungan permukiman yang tidak layak huni disebabkan oleh faktor-faktor berikut:
 - Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi.
Semakin tinggi tingkat kepadatan bangunan maka lingkungan permukiman akan semakin kumuh akibat keterbatasan lahan yang tersedia.
 - Kualitas struktur bangunan yang tidak memenuhi syarat.
Kualitas struktur bangunan yang tidak memenuhi syarat bisa dilihat dari pondasi, dinding, atap serta lantai suatu bangunan rumah tinggal tidak bersifat non permanen.
 - Sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat atau standar yang telah ditentukan.
 - Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
Semakin padat penduduk pada suatu wilayah mengakibatkan semakin besarnya tekanan terhadap sumber daya dan daya dukung fisik lingkungan yang ada pada wilayah tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan prasarana dan sarana.
 - Tidak jelasnya status legalitas tanah. Semakin luas suatu permukiman berada diatas tanah yang tidak diperuntukkan bagi permukiman, maka tingkat kekumuhannya semakin tinggi.
 - Rendahnya pendapatan penduduk, hal ini bisa dilihat dari tingkat pendapatan penduduk yang berada dibawah nilai UMR yang telah ditetapkan.
2. Faktor penyebab utama tumbuhnya permukiman kumuh adalah sebagai berikut:
 - Kepadatan penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan ketersediaan permukiman dan rumah yang layak huni yang sesuai dengan standar rumah sehat;

- Tingkat pendapatan penduduk yang rendah dalam hal ini hal pendapatan penduduk dibawah nilai UMR Kota Pasuruan. UMR Kota Pasuruan pada tahun 2015 adalah Rp. 1.575.000¹⁴;
 - Disiplin warga yang rendah, yang kurang memperhatikan kesehatan lingkungan tempat tinggal;
 - Kurangnya pengendalian tata ruang kota, yang mengakibatkan pembangunan tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan;
3. Karakteristik permukiman kumuh adalah sebagai berikut:
- Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi
Semakin tinggi tingkat kepadatan bangunan maka lingkungan permukiman akan semakin kumuh akibat keterbatasan lahan yang tersedia.
 - Kualitas struktur bangunan yang tidak memenuhi syarat .
Kualitas struktur bangunan yang tidak memenuhi syarat bisa dilihat dari pondasi, dinding, atap serta lantai suatu bangunan rumah tinggal tidak sesuai dengan standar rumah sehat dan bersifat non permanen.
 - Dihuni oleh penduduk yang padat, baik karena pertumbuhan penduduk, akibat kelahiran mau pun karena adanya urbanisasi. Semakin padat penduduk pada suatu wilayah mengakibatkan semakin besarnya tekanan terhadap sumber daya dan daya dukung fisik lingkungan yang ada pada wilayah tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan prasarana dan sarana
 - Dihuni oleh penduduk yang berpenghasilan rendah.
Rendahnya pendapatan penduduk, hal ini bisa dilihat dari tingkat pendapatan penduduk yang berada dibawah nilai UMR yang telah ditetapkan.
 - Kondisi kesehatan rendah, ditandai oleh banyaknya penduduk yang terserang penyakit menular akibat buruknya kondisi lingkungan.
 - Ditempati secara ilegal atau status hukum tanah yang tidak jelas. Umumnya permukiman berada diatas tanah yang tidak diperuntukkan bagi permukiman.
 - Status penguasaan bangunan, dimana bangunan yang ditempati bukan milik sendiri melainkan sewa atau kontrak.
 - Biasanya ditandai oleh banyaknya perilaku menyimpang dan tindak kriminal.

¹⁴ <http://www.jatimprov.go.id/site/upah-minimum-kabupatenkota-jawa-timur-2015/>
(diakses 6 Mei 2015 pukul 12.28 WIB)

- Pelayanan air bersih atau akses terhadap air bersih yang terbatas.
 - Tingkat penggunaan septi-tank setiap rumah rendah.
 - Tingginya persentase jumlah kepala keluarga yang tidak mendapat pelayanan pengangkutan sampah oleh pemerintah daerah, swasta atau swadaya (terkoordinir) sehingga penduduk membuang sampah ke tempat yang tidak diperuntukkan secara khusus bagi pembuangan sampah, misalnya sungai, selokan atau tempat terbuka lain.
 - Drainase dengan kondisi saluran tidak lancar, tergenang bahkan tidak ada saluran drainasenya.
 - Kondisi jalan dengan kualitas permukaan rusak dan rusak berat mengindikasikan lingkungan permukiman yang kumuh.
4. Prinsip dasar penanganan permukiman kumuh adalah pemerintah sebagai panglima, partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan program, kolaborasi dan komprehensif, terintegrasi dengan sistem kota dan menjamin keamanan bermukim.
5. Dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh digunakan pendekatan partisipatori, yang mampu mengeksplorasi masukan dari komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang memfokuskan pada permintaan lokal, perubahan perilaku dan yang mampu mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan pemeliharannya

Tabel 2.2 Variabel Penelitian

Aspek	Variabel	Variabel Amatan
Fisik Bangunan	Rasio keteraturan bangunan	Jumlah bangunan yang tidak membelakangi sungai, menghadap jalan, dan berada di sempadan pantai / jumlah keseluruhan bangunan)
	Tingkat kepadatan bangunan	Jumlah bangunan dibagi luas lahan terbangun
	Tingkat kualitas bangunan	Jumlah bangunan permanen dan non permanen beserta kondisinya.
Sarana dan Prasarana	Rasio kelancaran Drainase	Kelancaran drainase (lancar, tidak lancar, tergenang, & tidak ada.) Tinggi genangan, durasi genangan, frekuensi genangan, sumber genangan.
	Rasio pelayanan Air bersih	Jangkauan pelayanan PDAM
	Rasio jenis Sanitasi	Jenis pembuangan air limbah rumah tangga
	Tingkat pelayanan pengangkutan sampah domestic	Frekuensi pengangkutan sampah dalam seminggu
	Tingkat kondisi perkerasan jalan	Kondisi perkerasan jalan (baik, sedang, buruk, sangat buruk)
	Rasio fasilitas pendidikan	Jumlah penduduk/jumlah fasilitas
	Rasio fasilitas kesehatan	Jumlah penduduk/jumlah fasilitas
	Rasio fasilitas sosial budaya	Jumlah penduduk/jumlah fasilitas

Aspek	Variabel	Variabel Amatan
	Rasio RTH	Luas RTH/luas wilayah
Legalitas Tanah	Status Kepemilikan Lahan	Prosentase status kepemilikan lahan
Lokasi	Banjir	Frekuensi banjir dalam setahun
	Kebakaran	Frekuensi kebakaran dalam setahun
Sosial Kependudukan	Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk/luas wilayah
	Kepadatan hunian	Luas bangunan/jumlah penghuni rumah
	Tingkat pendidikan	Pendidikan terakhir yang ditempuh
	Angka Kesakitan	Frekuensi dan Jenis penyakit yang sering melanda masyarakat dalam setahun
	Tingkat kriminalitas	Frekuensi tindak kejahatan dalam setahun
Sosial Ekonomi	Tingkat pendapatan	Pengeluaran & tabungan per bulan
	Tingkat kemiskinan	Jumlah KK Pra Sejahtera, sejahtera I & penerima Raskin

Sumber: *Kajian Teori, 2015*

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang merupakan alat untuk memecahkan masalah ataupun menyelesaikan suatu proses penelitian. Pembahasan mengenai metode penelitian mencakup metode pengumpulan data termasuk teknik penentuan sampel, dan metode analisis data.

3.1 Metode Pengumpulan Data dan Penentuan Sampel

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu survey primer yang berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan/narasumber dan survey sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen tertentu, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada penjelasan berikut.

3.1.1 Survei primer

Kegiatan survei yang dilakukan bertujuan memperoleh data langsung dari lapangan melalui teknik observasi, wawancara dan kuisioner.

3.1.1.1 Observasi lapangan

Observasi lapangan merupakan pengamatan keadaan lapangan secara visual. Adapun tujuan dari survey lapangan ini adalah untuk mengamati kondisi yang terdapat di lapangan, untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang sebenarnya terdapat di lapangan. obyek lapangan yang akan dikunjungi adalah lingkungan permukiman Kelurahan Panggungerto Kota Pasuruan.

3.1.1.2 Kuisioner

Pembagian kuisioner bertujuan untuk mengetahui kondisi lokasi, kependudukan, kondisi bangunan, kondisi prasarana dan sarana, serta kondisi sosial ekonomi. Penilaian terhadap kondisi kekumuhan dilakukan secara menyeluruh di wilayah studi. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan sampel dengan kesempatan yang sama adalah sampel acakan (random sampling). Random sampling adalah proses pemilihan sampel dimana seluruh anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk

dipilih. Masing-masing anggota pada populasi tersebut memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama untuk dipilih.²⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan. Berdasarkan monografi Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan tahun 2013 jumlah populasi adalah 919 KK. Untuk itu penentuan sampel menggunakan Rumus Slovin, dimana penggunaan rumus slovin mengasumsikan bahwa nilai data akan berdistribusi normal atau hampir normal.

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

keterangan:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi (Masyarakat di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan)

d : derajat kecermatan

Nilai derajat kesalahan yang diambil sebesar 10%. Hal ini mengandung pengertian bahwa pengambilan sampel akan mempunyai kepercayaan sebesar 90%. Dengan berdasarkan perhitungan tersebut, berikut ditampilkan jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian:

$$\begin{aligned} n &= \frac{1014}{(1014 \times 0.01) + 1} \\ &= 91 \text{ sampel (responden)} \end{aligned}$$

Setelah didapat 91 responden yang didapat kemudian didistribusikan pada masing-masing RW (5 RW) yang ada di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Tabel 3.1
Kuisisioner Masyarakat

No	Aspek	Pertanyaan yang diajukan
1	Fisik dan Lingkungan	-Luas Bangunan -Sumber dan tingkat pelayanan air bersih -Kondisi sanitasi lingkungan - Sistem pembuangan sampah
2	Sosial Kependudukan	-Jumlah anggota keluarga - Tingkat Pendidikan
3	Kondisi sosial ekonomi	- Tingkat pendapatan

²⁹ Koutur, Rosny. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta, PPM:2004. Hal 139

3.1.2 Survey Sekunder

Data sekunder, diperoleh dari buku-buku kepustakaan dan beberapa instansi yang terkait dan validitas datanya dapat dipertanggung jawabkan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survey ke instansi-instansi untuk mendapatkan data yang dikeluarkan oleh instansi tersebut dan telaah dokumen. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

3.1.2.1 Survey Instansi

Survey instansi dilakukan dengan mengumpulkan referensi data dari instansi. Adapun survey instansi meliputi monografi kelurahan Pangungrejo Kota Pasuruan, Kecamatan Pangungrejo dalam angka dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan.

3.1.2.2 Studi Literatur

Studi literatur merupakan survey data maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu terkait dengan permukiman, masalah permukiman kumuh, dan upaya penanganan permukiman kumuh.

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis adalah metode yang digunakan untuk menganalisis ataupun mengolah data-data yang telah diperoleh dari teknik-teknik pengumpulan data yang telah dilakukan.

3.2.1 Analisa Deskriptif

Analisa deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul di wilayah penelitian. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata – rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase.³⁰ Analisis statistik deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi eksisting permukiman kumuh tiap

³⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung, Alfabeta:2011. Hal 147

area dari sebuah sampel yang teramati dan dapat digambarkan lewat tabel, grafik dan gambar untuk melihat kondisi fisik bangunan maupun prasarana, kependudukan, sosial dan ekonomi.

3.2.2 Analisa Pembobotan

Analisa pembobotan dilakukan untuk menilai kondisi eksisting dengan kriteria yang sudah ditentukan. Penilaian adalah angka yang diberikan kepada setiap indikator yang besarnya menunjukkan derajat atau tingkat kekumuhan suatu lingkungan permukiman berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan penilaian dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria pada umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda – beda. Penentuan bobot kriteria bersifat relative dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing – masing kriteria. Meskipun dalam memberikan nilai, preferensi individu atau kelompok masyarakat sangat berpengaruh, namun kriteria dasar penilaian adalah hal yang diupayakan bersifat umum dan obyektif.

Penilaian akhir identifikasi kawasan permukiman kumuh dilakukan sebagai akumulasi dari hasil perhitungan terhadap kriteria sebagaimana dikemukakan diatas. Dari penjumlahan berbagai peubah akan diperoleh total nilai maksimum dan minimum setiap variabel kriteria.

Proses penilaian menggunakan batas ambang yang dikategorikan kedalam :

- Penilaian dikategori tinggi
- Penilaian dikategori sedang
- Penilaian dikategori rendah
- Penilaian dikategori sangat rendah

Untuk mengklasifikasikan hasil kegiatan penilaian berdasarkan kategori tersebut diatas maka dilakukan penghitungan terhadap akumulasi bobot yang telah dilakukan dengan formula sederhana *Sturges* yaitu:

- Dihitung koefisien ambang interval (rentang) dengan cara mengurangkan nilai tertinggi (hasil penilaian tertinggi) dari hasil pembobotan dengan nilai terendah (hasil penilaian terendah) lalu dibagi 4 (empat).
- Koefisien ambang rentang sebagai pengurang dari Nilai Tertinggi akan menghasilkan batas nilai paling bawah dari tertinggi.
- Untuk kategori selanjutnya dilakukan pengurangan 1 angka terhadap batas terendah dari akan menghasilkan batas tertinggi untuk kategori sedang, dan seterusnya.

$$\text{Nilai Rentang (NR)} = (\Sigma \text{Nilai Tertinggi} - \Sigma \text{Nilai Terendah})$$

Bobot kelompok indikator adalah besaran yang diberikan pada masing-masing indikator untuk menunjukkan seberapa signifikan aspek indikator tersebut dalam menentukan tingkat atau derajat kekumuhan suatu lingkungan permukiman. Berikut merupakan tabel pemberian bobot yang ditentukan berdasarkan skala prioritas. Pemberian bobot juga diberikan kepada masing-masing indikator di setiap kelompok sub-indikator. Penentuan bobot masing-masing indikator juga didasarkan pada pertimbangan prioritas masing-masing dalam satu kelompok yang sama seperti pada tabel di bawah ini.

3.2.3 Analisa Prospektif Partisipatif

Analisis prospektif partisipatif merupakan adaptasi dari berbagai metode komprehensif yang dikemas dalam suatu kerangka kerja operasional yang komprehensif dan cepat. Sifat kognitif dari metode tersebut adalah berupa tipologi *focus on interactions and consensus building*, yang mampu menghasilkan suatu konsensus dari interaksi antara *stakeholder*, yang dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan. Godet dan Roubelat (1998), Bourgeois dan Jesus (2004) dalam A.A. Damai (2011)³¹ Metode ini didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu partisipasi, transparansi, konsistensi, keefektifan, relevansi, dapat diulang, beralasan, dan peningkatan kapasitas *stakeholders*. Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah Lurah Panggungrejo, ketua BKM, ketua karang taruna, Ketua PKK dan satu perwakilan masyarakat.

Uraian tahapan analisis prospektif partisipatif adalah sebagai berikut. Penentuan/definisi sistem dilakukan sebagai tahap awal dalam temu pakar, dan dilakukan melalui diskusi. Tahap ini penting sebagai pengembangan eksplorasi masa depan (*foreknowledge*) yang terfokus pada wilayah Kelurahan Panggungrejo, dengan batasan seperti tersebut di atas. Identifikasi variabel sistem dilakukan melalui *brainstorming* yang dimulai dengan identifikasi variabel yang memiliki pengaruh terhadap kekumuhan dari sudut pandang peserta.

Definisi variabel kunci dilakukan melalui diskusi terstruktur yang membahas relevansi dari masing-masing variabel yang telah disepakati sebelumnya. Aturan sederhana yang digunakan dalam mendiskusikan kandungan dari opini yang diajukan oleh peserta merupakan variabel atau bukan adalah (1) bukan merupakan sebuah kalimat; (2) tidak berbentuk negatif; dan (3) secara umum bukan ekspresi fisik. Variabel yang tidak dapat dinyatakan dalam berbagai kondisi (*state*) yang berbeda, dianggap sebagai

³¹ A.A.Damai. "Analisis Prospektif Partisipatif Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Lampung". Forum Pascasarjana, Vol.34 No.4 Oktober 2011. Hal-282

variabel yang tidak relevan (*irrelevant*). Semua variabel yang sudah ditentukan dan didefinisikan langsung dimasukkan dalam paket lembar kerja perangkat lunak *Microsoft Excel* yang telah diprogram (hak cipta Bourgeois dan Jesus, 2004) untuk analisis selanjutnya.

Analisis pengaruh antarvariabel dilakukan melalui analisis struktural dan kerja kelompok. Peserta diminta untuk menganalisis pengaruh/kebergantungan langsung (*influence/dependence, I/D*) setiap variabel dengan variabel lainnya, dengan menggunakan pendekatan valuasi konsensual (*consensual*). Valuasi pengaruh langsung masing-masing variabel terhadap variabel lainnya menggunakan skala dari 0 = tidak ada pengaruh sampai 3 = berpengaruh sangat kuat. Nilai-nilai tersebut didiskusikan oleh peserta, dan setelah tercapai kesepakatan, dimasukkan di dalam matriks *influence/dependence (I/D)*. Jumlah valuasi bergantung pada jumlah variabel yang telah diidentifikasi, jika terdapat n buah, ada $n^2 - n$ hubungan antarvariabel yang harus didiskusikan dan dievaluasi. Interpretasi hubungan *influence/dependence (interpretation of influence/dependence links)* dilakukan berdasarkan hasil olahan paket perangkat lunak *Microsoft Excel*, dengan output berupa tabel dan grafik.

Interpretasi tabel skor kekuatan variabel global tertimbang adalah untuk menentukan ranking variabel. Variabel yang memiliki skor tertinggi merupakan variabel terkuat, yaitu yang memiliki pengaruh tertinggi dan kebergantungan terendah. Grafik pengaruh langsung dan tidak langsung juga menunjukkan tingkat kekuatan variabel. Kuadran I (kiri atas) merupakan wilayah variabel penggerak (*driving*). Kuadran II (kanan atas) merupakan wilayah variabel kontrol (*leverage*). Kuadran III (kanan bawah) merupakan wilayah variabel keluaran (output), yang bersifat sangat bergantung dan hanya sedikit pengaruh. Kuadran IV (kiri bawah) merupakan wilayah variabel marjinal (*marginal*), kelompok ini akan dikeluarkan dari analisis. Variabel yang berada pada Kuadran I dan II merupakan variabel kuat, dan akan dipilih sebagai variabel penentu dalam analisis selanjutnya.

<p style="text-align: center;">Kuadran I variabel penggerak (<i>driving</i>).</p>	<p style="text-align: center;">Kuadran II variabel kontrol (<i>leverage</i>)</p>
<p style="text-align: center;">Kuadran IV variabel marjinal (<i>marginal</i>),</p>	<p style="text-align: center;">Kuadran III variabel keluaran (output)</p>

BAB IV GAMBARAN UMUM

Untuk memberikan gambaran kondisi Kelurahan Panggungrejo secara keseluruhan, maka pada bab ini akan dibahas beberapa hal terkait yakni dari aspek fisik, lingkungan, sosial kependudukan dan sosial ekonomi.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Panggungrejo merupakan satu dari tigabelas kelurahan yang ada di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, memiliki luas wilayah 58 Ha yang terletak pada posisi 112°45' - 112°55' Bujur Timur dan 7°35' - 7°45' Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kelurahan Panggungrejo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Selat Madura
Sebelah Selatan	:	Kelurahan Mandaranrejo
Sebelah Barat	:	Sungai Gembong
Sebelah Timur	:	Kelurahan Mandaranrejo

Secara administratif Kelurahan Panggungrejo terbagi menjadi 5 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT). Penduduk di Kelurahan Panggungrejo berjumlah 3558 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 1014 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta berikut.

Tabel 4.1
Gambaran Umum Kelurahan Panggungrejo

RW	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Jumlah Bangunan (Unit)	Luas Wilayah Terbangun (Ha)
I	321	126	119	0,8
II	1064	286	271	3
III	678	187	182	1,2
IV	946	256	241	1,8
V	549	159	144	1,3

RW	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Jumlah Bangunan (Unit)	Luas Wilayah Terbangun (Ha)
Total	3558	1014	957	8,1

Sumber : Monografi Kelurahan Tahun 2015

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada BAB III, jumlah sampel sebanyak 91 responden yang tersebar pada 5 RW. Untuk lebih jelasnya terkait komposisi responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Distribusi Kuisisioner

No	RW	Jumlah KK	Prosentase	Jumlah Responden
1	I	126	0.12	11
2	II	286	0.28	26
3	III	187	0.18	17
4	IV	256	0.25	23
5	V	159	0.16	14

Sumber: Hasil Perhitungan, 2015





INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL MALANG

PETA PEMBAGIAN RW

LEGENDA

- RW I
- RW II
- RW III
- RW IV
- RW V
- Gudang
- Lapangan
- Tambak
- Laut
- Sungai
- Mangrove
- Jalan

NO PETA: 4.2

Sumber Peta: 1. Citra
2. Survei Lapangan





Scale 1:50,000
1:50,000
1:50,000

- Boundary
- Road
- Railway
- Canal
- Stream
- Drainage
- Contour
- Spot Height
- Bench Mark
- Well
- Tank
- Building
- Forest
- Cultivated Land
- Bare Land
- Water

DEPARTMENT OF LAND SURVEY
GOVERNMENT OF INDIA



4.2 Kondisi Fisik Bangunan

Kondisi fisik rumah yang akan dibahas ini berdasarkan lokasi penelitian yang ada yaitu di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, terhadap 91 responden yang dijadikan sampel. Fisik dan lingkungan yang dibahas mulai dari keteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kondisi drainase, pelayanan air bersih, sanitasi, sistem pembuangan sampah, kondisi perkerasan jalan, jumlah fasilitas umum dan sosial serta frekuensi terjadinya bencana.

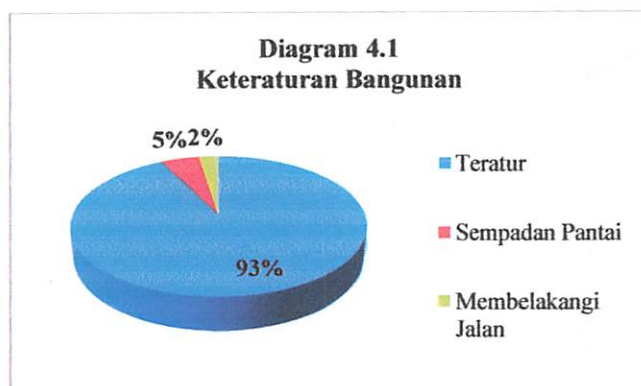
4.2.1 Keteraturan Bangunan

Keteraturan bangunan dapat dilihat pada perumahan formal, dimana orientasi umumnya menghadap jalan, ukuran bangunan dan lahan walaupun berbeda-beda tetapi memiliki pola tipe yang jelas serta bentuk bangunan, dan walaupun tampak berbeda-beda tetapi memiliki keteraturan pola tertentu. keteraturan bangunan juga dilihat dari orientasi, ukuran dan bentuk bangunan. Lebih jelasnya terkait jumlah dan prosentase keteraturan bangunan dapat dilihat pada tabel 4.3, diagram 4.1 dan peta 4.3.

Tabel 4.3
Keteraturan Bangunan

RW	Bangunan (Unit)		
	Teratur	Sempadan Pantai	Membelakangi Jalan
I	119	0	0
II	271	0	0
III	182	10	0
IV	218	0	23
V	96	38	0
Jumlah	886	48	23
Prosentase	93%	5%	2%

Sumber: Hasil Survey 2015



Sumber: Hasil Survey, 2015

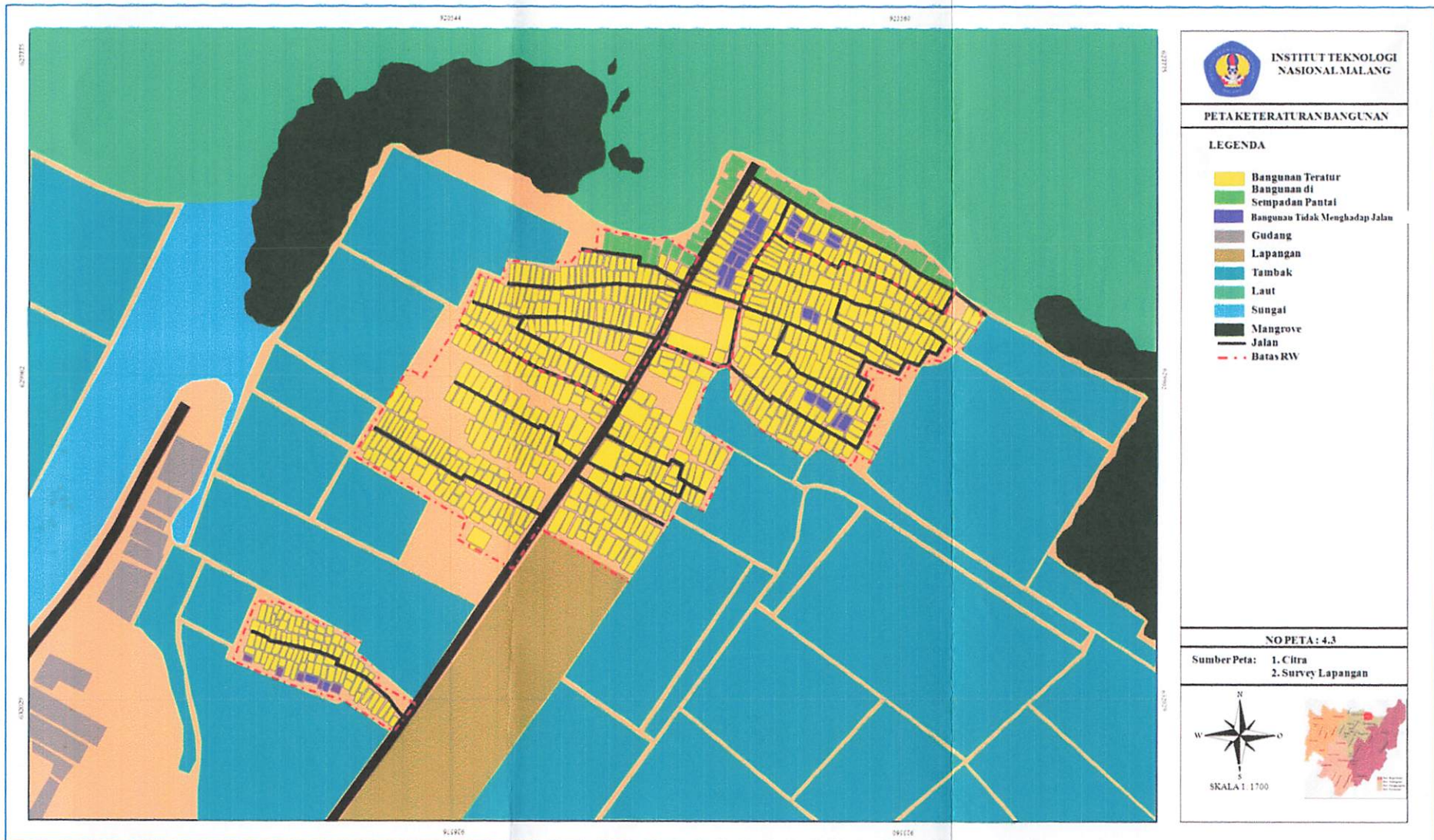
4.2.2 Kepadatan Bangunan

Kepadatan bangunan ditentukan dengan jumlah unit bangunan terhadap satuan luas (Ha). Berdasarkan hasil penelitian, RW I merupakan RW dengan kepadatan bangunan tertinggi yaitu 156 unit/Ha, sedangkan kepadatan terendah adalah RW II dengan kepadatan bangunan 89 unit/Ha.

Tabel 4.4
Kepadatan Bangunan

RW	Jumlah Bangunan (Unit)	Luas Wilayah Terbangun (Ha)	Kepadatan Bangunan (Unit / Ha)
I	119	0,8	149
II	271	3	90
III	182	1,2	152
IV	241	1,8	134
V	144	1,3	111
Jumlah	957	8,1	635

Sumber: Hasil Survey, 2015



INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL MALANG

PETA KETERATURAN BANGUNAN

LEGENDA

- Bangunan Teratur
- Bangunan di Sempadan Pantai
- Bangunan Tidak Menghadap Jalan
- Gudang
- Lapangan
- Tambak
- Laut
- Sungai
- Mangrove
- Jalan
- Batas RW

NO PETA : 4.3

Sumber Peta : 1. Citra
2. Survey Lapangan



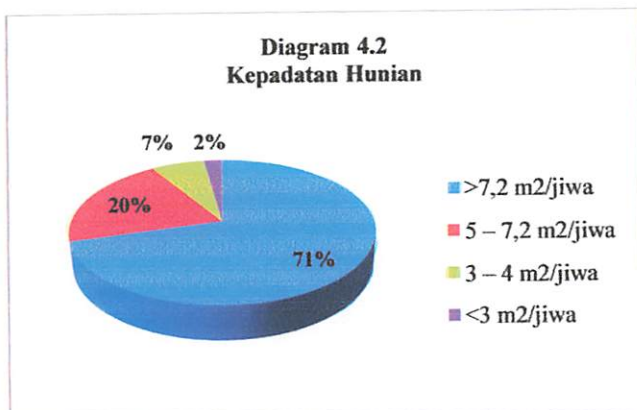
4.2.3 Kepadatan Hunian

Data kepadatan hunian diperoleh dari 91 responden yang ada di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil survey, lokasi penelitian memiliki 66 KK atau 73% dengan kepadatan hunian lebih dari 7,2 m²/jiwa. Terdapat 19 KK atau 21% memiliki kepadatan hunian 5-7,2 m²/jiwa atau 21%, 6 KK memiliki kepadatan hunian 3-4 m²/jiwa atau 7% dan 2 KK atau 2% dengan kepadatan hunian <3 m²/jiwa. Lebih jelasnya terkait kepadatan hunian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Kepadatan Hunian

RW	>7,2 m ² /jiwa	5 – 7,2 m ² /jiwa	3 – 4 m ² /jiwa	<3 m ² /jiwa
I	7	3	0	1
II	25	3	0	0
III	10	2	4	0
IV	13	7	2	1
V	11	4	0	0
Jumlah	66	19	6	2
Prosentase	73%	21%	7%	2%

Sumber: Hasil Survey dan Olahan, 2015



Sumber: Hasil Survey dan Olahan, 2015

4.2.4 Kualitas Bangunan

Kualitas bangunan rumah dilihat dari bahan struktur bangunan atap, dinding dan lantai berserta kondisinya. Sesuai dengan kondisi di lapangan, kualitas bangunan dibedakan menjadi 4 bagian yakni bangunan yang tergolong permanen baik, bangunan permanen buruk, bangunan yang tergolong non permanen baik dan bangunan non permanen buruk. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di lokasi penelitian, umumnya kualitas bangunan rumah tergolong dalam permanen baik dengan jumlah 48 unit atau 53%. Bangunan yang tergolong dalam permanen baik adalah bangunan yang kondisi memiliki bahan struktur bangunan atap berupa genteng atau asbes, dinding dari batu bata atau batako, dan lantai berbahan keramik, ubin atau plesteran semen dan dalam kondisi baik.



Gambar 4.1
Rumah Permanen Baik

Bangunan yang tergolong dalam permanen buruk adalah bangunan yang memiliki bahan atap berupa genteng atau asbes dalam kondisi bocor, dinding dari bata atau batako dengan keadaan lembab dan lantai dari keramik, ubin atau plesteran semen. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 91 responden, terdapat 30 unit rumah atau 35% yang tergolong dalam permanen buruk.



Gambar 4.2
Rumah Permanen Buruk

Bangunan yang tergolong dalam non permanen baik adalah bangunan yang bahan atapnya dari genteng atau asbes, dinding dari papan atau gabungan bata dan papan, lantai berupa ubin atau plesteran semen dan memiliki kondisi baik. berdasarkan hasil survey, terdapat 1 unit atau 1% yang tergolong dalam bangunan non permanen baik.



Gambar 4.3
Rumah Non Permanen Baik

Bangunan yang digolongkan dalam kategori non permanen buruk adalah bangunan rumah yang memiliki bahan atap bangunan berupa asbes atau genteng dengan kondisi bocor, dinding dari papan atau campuran papan dan bata serta lantai berupa plesteran semen. Hasil survey di tempat

penelitian menunjukkan terdapat 12 unit rumah atau 13% yang tergolong dalam non permanen buruk.



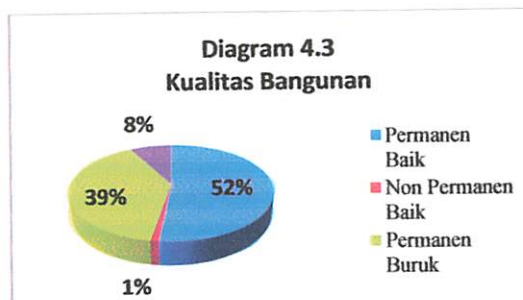
Gambar 4.4
Rumah Non Permanen Buruk

Untuk lebih jelasnya terkait prosentase kualitas bangunan, dapat dilihat pada tabel 4.6, diagram 4,6 dan peta 4.4.

Tabel 4.6
Kualitas Bangunan

RW	Permanen Baik	Non Permanen Baik	Permanen Buruk	Non Permanen Buruk
I	5	0	6	0
II	15	0	11	0
III	9	0	6	1
IV	13	1	7	2
V	5	0	6	4
Jumlah	47	1	36	7
Prosentase	52%	1%	40%	8%

Sumber: Hasil Survey, 2015



Sumber: Hasil Survey, 2015

4.2.5 Drainase

Jaringan drainase yaitu jaringan yang berfungsi sebagai tempat aliran air baik alami maupun yang buatan. Kondisi drainase ditentukan dengan melihat genangan pada lokasi permukiman, apakah drainase di lokasi kajian sering terjadi genangan atau tidak.

Berdasarkan pengamatan, pada umumnya jaringan drainase di Kelurahan Panggungrejo adalah saluran drainase tertutup. Kondisi drainase tergolong dalam kategori lancar dan tidak lancar. Ada juga wilayah RW yang tidak memiliki saluran drainase. Hasil pengamatan menyatakan sebagian besar sudah memiliki jaringan drainase dan bahwa di permukiman tidak pernah terjadi genangan air atau banjir. Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta 4.5 terkait jaringan drainase.

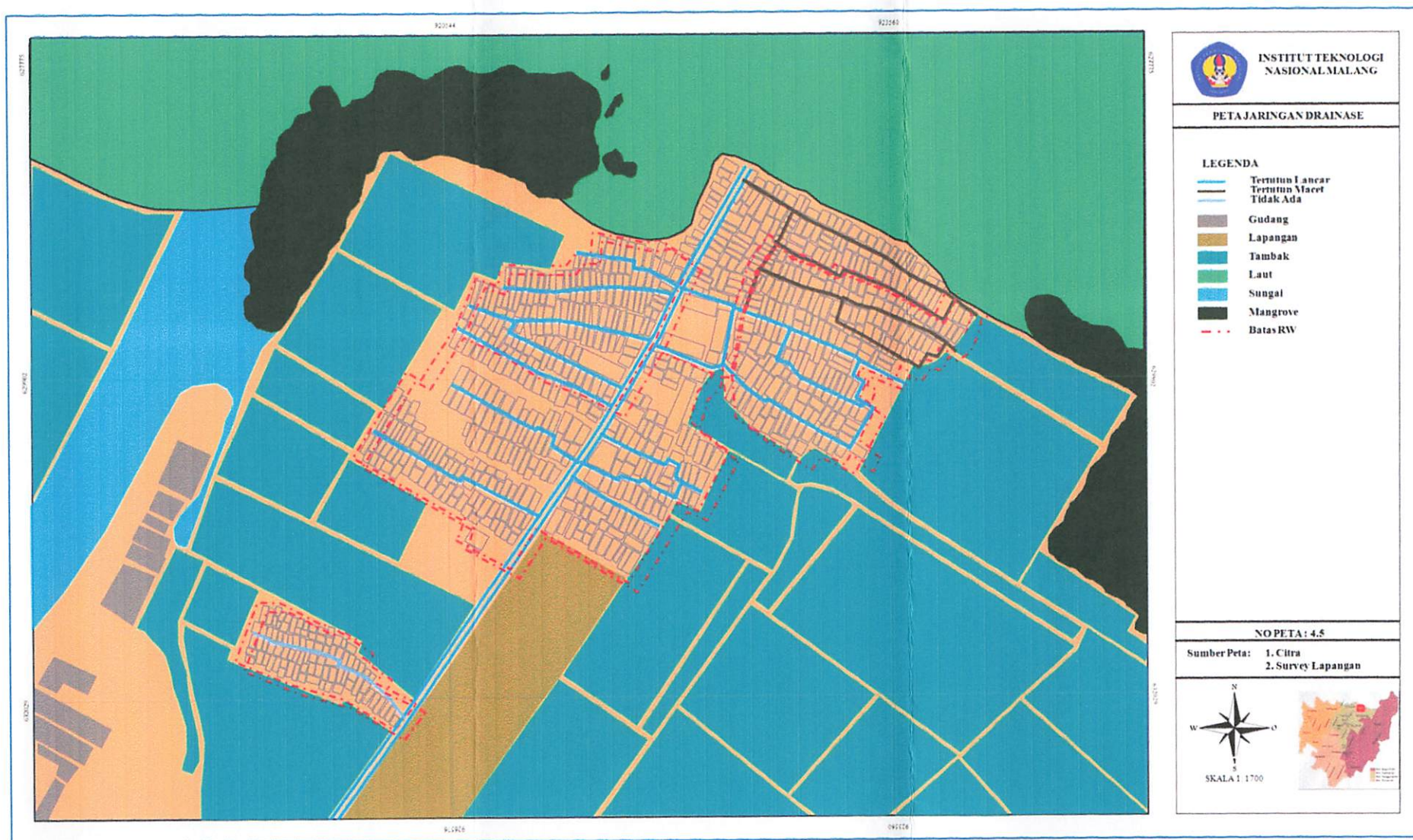
4.2.6 Jalan

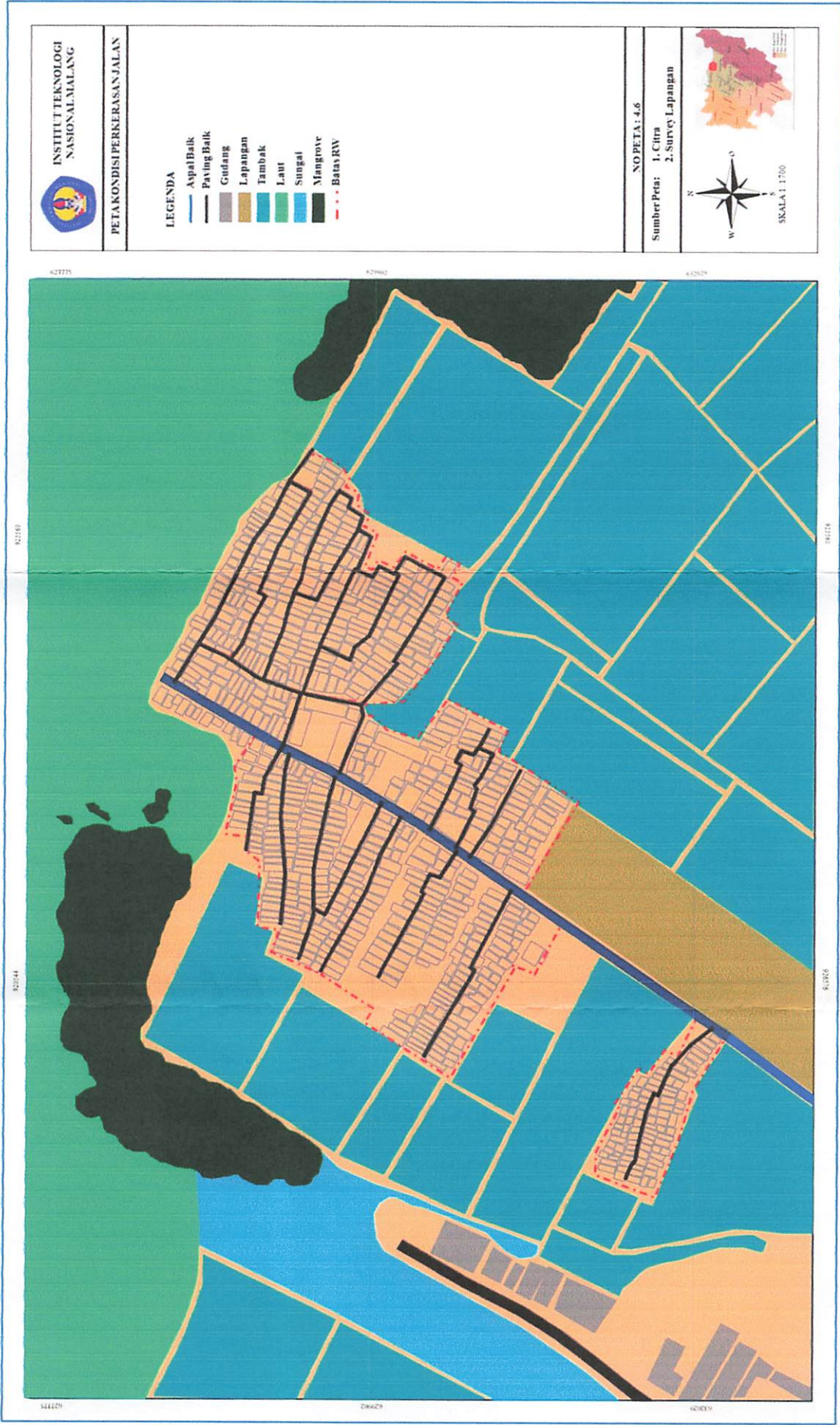
Berdasarkan hasil survey, mayoritas lokasi permukiman terlayani jaringan jalan yang memadai dengan kondisi dalam keadaan baik. Terdapat jalan utama yang memiliki lebar 5 meter dengan kondisi perkerasan jalan berupa aspal baik. Lebar dan jenis perkerasan jalan di lokasi studi dari RW I hingga RW V tidak jauh berbeda. Lebar jalan rata-rata antara 1 meter hingga 2,5 meter. Sedangkan perkerasan jalan menggunakan paving dengan kondisi baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 4.6.



Gambar 4.5
Kondisi Jalan







4.2.7 Air Bersih

Berdasarkan hasil survey terhadap 91 responden yang ada di lokasi penelitian ini, dapat dilihat bahwa sebanyak 25 KK atau 0,27% yang telah terlayani oleh PDAM dengan kondisi air yang bersih dan keluar dengan lancar di setiap hari.



Gambar 4.6
PDAM

Hasil penelitian terhadap 91 responden di Kelurahan Panggungrejo menunjukkan sebagian besar responden tidak terlayani oleh PDAM, hal ini dilihat dari jumlah responden yang tidak terlayani oleh PDAM sejumlah 66 KK atau 0,73% . Penduduk yang tidak terlayani oleh PDAM memperoleh sumber air minum dengan cara membeli air di penduduk yang sudah terlayani oleh PDAM. Air dibeli dengan harga Rp.500/jerigen 30 liter. Sedangkan untuk kebutuhan mandi dan cuci berasal dari sumur dan pantai. Berhubung lokasi berekatan dengan pantai, air sumur tidak bisa digunakan untuk keperluan minum karena cenderung terasa asin.



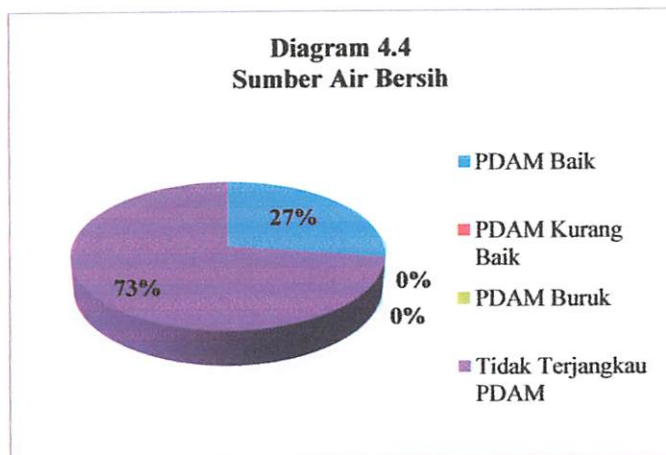
Gambar 4.7
Warga yang Membeli Air

Lebih jelasnya terkait sumber air bersih di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 4.7
Sumber Air Bersih

RW	PDAM Baik	PDAM Kurang Baik	PDAM Buruk	Tidak Terjangkau PDAM
I	3	0	0	8
II	9	0	0	17
III	5	0	0	11
IV	6	0	0	17
V	2	0	0	13
Jumlah	25	0	0	66
Prosentase	27%	0%	0%	73%

Sumber: Hasil Survey, 2015



Sumber: Hasil Survey, 2015

4.2.8 Sanitasi

Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan memiliki empat MCK umum yang tersebar di 4 RW kecuali RW 1. Kondisi MCK umum tergolong baik dan bersih. Biaya sekali masuk adalah Rp.1000. MCK umum ini mulai dibuka tiap pukul 05.00 hingga pukul 18.00. Dua MCK umum yang terletak di RW III dan RW V menggunakan air dari PDAM, jika air PDAM mengalami gangguan maka MCK akan ditutup hingga airnya keluar. Saat ini MCK di RW III tidak bisa difungsikan terkait dengan belum selesainya pembangunan. Sedangkan dua MCK umum lainnya terletak di RW II dan RW IV, menggunakan air dari sumur yang keluar dengan lancar namun terasa cenderung asin. MCK di RW II tidak dapat difungsikan dengan baik, hal ini terkait dengan septic tank yang sudah penuh, yang jika difungsikan aromanya dapat sangat mengganggu warga sekitar.



Gambar 4.8
MCK Bersama

Hasil survey terhadap 91 responden yang ada di lokasi penelitian menunjukkan bahwa 23 jiwa atau 25% yang memiliki MCK pribadi terhubung septic tank, 17 jiwa atau 19% menggunakan MCK bersama terhubung septic tank, sedangkan 51 jiwa atau 56% tidak memiliki MCK permanen dirumahnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di lokasi penelitian belum memiliki MCK permanen. Hal tersebut berkaitan dengan lahan rumah yang dinilai sudah tidak cukup untuk membuat MCK berseptic tank. Selain itu masih kurangnya kesadaran warga akan pentingnya MCK, yang terlihat dari warga yang masih suka membuang hajat di tanah kosong, tambak atau pantai.



Gambar 4.9
MCK Pribadi

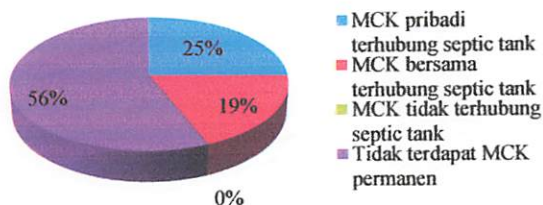
Lebih jelasnya terkait prosentase jenis sanitasi di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 4.8
Jenis Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga

RW	MCK pribadi terhubung septic tank	MCK bersama terhubung septic tank	MCK tidak terhubung septic tank	Tidak terdapat MCK permanen
I	1	1	0	9
II	12	3	0	11
III	5	1	0	10
IV	3	10	0	10
V	2	2	0	11
Jumlah	23	17	0	51
Prosentase	25%	19%	0%	56%

Sumber: Hasil Survey dan Rekapitan, 2015

Diagram 4.5
Jenis Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga



Sumber: Hasil Survey dan Rekap, 2015

4.2.9 Jaringan Sampah

Kelurahan Panggungrejo memiliki 1 buah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang terletak di tanah lapang di RW I. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap 91 responden yang ada di Kelurahan Panggungrejo, sebanyak 43 KK atau 47% merupakan KK dengan sistem pembuangan sampah diangkut petugas lebih dari 2 kali seminggu. Sampah diangkut tiap pagi oleh petugas sampah. Setiap hari jumat tidak ada pengangkutan sampah karena dijadikan hari libur. Per bulannya warga membayar Rp.2000 untuk pengangkutan sampah tersebut.



Gambar 4.10
Sampah yang Diangkut

Berdasarkan hasil survey, terdapat 48 KK atau 53% sistem pembuangan sampahnya adalah dibuang ke laut atau tanah kosong. Hal ini disebabkan petugas sampah belum bisa menjangkau seluruh wilayah permukiman, terkait dengan gang yang sempit sehingga tidak bisa dilewati oleh gerobak sampah. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini terlihat dari sampah yang banyak berserakan di tambak, pantai dan tanah kosong.



Gambar 4.11
Sampah di Tambak

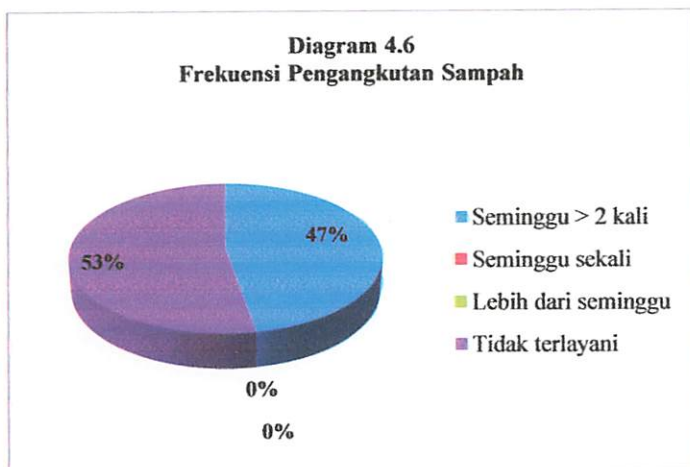
Lebih jelasnya terkait prosentase frekuensi pengangkutan sampah dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 4.9
Frekuensi Pengangkutan Sampah

RW	Seminggu > 2 kali	Seminggu sekali	Lebih dari seminggu	Tidak terlayani
I	6	0	0	5
II	12	0	0	14
III	7	0	0	9
IV	14	0	0	9
V	4	0	0	11
Jumlah	43	0	0	48
Prosentase	47%	0%	0%	53%

Sumber : Hasil Survey dan Rekapian 2015

Diagram 4.6
Frekuensi Pengangkutan Sampah



Sumber : Hasil Survey dan Rekapian 2015

4.2.10 Fasilitas pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu sarana penting dalam suatu kawasan permukiman. Kawasan permukiman akan menjadi lebih baik jika fasilitas atau tempat pendidikannya lengkap mulai dari play group atau kelompok bermain, taman kanak-kanak (TK), sekolah Dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat akhir (SLTA) hingga perguruan tinggi sesuai dengan jumlah penduduk yang ada.

Berdasarkan hasil survey, Kelurahan Panggungrejo memiliki fasilitas pendidikan berupa sekolah untuk tingkat taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD). Sedangkan untuk tingkat SLTP, SLTA dan perguruan tinggi masyarakat harus menyekolahkan anak-anaknya diluar Kelurahan Panggungrejo. Lebih jelasnya tentang jumlah fasilitas pendidikan yang ada di lokasi studi dapat dilihat pada tabe 4.10 dan peta 4.7 berikut.

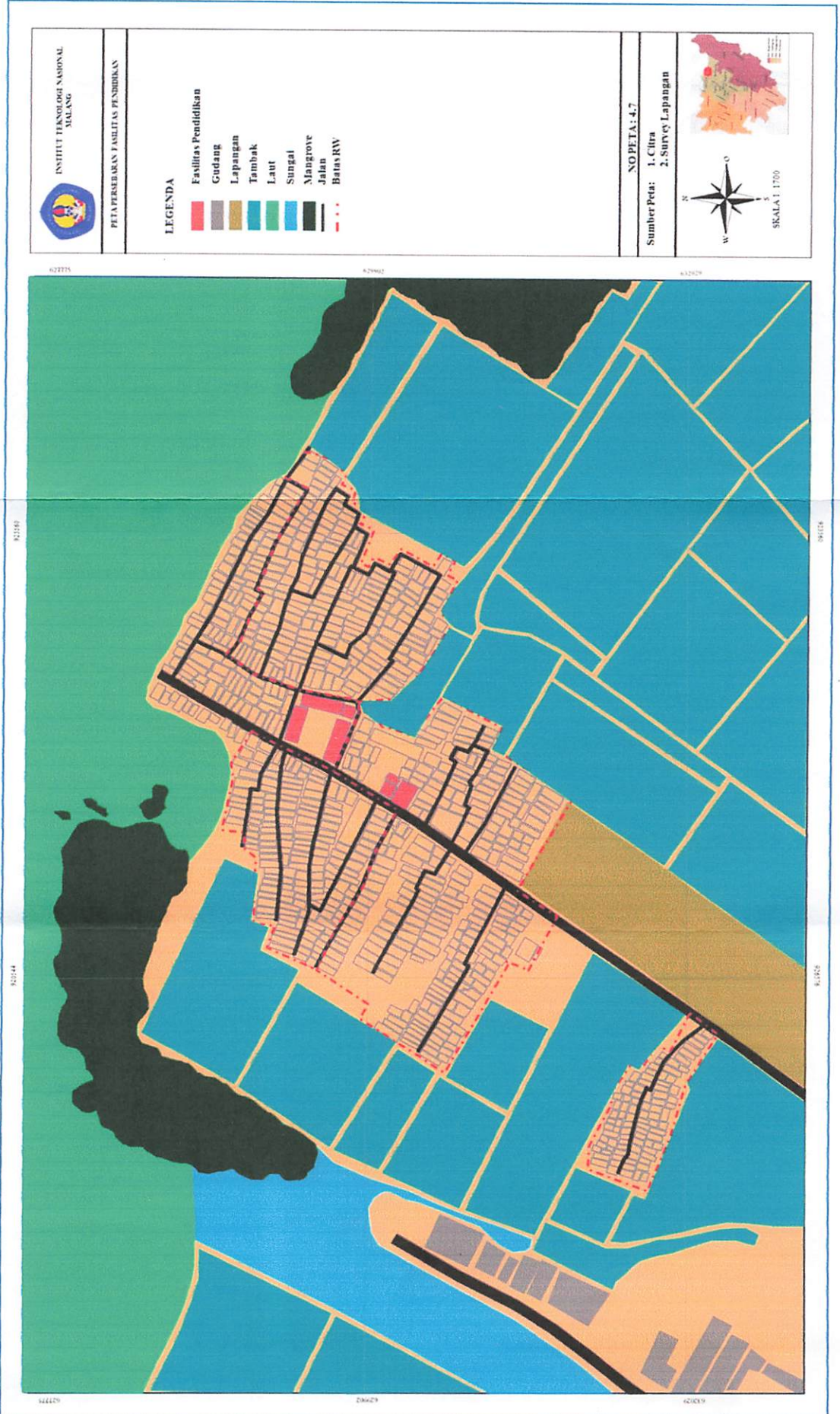
Tabel 4.10
Jumlah Fasilitas Pendidikan

RW	Jumlah (Unit)				Perguruan Tinggi
	TK	SD	SLTP	SLTA	
I	-		-	-	-
II	-		-	-	-
III	1	2	-	-	-
IV	-		-	-	-
V	-		-	-	-

Sumber: Hasil Survey, 2015



Gambar 4.12
Fasilitas Pendidikan



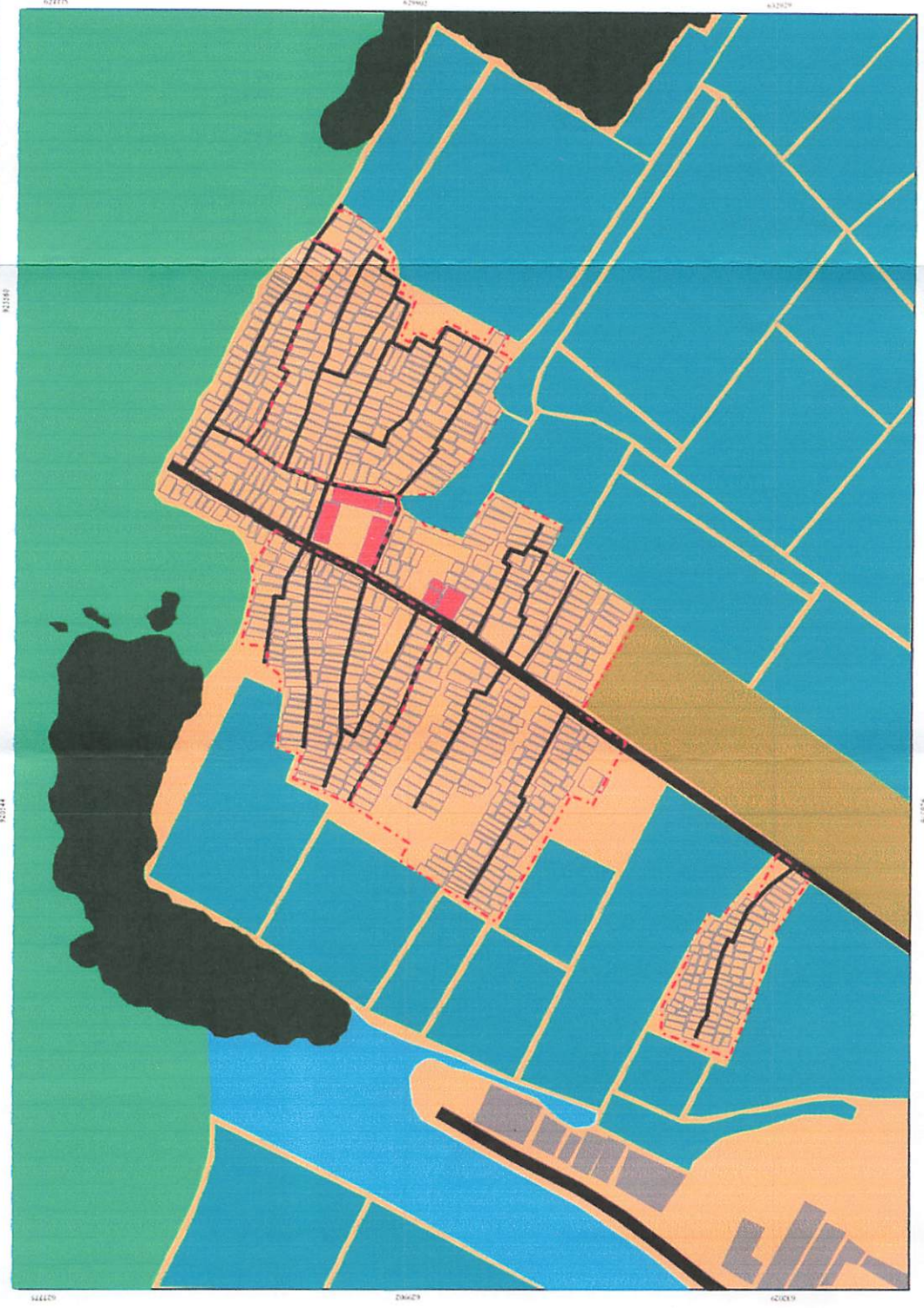
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG

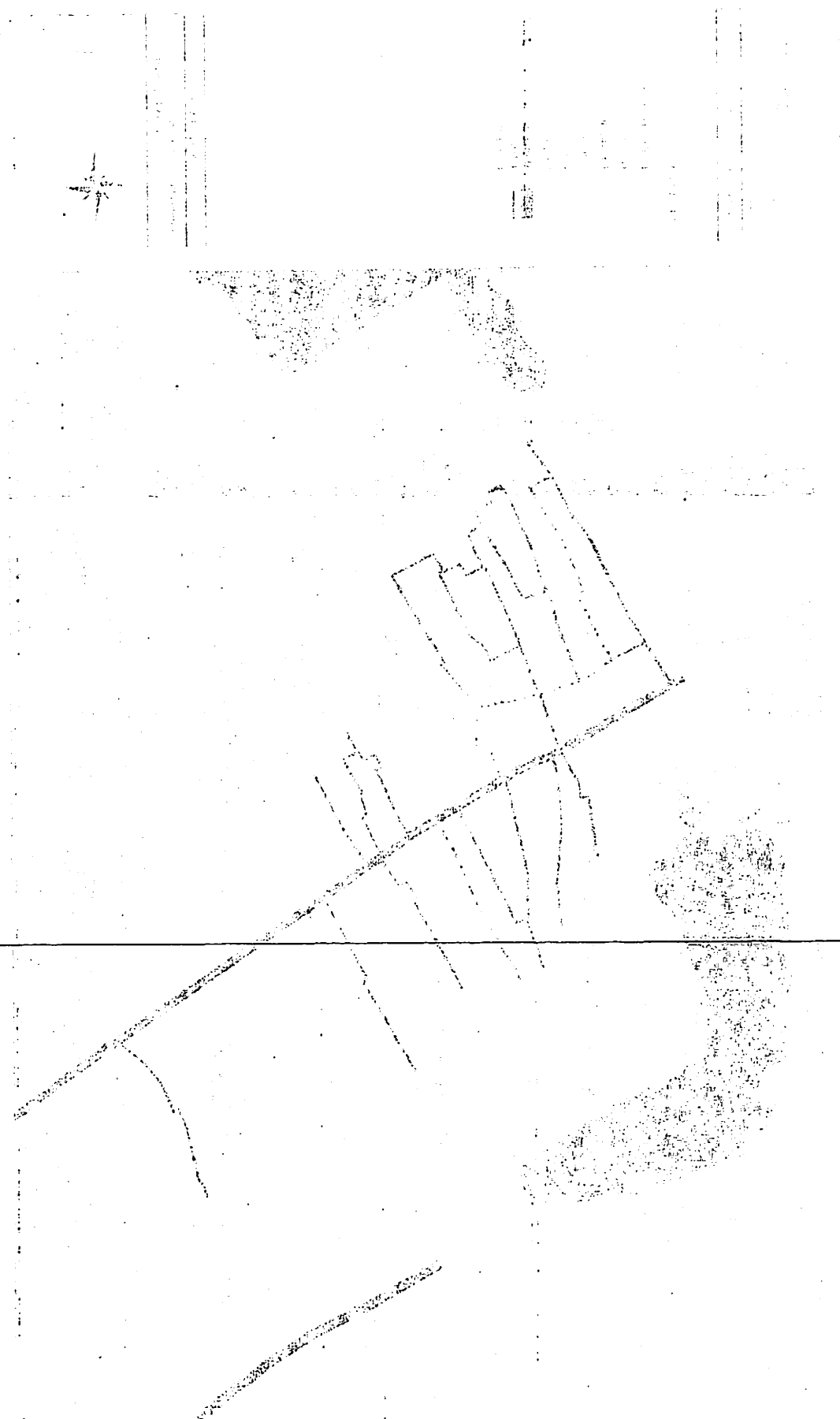
PETAPISERAHAN FASILITAS PENDIDIKAN

- LEGENDA**
- Fasilitas Pendidikan
 - Gudang
 - Lapangan
 - Tambak
 - Laut
 - Sungai
 - Mangrove
 - Jalan
 - Batas RW

NO PETA: 4.7

Sumber Peta: 1. Citra
2. Survey Lapangan





4.2.11 Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.

Berdasarkan hasil survey di Kelurahan Panggungrejo, terdapat 1 unit puskesmas pembantu yang terletak di RW II. Terdapat 5 posyandu yang tersebar di setiap RW di Kelurahan Panggungrejo.



Gambar 4.13
Fasilitas Kesehatan

4.2.12 Fasilitas Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun baru dapat dipastikan setelah lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu. Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya.

Mushola atau langgar merupakan fasilitas yang banyak ditemui di lokasi studi. Sedangkan gereja, vihara dan pura tidak terdapat di kawasan permukiman ini. Terdapat 1 unit masjid di RW III, dan 10 Mushola yang tersebar di 5 RW yang ada. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut



Gambar 4.14
Fasilitas Peribadatan

Tabel 4.11
Jumlah Fasilitas Peribadatan

RW	Jumlah (Unit)				
	Mushola	Masjid	Gereja	Vihara	Pura
I	1	-	-	-	-
II	2	-	-	-	-
III	2	1	-	-	-
IV	3	-	-	-	-
V	2	-	-	-	-

Sumber: Hasil Survey, 2015

4.2.13 Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya manfaat yang akan diperoleh seperti dapat dijadikan sebagai sarana bermain bagi anak-anak, sarana bertemu dengan tetangga, sarana olahraga, sebagai peneduh, dapat mengurangi kesesakan di lingkungan permukiman dan lain sebagainya. Lokasi studi memiliki 1 lapangan yang difungsikan sebagai tempat bermain sepakbola oleh masyarakat. Kepadatan bangunan mengakibatkan minimnya RTH, dimana tidak ada lahan untuk ditanami dan sebagian penduduk memanfaatkan pot sebagai media tanam.



Gambar 4.15
Ruang Terbuka

4.2.14 Legalitas Tanah

Berdasarkan data sekunder dari Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan, diketahui bahwa terdapat 18 rumah yang belum memiliki sertifikat tanah. Terdapat 123 rumah V yang tidak memiliki sertifikat hak milik karena didirikan diatas tanah milik pemerintah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Status Kepemilikan Lahan

RW	Hak Milik Bersertifikat	Hak Milik Belum Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
I	115	4	0
II	271	0	0
III	139	6	37
IV	236	3	2
V	55	5	84
Total	816	18	123

Sumber : Hasil Survey, 2015

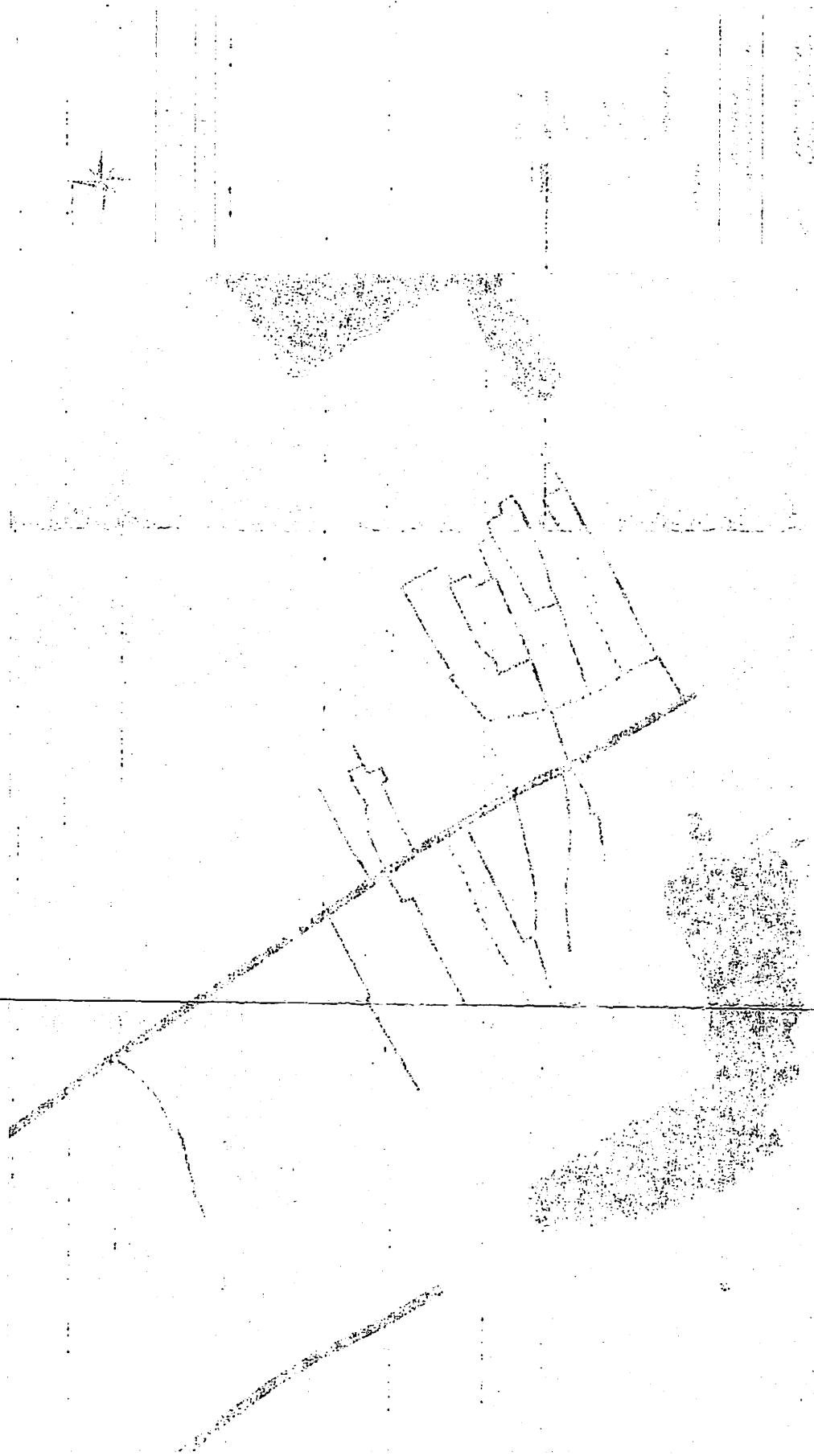
4.2.15 Frekuensi Banjir

Berdasarkan hasil survey, Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan tidak pernah terjadi bencana banjir.

4.2.16 Frekuensi Kebakaran

Berdasarkan hasil survey, Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan tidak pernah terjadi kebakaran.







4.3 Sosial Kependudukan

Kondisi sosial kependudukan di Kelurahan Panggungrejo ditinjau dari kepadatan penduduk, kepadatan hunian, legalitas tanah, tingkat pendidikan, penyakit, dan tingkat kriminalitas.

4.3.1 Jumlah Penduduk

Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan adalah 3558 jiwa yang tersebar dalam 5 RW yang ada. Jumlah Penduduk paling banyak terdapat di RW II dengan total 1064 jiwa dan paling sedikit di RW I dengan jumlah 321 jiwa. Untuk lebih jelasnya terkait jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 4.13
Jumlah Penduduk

RW	Jumlah Penduduk (Jiwa)
I	321
II	1064
III	678
IV	946
V	549
Total	3558

Sumber : Monografi Kelurahan Tahun 2015

4.3.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dilihat dari jumlah penduduk Kelurahan Panggungrejo dibandingkan dengan luas wilayah yang ada. Berdasarkan data yang ada, kepadatan penduduk tertinggi berada di RW 5 dengan jumlah 433 jiwa/ha. RW II memiliki kepadatan penduduk terendah dengan jumlah 350 jiwa/ha. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14
Kepadatan Penduduk

RW	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah Terbangun	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
I	321	0,8	422
II	1064	3	350
III	678	1,2	565
IV	946	1,8	528
V	549	1,3	433
Total	3558	8,1	441

Sumber : Monografi Kelurahan Tahun 2015

4.3.3 Tingkat Pendidikan

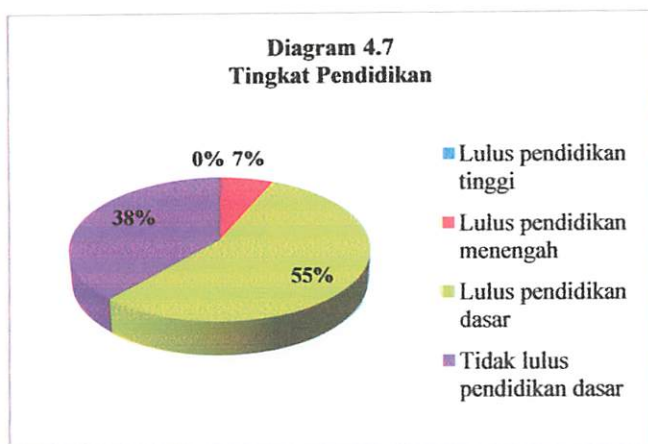
Penduduk Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan pada umumnya masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini terlihat dari data hasil survey terhadap 91 responden di tempat penelitian. Terdapat 50 jiwa atau 55% penduduk yang tamat pendidikan sekolah dasar, 35 jiwa atau 38% penduduk tidak lulus pendidikan dasar, 6 orang atau 7% lulus pendidikan menengah. Dari responden yang ada, tidak terdapat penduduk yang lulus dari pendidikan tinggi. Lebih jelasnya terkait prosentase tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 4.15
Tingkat Pendidikan

RW	Lulus pendidikan tinggi	Lulus pendidikan menengah	Lulus pendidikan dasar	Tidak lulus pendidikan dasar
I	0	1	4	6
II	0	1	12	13
III	0	2	11	3

RW	Lulus pendidikan tinggi	Lulus pendidikan menengah	Lulus pendidikan dasar	Tidak lulus pendidikan dasar
IV	0	1	9	13
V	0	1	14	0
Jumlah	0	6	50	35
Prosentase	0%	7%	55%	38%

Sumber: Hasil Survey dan Olahan, 2015



Sumber: Hasil Survey dan Olahan, 2015

4.3.4 Penyakit

Penyakit yang sering menyerang penduduk Kelurahan Panggungrejo adalah diare dan scabies. Hal ini dikarenakan perilaku penduduk yang tidak terlalu menjaga kebersihan. Contohnya membuang sampah di sembarang tempat, buang air di sembarang tempat dan mandi di pantai dan tambak. Penyakit diare semakin meningkat disaat musim hujan. Kedua jenis penyakit ini menyebar di seluruh RW yang ada di kelurahan Panggungrejo.

4.3.5 Tingkat Kriminalitas

Tingkat keamanan di Kelurahan Panggungrejo sangat tinggi. Tidak pernah terjadi tindak kejahatan di wilayah penelitian ini. Hal ini bisa terlihat dari sikap masyarakat setempat yang sering memarkir kendaraan di depan atau samping rumah tanpa harus khawatir akan dicuri.

4.4 Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi di Kelurahan Panggungrejo ditinjau dari tingkat pendapatan dan tingkat kemiskinan penduduk. Tinjauan terhadap aspek sosial ekonomi diharapkan mampu menjelaskan kondisi ekonomi di Kelurahan Panggungrejo. Data mengenai kondisi sosial ekonomi diperoleh dari survey sekunder dan kuisioner terhadap masing-masing responden.

4.4.1 Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan masyarakat memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Pada dasarnya tingkat pendapatan di Kelurahan Panggungrejo memiliki tingkatan yang hampir sama. Lokasi Kelurahan Panggungrejo yang berada di pinggir selat Madura, maka kegiatan utama masyarakatnya adalah nelayan, yang mengakibatkan pendapatan bergantung pada musim dan cuaca yang ada. Standar upah minimum regional (UMR) kota Pasuruan sebesar Rp.1.600.000. Berikut tingkat pendapatan masyarakat Kelurahan Panggungrejo berdasarkan survey primer dengan memanfaatkan kuisioner sebagai berikut:

Tabel 4.16
Tingkat Pendapatan

RW	>Rp.1.600.000	Rp.1.210.000 - Rp. 1.600.000	Rp. 800.000 - Rp. 1.200.000	<Rp.800.000
I	2	3	5	1
II	7	8	10	1
III	3	6	5	2
IV	10	8	3	2
V	4	9	2	0
Jumlah	26	34	25	6
Prosentase	29%	37%	27%	7%

Sumber: Hasil Survey dan Olahan, 2015

4.4.2 Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data sekunder di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan, terdapat 179 KK yang termasuk dalam daftar KK tidak mampu atau miskin yang tersebar di 5 RW yang ada. RW dengan jumlah KK miskin terbanyak adalah RW IV sejumlah 45 KK atau 25% , sedangkan RW I memiliki jumlah KK miskin paling sedikit dengan jumlah 21 KK atau 12%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17
Jumlah KK Miskin

RW	Jumlah KK Miskin	Prosentase
I	21	12%
II	30	17
III	27	15%
IV	56	31%
V	45	25%

Sumber: Hasil Survey, 2015

BAB V ANALISA

Bab V menjelaskan analisa-analisa yang bertujuan untuk menjawab sasaran dari penelitian yang dilakukan. Bab ini memaparkan hasil analisa terkait karakteristik fisik, lingkungan, sosial kependudukan dan sosial ekonomi, tingkat kemukiman dan analisa penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan.

5.1 Analisis Karakteristik Permukiman Kumuh

Karakteristik permukiman kumuh di lokasi penelitian dinilai berdasarkan kondisi fisik bangunan, sarana dan prasarana, legalitas tanah, lokasi, sosial kependudukan dan sosial ekonomi. Analisis ini menggunakan metode pembobotan yang dimodifikasi dari Pedoman Pedoman Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan tahun 2006, Oleh Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Pemberian bobot berdasarkan kondisi yang ada di lokasi penelitian. Adapun tingkatan nilai bobotnya adalah sebagai berikut:

- Tinggi = 40
- Sedang = 30
- Rendah = 20
- Sangat Rendah = 10

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Penilaian Variabel

Variabel	Nilai			
	40	30	20	10
Keteraturan Bangunan	93-100% teratur	92-85% teratur	77-84% teratur	69-76% teratur
Kepadatan Bangunan	85-102 Unit/Ha	103-120 Unit/Ha	121-138 Unit/Ha	139-156 Unit/Ha
Kualitas Bangunan	Mayoritas Permanen Baik	Mayoritas Non Permanen Baik	Mayoritas Permanen Buruk	Mayoritas Non Permanen Buruk
Kelancaran Drainase	Genangan 0 Kali/ Tahun	Genangan 1-2 Kali/Tahun	Genangan 3-4 Kali/ tahun	Genangan 1-2 Kali/ Tahun
Pelayanan Air Bersih	Mayoritas PDAM Baik	Mayoritas PDAM Kurang Baik	Mayoritas PDAM Buruk	Mayoritas Tidak Terjangkau PDAM

Variabel	Nilai			
	40	30	20	10
Jenis Sanitasi	Mayoritas MCK pribadi terhubung septic tank	Mayoritas MCK bersama terhubung septic tank	Mayoritas MCK tidak terhubung septic tank	Mayoritas Tidak terdapat MCK permanen
Pelayanan Pengangkutan Sampah	Mayoritas Seminggu Lebih dari 2 kali	Mayoritas Seminggu sekali	Mayoritas Lebih dari seminggu	Mayoritas Tidak terlayani
Perkerasan Jalan	10% Kondisi Buruk	11-30% Kondisi Buruk	31-50% Kondisi Buruk	>50% Kondisi Buruk
Fasilitas Pendidikan	Memadai Dengan Kondisi Baik	Kurang Memadai Dengan Kondisi Baik	Memadai Dengan Kondisi Buruk	Kurang memadai dengan kondisi buruk
Fasilitas Kesehatan	Memadai Dengan Kondisi Baik	Kurang Memadai Dengan Kondisi Baik	Memadai Dengan Kondisi Buruk	Kurang memadai dengan kondisi buruk
Fasilitas Sosial Budaya	Memadai Dengan Kondisi Baik	Kurang Memadai Dengan Kondisi Baik	Memadai Dengan Kondisi Buruk	Kurang memadai dengan kondisi buruk
RTH				
Status Kepemilikan Tanah	85-100 % Sertifikat Hak Milik	69-84% Sertifikat Hak Milik	53-68% Sertifikat Hak Milik	37-52% Sertifikat Hak Milik
Frekuensi Banjir	0 kali/ Tahun	1-2 kali/ Tahun	3-4 kali/ Tahun	5-7 kali/ Tahun
Frekuensi Kebakaran	0 kali/ Tahun	1-2 kali/ Tahun	3-4 kali/ Tahun	Terjadi 5-7 kali/ Tahun
Kepadatan Penduduk	346-400 Jiwa/Ha	401-455 Jiwa/Ha	456-510 Jiwa/Ha	511-565 Jiwa/Ha
Kepadatan Hunian	>7,2 m2/jiwa	5 – 7,2 m2/jiwa	3 – 4 m2/jiwa	<3 m2/jiwa
Tingkat Pendidikan	Mayoritas Lulus pendidikan tinggi	Mayoritas Lulus pendidikan menengah	Mayoritas Lulus pendidikan dasar	Mayoritas Tidak lulus pendidikan dasar
Angka Kesakitan	<10%	11-30%	31-50%	>50%
Frekuensi Kriminalitas	0 kali/ Tahun	1-2 kali/ Tahun	3-4 kali/ Tahun	Terjadi 5-7 kali/ Tahun
Pendapatan	>Rp.1.600.000	Rp. 1.210.000 –	Rp. 800.000 – Rp.	<Rp.800.000

Variabel	Nilai			
	40	30	20	10
		Rp. 1.600.000	1.200.000	
Kemiskinan	8-11%	12-15%	16-19%	20-23%

Sumber: Hasil Rekap dan Perhitungan, 2015

5.1.1 Hasil Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh

Pembobotan karakteristik permukiman kumuh terbagi atas 5 RW yang ada di lokasi penelitian, berdasarkan kondisi fisik bangunan, sarana dan prasarana, legalitas tanah, lokasi, sosial ekonomi dan sosial kependudukan.

5.1.1.1 Hasil Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW I

Berdasarkan penilaian terhadap kondisi permukiman di RW I diketahui bahwa bangunan di RW I tergolong teratur dengan sebagian besar bangunan tergolong permanen buruk. Kepadatan bangunan tergolong tinggi dengan tingkat kepadatan 149 Unit/Ha. Sebagian besar penduduk menggunakan sumur dan membeli air dari tukang jerigen keliling untuk kebutuhan sehari-hari. Mayoritas penduduk tidak memiliki MCK pribadi dan pelayanan pengangkutan sampah lebih dari dua kali dalam seminggu. Sebagian besar penduduk tidak lulus pendidikan dasar dengan pendapatan Rp.800-000 – 1.200.000 per bulan. Lebih jelasnya terkait karakteristik permukiman kumuh di RW I dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW I

Variabel	Hasil Penilaian	Bobot
Keteraturan Bangunan	93% Teratur	40
Kepadatan Bangunan	149 Unit/Ha	10
Kualitas Bangunan	55% Permanen Buruk	20
Kelancaran Drainase	Genangan 0 Kali/ Tahun	40
Pelayanan Air Bersih	73% Tidak Terjangkau PDAM	10
Jenis Sanitasi	82% Tidak Terdapat MCK Pribadi	10
Pelayanan Pengangkutan Sampah	55% Seminggu Lebih dari 2 kali	40
Perkerasan Jalan	100% Paving Baik	40
Fasilitas Pendidikan	Memadai	40
Fasilitas Kesehatan	Memadai	40
Fasilitas Sosial Budaya	Memadai	40

Variabel	Hasil Penilaian	Bobot
RTH	Tidak Memadai	10
Status Kepemilikan Tanah	97% Sertifikat Hak Milik	40
Frekuensi Banjir	0 kali/ Tahun	40
Frekuensi Kebakaran	0 kali/ Tahun	40
Kepadatan Penduduk	422 Jiwa/Ha	30
Kepadatan Hunian	64% >7,2 m ² /jiwa	40
Tingkat Pendidikan	55% Tidak Lulus Pendidikan Dasar	10
Angka Kesakitan	31-50%	20
Frekuensi Kriminalitas	0 kali/ Tahun	40
Pendapatan	45% Rp. 800.000 – Rp. 1.200.000	20
Kemiskinan	21%	10

Sumber: Hasil Rekap dan Perhitungan, 2015

5.1.1.2 Hasil Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW II

Berdasarkan penilaian terhadap kondisi permukiman di RW II diketahui bahwa bangunan di RW II tergolong teratur dengan sebagian besar bangunan tergolong permanen baik. Kepadatan bangunan tergolong rendah dengan tingkat kepadatan 90 Unit/Ha. Sebagian besar penduduk menggunakan sumur dan membeli air dari tetangga yang terjangkau oleh PDAM. Mayoritas penduduk memiliki MCK pribadi dan pelayanan pangankutas sampah lebih dari dua kali dalam seminggu. Sebagian besar penduduk tidak lulus pendidikan dasar dengan pendapatan Rp.800-000 – 1.200.000 per bulan. Lebih jelasnya terkait karakteristik permukiman kumuh di RW I dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3
Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW II

Variabel	Hasil Penilaian	Bobot
Keteraturan Bangunan	99% Teratur	40
Kepadatan Bangunan	90 Unit/Ha	40
Kualitas Bangunan	58% Permanen Baik	40
Kelancaran Drainase	Genangan 0 Kali/ Tahun	40
Pelayanan Air Bersih	65% Tidak Terjangkau PDAM	10
Jenis Sanitasi	46% MCK Pribadi Berseptic tank	40

Variabel	Hasil Penilaian	Bobot
Pelayanan Pengangkutan Sampah	54% Tidak Terlayani Pengangkutan	10
Perkerasan Jalan	100% Paving Baik	40
Fasilitas Pendidikan	Memadai	40
Fasilitas Kesehatan	Memadai	40
Fasilitas Sosial Budaya	Memadai	40
RTH	Tidak Memadai	10
Status Kepemilikan Tanah	100% Sertifikat Hak Milik	40
Frekuensi Banjir	0 kali/ Tahun	40
Frekuensi Kebakaran	0 kali/ Tahun	40
Kepadatan Penduduk	350 Jiwa/Ha	40
Kepadatan Hunian	88% >7,2 m ² /jiwa	40
Tingkat Pendidikan	55% Tidak Lulus Pendidikan Dasar	10
Angka Kesakitan	11-30%	30
Frekuensi Kriminalitas	0 kali/ Tahun	40
Pendapatan	38% Rp. 800.000 – Rp. 1.200.000	20
Kemiskinan	10%	40

Sumber: Hasil Rekapitan dan Perhitungan, 2015

5.1.1.3 Hasil Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW III

Berdasarkan penilaian terhadap kondisi permukiman di RW III diketahui bahwa bangunan di RW III tergolong teratur dengan sebagian besar bangunan tergolong permanen baik. Kepadatan bangunan tergolong tinggi dengan tingkat kepadatan 149 Unit/Ha. Sebagian besar penduduk menggunakan sumur dan membeli air dari tukang jerigen keliling untuk kebutuhan sehari-hari. Mayoritas penduduk tidak memiliki MCK pribadi. Sebagian besar penduduk lulus pendidikan dasar dengan pendapatan Rp.1.200.000 – 1.600.000 per bulan. Lebih jelasnya terkait karakteristik permukiman kumuh di RW I dapat dilihat pada tabel 5.4

Tabel 5.4
Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW III

Variabel	Hasil Penilaian	Bobot
Keteraturan Bangunan	95% Teratur	40
Kepadatan Bangunan	149/Ha	10
Kualitas Bangunan	56% Permanen Baik	40

Variabel	Hasil Penilaian	Bobot
Kelancaran Drainase	Genangan 0 Kali/ Tahun	40
Pelayanan Air Bersih	69% Tidak Terjangkau PDAM	10
Jenis Sanitasi	63% Tidak Terdapat MCK Pribadi	10
Pelayanan Pengangkutan Sampah	56% Tidak Terlayani Pengangkutan	10
Perkerasan Jalan	100% Paving Baik	40
Fasilitas Pendidikan	Memadai	40
Fasilitas Kesehatan	Memadai	40
Fasilitas Sosial Budaya	Memadai	40
RTH	Tidak Memadai	10
Status Kepemilikan Tanah	76% Sertifikat Hak Milik	30
Frekuensi Banjir	0 kali/ Tahun	40
Frekuensi Kebakaran	0 kali/ Tahun	40
Kepadatan Penduduk	565 Jiwa/Ha	10
Kepadatan Hunian	63% >7,2 m ² /jiwa	40
Tingkat Pendidikan	69% Lulus Pendidikan Dasar	20
Angka Kesakitan	>50%	10
Frekuensi Kriminalitas	0 kali/ Tahun	40
Pendapatan	38% Rp. 1.200.000- Rp.1.600.00	30
Kemiskinan	23%	10

Sumber: Hasil Rekapitan dan Perhitungan, 2015

5.1.1.4 Hasil Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW IV

Berdasarkan penilaian terhadap kondisi permukiman di RW IV diketahui bahwa bangunan di sebagian besar bangunan tergolong permanen baik dengan tingkat kepadatan 134 Unit/Ha. Sebagian besar penduduk menggunakan sumur dan membeli air dari tukang jerigen keliling untuk kebutuhan sehari-hari. Mayoritas penduduk menggunakan MCK bersama. Pelayanan pengangkutan sampah lebih dari dua kali dalam seminggu. Sebagian besar penduduk tidak lulus pendidikan dasar dengan pendapatan lebih dari Rp.1.600.000 per bulan. Lebih jelasnya terkait karakteristik permukiman kumuh di RW IV dapat dilihat pada tabel 5.5.

Tabel 5.5
Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW IV

Variabel	Hasil Penilaian	Bobot
Keteraturan Bangunan	90% Teratur	30
Kepadatan Bangunan	134 Unit/Ha	20
Kualitas Bangunan	57% Permanen Baik	40
Kelancaran Drainase	Genangan 0 Kali/ Tahun	10
Pelayanan Air Bersih	74% Tidak Terjangkau PDAM	30
Jenis Sanitasi	48% MCK Bersama Terhubung Septic Tank	40
Pelayanan Pengangkutan Sampah	61% Seminggu Lebih dari 2 kali	40
Perkerasan Jalan	100% Paving Baik	40
Fasilitas Pendidikan	Memadai	40
Fasilitas Kesehatan	Memadai	40
Fasilitas Sosial Budaya	Memadai	10
RTH	Tidak Memadai	10
Status Kepemilikan Tanah	98% Sertifikat Hak Milik	40
Frekuensi Banjir	0 kali/ Tahun	40
Frekuensi Kebakaran	0 kali/ Tahun	40
Kepadatan Penduduk	528 Jiwa/Ha	10
Kepadatan Hunian	57% >7,2 m ² /jiwa	40
Tingkat Pendidikan	57% Tidak Lulus Pendidikan Dasar	10
Angka Kesakitan	>50%	10
Frekuensi Kriminalitas	0 kali/ Tahun	40
Pendapatan	43% >Rp.1.600.000	40
Kemiskinan	20%	10

Sumber: Hasil Rekap dan Perhitungan, 2015

5.1.1.5 Hasil Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW V

Berdasarkan penilaian terhadap kondisi permukiman di RW V diketahui bahwa bangunan di RW V sebagian besar bangunan tergolong permanen buruk dengan tingkat kepadatan 111 Unit/Ha. Sebagian besar penduduk menggunakan sumur dan membeli air dari tukang jerigen keliling untuk kebutuhan sehari-hari. Mayoritas penduduk tidak memiliki MCK pribadi dan tidak terlayani pengangkutan sampah lebih dari dua kali dalam seminggu. Sebagian besar penduduk tidak lulus pendidikan dasar dengan pendapatan Rp.1.200-000 – 1.600.000 per bulan. Lebih jelasnya terkait karakteristik permukiman kumuh di RW I dapat dilihat pada tabel 5.6.

Tabel 5.6
Pembobotan Karakteristik Permukiman Kumuh RW V

Variabel	Hasil Penilaian	Bobot
Keteraturan Bangunan	72% Teratur	20
Kepadatan Bangunan	111/Ha	30
Kualitas Bangunan	40% Permanen Buruk	20
Kelancaran Drainase	Genangan 0 Kali/ Tahun	40
Pelayanan Air Bersih	87% Tidak Terjangkau PDAM	10
Jenis Sanitasi	73% Tidak Terdapat MCK Pribadi	10
Pelayanan Pengangkutan Sampah	73% Tidak Terlayani	10
Perkerasan Jalan	100% Paving Baik	40
Fasilitas Pendidikan	Memadai	40
Fasilitas Kesehatan	Memadai	40
Fasilitas Sosial Budaya	Memadai	40
RTH	Tidak Memadai	10
Status Kepemilikan Tanah	38% Sertifikat Hak Milik	10
Frekuensi Banjir	0 kali/ Tahun	40
Frekuensi Kebakaran	0 kali/ Tahun	40
Kepadatan Penduduk	433 Jiwa/Ha	30
Kepadatan Hunian	73% >7,2 m ² /jiwa	40
Tingkat Pendidikan	93% Tidak Lulus Pendidikan Dasar	20
Angka Kesakitan		10
Frekuensi Kriminalitas	0 kali/ Tahun	40
Pendapatan	37% Rp. 1.210.000- 1.600.000	30
Kemiskinan	19%	20

Sumber: Hasil Rekap dan Perhitungan, 2015

5.1.2 Analisis Tingkat Kekumuhan di Kelurahan Panggungrejo

Permukiman yang tergolong dalam permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak teratur dan tidak terencana. Hal ini dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi fisik bangunan, sarana dan prasarana, legalitas tanah, lokasi, sosial kependudukan dan sosial ekonomi. Beberapa komponen penilaian tingkat kekumuhan dapat dilihat pada tabel 5.7.

Tabel 5.7
Komponen Penilaian Tingkat Kekumuhan

Aspek	Variabel
Fisik Bangunan	Keteraturan Bangunan
	Kepadatan Bangunan
	Kualitas Bangunan
Sarana dan Prasarana	Kelancaran Drainase
	Pelayanan Air Bersih
	Jenis Sanitasi
	Pelayanan Pengangkutan Sampah
	Perkerasan Jalan
	Fasilitas Pendidikan
	Fasilitas Kesehatan
	Fasilitas Sosial Budaya
	RTH
Lokasi	Legalitas Tanah
	Banjir
	Kebakaran
Sosial Kependudukan	Kepadatan Penduduk
	Kepadatan Hunian
	Tingkat Pendidikan
	Angka Kesakitan
	Tingkat Kriminalitas
Sosial Ekonomi	Pendapatan
	Kemiskinan

Sumber: Hasil Kajian Teori

Dalam hal mengukur kekumuhan di permukiman masing-masing RW menggunakan alat analisis pembobotan yang berpedoman pada pedoman panduan identifikasi kawasan permukiman kumuh penyangga Kota Metropolitan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman di Kelurahan Panggunggunjrejo. Kemudian dalam proses analisis permukiman kumuh akan dibagi per wilayah RW.

5.1.2.1 Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Aspek Fisik Bangunan

Penilaian terhadap tingkat kekumuhan berdasarkan kriteria fisik bangunan di Kelurahan Panggungrejo dibagi per wilayah RW. Analisis pembobotan digunakan sebagai alat ukur penilaian permukiman kumuh per wilayah RW. Semakin rendah total nilai yang didapat, menunjukkan semakin tingginya tingkat kekumuhan di wilayah tersebut. Berdasarkan rumus tersebut diperoleh hasil tingkat kekumuhan sebagai berikut:

- Kategori Kumuh Sangat Rendah berada pada nilai : 98-120
- Kategori Kumuh Rendah : 75-97
- Kategori Kumuh Sedang : 52-74
- Kategori Kumuh Tinggi : 29-51

Wilayah penelitian terdiri atas 5 RW, dari masing-masing variabel penilaian untuk setiap wilayah RW memiliki kondisi yang berbeda. Setiap variabel yang dianalisis berdasarkan hasil survey primer dan sekunder di tempat objek penelitian.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat di kategorikan bahwa aspek fisik bangunan di Kelurahan Panggungrejo terdiri atas kategori kumuh sedang, kumuh rendah dan kumuh sangat rendah. Kawasan permukiman yang termasuk dalam kategori kumuh sedang dinilai berdasarkan aspek fisik bangunan adalah RW I dan RW V. Termasuk didalam kategori kumuh rendah adalah RW III dan RW IV. RW II termasuk dalam kategori kumuh sangat rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.8.

Tabel 5.8
Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Aspek Fisik Bangunan

Variabel	RW I		RW II		RW III		RW IV		RW V	
	NB	K	NB	K	NB	K	NB	K	NB	K
Keteraturan Bangunan	40	T	40	T	40	T	30	S	20	R
Kepadatan Bangunan	10	SR	40	T	10	SR	20	T	30	S
Kualitas Bangunan	20	R	40	T	40	T	40	T	20	R
Total	70	KS	120	KSR	90	KR	90	KR	70	KS

Sumber: Hasil Analisa, 2015

Ket: B = Nilai Bobot, K = Kategori, T = Tinggi, S=Sedang, R=Rendah, SR=Sangat Rendah, KT=Kumuh Tinggi, KS=Kumuh Sedang, KR=Kumuh Rendah, KSR=Kumuh Sangat Rendah.

5.1.2.2 Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Aspek Sarana dan Prasarana

Penilaian terhadap tingkat kekumuhan berdasarkan kriteria lokasi di Kelurahan Panggungrejo dibagi per wilayah RW. Analisis pembobotan digunakan sebagai alat ukur penilaian permukiman kumuh per wilayah RW. Berdasarkan rumus tersebut diperoleh hasil tingkat kekumuhan sebagai berikut:

- Kategori Kumuh Sangat Rendah berada pada nilai : 293-360
- Kategori Kumuh Rendah : 225-292
- Kategori Kumuh Sedang : 157-224
- Kategori Kumuh Tinggi : 89-156

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat di kategorikan bahwa aspek sarana dan prasarana di Kelurahan Panggungrejo terdiri atas kategori kumuh sedang dan kumuh rendah. Kawasan permukiman yang termasuk dalam kategori kumuh sedang dinilai berdasarkan aspek sarana dan prasarana RW V. Termasuk didalam kategori kumuh rendah adalah RW I, RW II, RW III dan RW IV. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.9.

Tabel 5.9
Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Aspek Sarana dan Prasarana

Variabel	RW I		RW II		RW III		RW IV		RW V	
	NB	K	NB	K	NB	K	NB	K	NB	K
Kelancaran Drainase	40	T	40	T	40	T	40	T	40	T
Pelayanan Air Bersih	10	SR	10	SR	10	SR	10	SR	10	SR
Jenis Sanitasi	10	SR	40	T	10	SR	30	S	10	SR
Pelayanan Pengangkutan Sampah	40	T	10	SR	10	SR	40	T	10	SR
Perkerasan Jalan	40	T	40	T	40	T	40	T	40	T
Fasilitas Pendidikan	40	T	40	T	40	T	40	T	40	T
Fasilitas Kesehatan	40	T	40	T	40	T	40	T	40	T
Fasilitas Sosial Budaya	40	T	40	T	40	T	40	T	40	T

Variabel	RW I		RW II		RW III		RW IV		RW V	
	NB	K	NB	K	NB	K	NB	K	NB	K
RTH	10	SR	10	SR	10	SR	10	SR	10	SR
Total	270	KR	270	KR	240	KR	290	KR	240	KS

Sumber: Hasil Analisa, 2015

Ket: B = Nilai Bobot, K = Kategori, T = Tinggi, S=Sedang, R=Rendah, SR=Sangat Rendah, KT=Kumuh Tinggi, KS=Kumuh Sedang, KR=Kumuh Rendah, KSR=Kumuh

5.1.2.3 Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Aspek Legalitas Tanah

Penilaian terhadap tingkat kekumuhan berdasarkan kriteria legalitas tanah di Kelurahan Panggungrejo dibagi per wilayah RW. Analisis pembobotan digunakan sebagai alat ukur penilaian permukiman kumuh per wilayah RW. Berdasarkan rumus tersebut diperoleh hasil tingkat kekumuhan sebagai berikut:

- Kategori Kumuh Sangat Rendah berada pada nilai : 33-40
- Kategori Kumuh Rendah : 25-32
- Kategori Kumuh Sedang : 17-24
- Kategori Kumuh Tinggi : 9-16

Berdasarkan hasil analisa tingkat kekumuhan di Kelurahan Panggungrejo berdasarkan penilaian aspek legalitas tanah terdiri atas kategori kumuh sangat rendah, kumuh rendah dan kumuh tinggi. Permukiman di RW I, II dan IV termasuk dalam kategori kumuh sangat rendah. RW III tergolong kumuh rendah, sedangkan RW V termasuk dalam kategori kumuh tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.10.

Tabel 5.10
Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Aspek Legalitas Tanah

Variabel	RW I		RW II		RW III		RW IV		RW V	
	NB	K	NB	K	NB	K	NB	K	NB	K
Status Kepemilikan Tanah	40	T	40	T	30	S	40	T	10	SR
Total	40	KSR	40	KSR	30	KR	40	KSR	10	KT

Sumber: Hasil Analisa, 2015

Ket: B = Nilai Bobot, K = Kategori, T = Tinggi, S=Sedang, R=Rendah, SR=Sangat Rendah, KT=Kumuh Tinggi, KS=Kumuh Sedang, KR=Kumuh Rendah, KSR=Kumuh Sangat Rendah.

5.1.2.4 Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Aspek Lokasi

Penilaian terhadap tingkat kekumuhan berdasarkan kriteria lokasi di Kelurahan Panggungrejo dibagi per wilayah RW. Analisis pembobotan digunakan sebagai alat ukur penilaian permukiman kumuh per wilayah RW. Berdasarkan rumus tersebut diperoleh hasil tingkat kekumuhan sebagai berikut:

- Kategori Kumuh Sangat Rendah berada pada nilai : 65-80
- Kategori Kumuh Rendah : 49-64
- Kategori Kumuh Sedang : 33-48
- Kategori Kumuh Tinggi : 17-32

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat kekumuhan di lokasi penelitian berdasarkan penilaian aspek lokasi keseluruhan termasuk didalam kategori kumuh sangat rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.11.

Tabel 5.11
Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Aspek Lokasi

Variabel	RW I		RW II		RW III		RW IV		RW V	
	NB	K	NB	K	NB	K	NB	K	NB	K
Banjir	40	T	40	T	40	T	40	T	40	T
Kebakaran	40	T	40	T	40	T	40	T	40	T
Total	80	KSR	80	KSR	80	KSR	80	KSR	80	0

Sumber: Hasil Analisa, 2015

Ket: B = Nilai Bobot, K = Kategori, T = Tinggi, S=Sedang, R=Rendah, SR=Sangat Rendah, KT=Kumuh Tinggi, KS=Kumuh Sedang, KR=Kumuh Rendah, KSR=Kumuh Sangat Rendah.

5.1.2.5 Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Aspek Sosial Kependudukan

Penilaian terhadap tingkat kekumuhan berdasarkan kriteria sosial kependudukan di Kelurahan Panggungrejo dibagi per wilayah RW. Analisis pembobotan digunakan sebagai alat ukur penilaian permukiman kumuh per wilayah RW. Berdasarkan rumus tersebut diperoleh hasil tingkat kekumuhan sebagai berikut:

- Kategori Kumuh Sangat Rendah berada pada nilai : 162-200
- Kategori Kumuh Rendah : 123-161
- Kategori Kumuh Sedang : 84-122
- Kategori Kumuh Tinggi : 45-83

Tabel 5.12
Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Sosial Kependudukan

Variabel	RW I		RW II		RW III		RW IV		RW V	
	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K
Kepadatan Penduduk	30	S	40	T	10	SR	10	SR	30	S
Kepadatan Hunian	40	T	40	T	40	T	40	T	40	T
Tingkat Pendidikan	10	SR	10	SR	20	R	10	SR	20	R
Angka Kesakitan	20	R	30	S	20	SR	20	SR	20	SR
Tingkat Kriminalitas	40	T	40	T	40	T	40	T	40	T
Total	140	KS	160	KS	120	KS	110	KR	140	KS

Sumber: Hasil Analisa, 2015

Ket: B = Nilai Bobot, K = Kategori, T = Tinggi, S=Sedang, R=Rendah, SR=Sangat Rendah, KT=Kumuh Tinggi, KS=Kumuh Sedang, KR=Kumuh Rendah,

Berdasarkan tabel diatas dapat di kategorikan bahwa aspek sosial kependudukan di Kelurahan Panggungrejo terdiri atas kategori kumuh rendah dan kumuh sedang. Termasuk dalam kategori kumuh rendah adalah RW I, RW II, dan RW V. Sedangkan RW III dan RW IV termasuk didalam kategori kumuh sedang.

5.1.2.6 Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi

Penilaian terhadap tingkat kekumuhan berdasarkan kriteria sosial ekonomi di Kelurahan Panggungrejo dibagi per wilayah RW. Analisis pembobotan digunakan sebagai alat ukur penilaian permukiman kumuh per wilayah RW. Berdasarkan rumus tersebut diperoleh hasil tingkat kekumuhan sebagai berikut:

- Kategori Kumuh Sangat Rendah berada pada nilai : 65-80
- Kategori Kumuh Rendah : 49-64
- Kategori Kumuh Sedang : 33-48
- Kategori Kumuh Tinggi : 17-32

Tabel 5.13
Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Sosial Ekonomi

Variabel	RW I		RW II		RW III		RW IV		RW V	
	B	K	B	K	B	K4	B	K	B	K
Pendapatan	20	SR	20	SR	30	S	40	T	30	S
Kemiskinan	10	R	40	T	10	SR	20	SR	20	R
Total	30	KSR	60	KS	40	KR	60	KS	50	KS

Sumber: Hasil Analisa, 2015

Ket: B = Nilai Bobot, K = Kategori, T = Tinggi, S=Sedang, R=Rendah, SR=Sangat Rendah KS=Kumuh Sedang, KR=Kumuh Rendah, KSR=Kumuh Sangat Rendah.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat di kategorikan bahwa aspek sosial ekonomi di Kelurahan Panggungrejo terdiri atas 3 kategori yaitu kumuh rendah, kumuh sedang dan kumuh tinggi. RW yang termasuk dalam kategori kumuh rendah berdasarkan aspek sosial ekonomi adalah RW II, RW IV dan RW V. Termasuk dalam kumuh sedang adalah RW III, sedangkan RW I termasuk dalam kategori kumuh tinggi.

5.1.2.7 Analisa Tingkat Kekumuhan di Kelurahan Panggungrejo

Pada sub bab sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap setiap kriteria di masing-masing RW. Dari penilaian tersebut dihasilkan tingkat kekumuhan dari kategori kumuh tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo memiliki tingkat kekumuhan yang berbeda-beda. Berdasarkan rumus diperoleh hasil tingkat kekumuhan sebagai berikut:

- Kategori Kumuh Sangat Rendah berada pada nilai : 715-880
- Kategori Kumuh Rendah : 549-714
- Kategori Kumuh Sedang : 383-548
- Kategori Kumuh Tinggi : 217-382

Hasil analisa menunjukkan bahwa di lokasi penelitian terdapat 2 kategori kumuh yaitu kategori kumuh sangat rendah dan kategori kumuh rendah. RW II merupakan RW yang termasuk dalam kategori kumuh sangat rendah. Empat RW lainnya termasuk didalam kategori kumuh rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.14

Tabel 5.14
Tingkat Kekumuhan di Lingkungan Permukiman Kumuh Kelurahan Panggungrejo

RW	Aspek													
	Fisik Bangunan		Sarana dan Prasarana		Legalitas Tanah		Lokasi		Sosial Kependudukan		Sosial Ekonomi		Total	
	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K
I	70	Kumuh Sedang	270	Kumuh Rendah	40	Kumuh Sangat Rendah	80	Kumuh Sangat Rendah	140	Kumuh Rendah	30	Kumuh Tinggi	630	Rendah
II	120	Kumuh Sangat Rendah	270	Kumuh Rendah	40	Kumuh Sangat Rendah	80	Kumuh Sangat Rendah	160	Kumuh Rendah	60	Kumuh Rendah	730	Sangat Rendah
III	90	Kumuh Rendah	240	Kumuh Rendah	30	Kumuh Rendah	80	Kumuh Sangat Rendah	120	Kumuh Sedang	40	Kumuh Sedang	600	Rendah
IV	90	Kumuh Rendah	290	Kumuh Rendah	40	Kumuh Sangat Rendah	80	Kumuh Sangat Rendah	110	Kumuh Sedang	50	Kumuh Rendah	660	Rendah
V	70	Kumuh Sedang	240	Kumuh Sedang	10	Kumuh Tinggi	80	Kumuh Sangat Rendah	140	Kumuh Rendah	50	Kumuh Rendah	590	Rendah

Sumber: Hasil Analisa, 2015

Ket. B = Nilai Bobot, K = Kategori KSR=Kumuh Sangat Rendah, KR=Kumuh Rendah,KS=Kumuh Sedang, KT=Kumuh Tinggi





**PETA TINGKAT KEKUMIHAN
TERHADAP ASPEK SARANA &
PRASARANA**

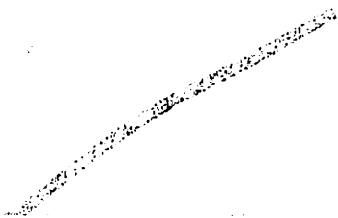
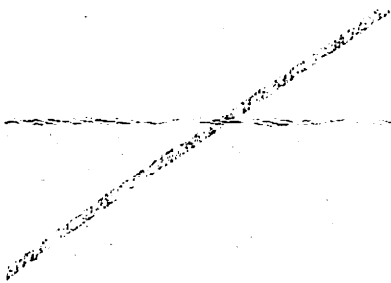
- LEGENDA**
- Kumuh Rendah
 - Kumuh Sedang
 - Gudang
 - Lapangan
 - Tambak
 - Laut
 - Sungai
 - Mangrove
 - Jalan

NO PETA: 5.2
Sumber Peta: 1. Citra
2. Survey Lapangan

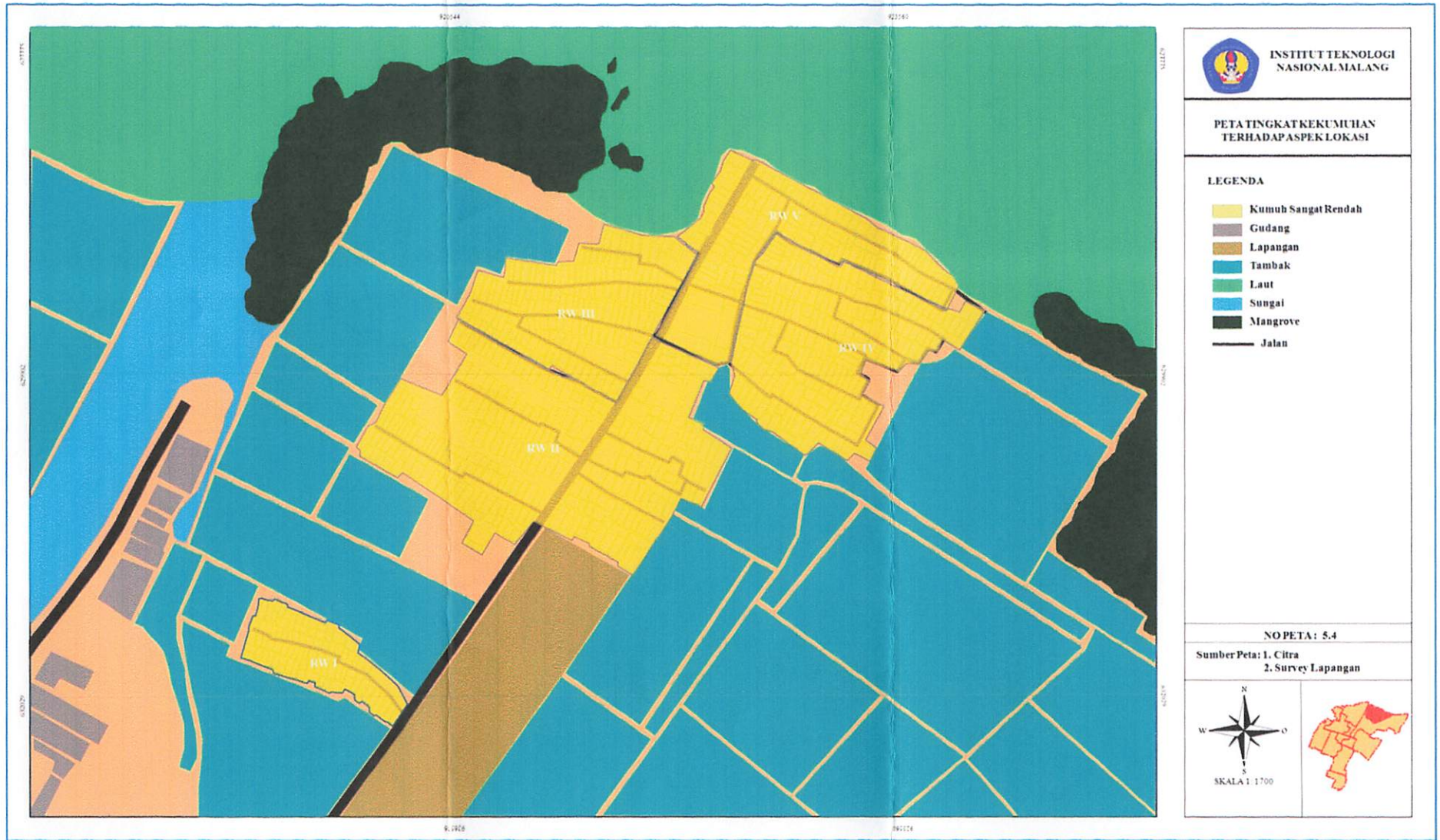




Faint, illegible text or markings at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

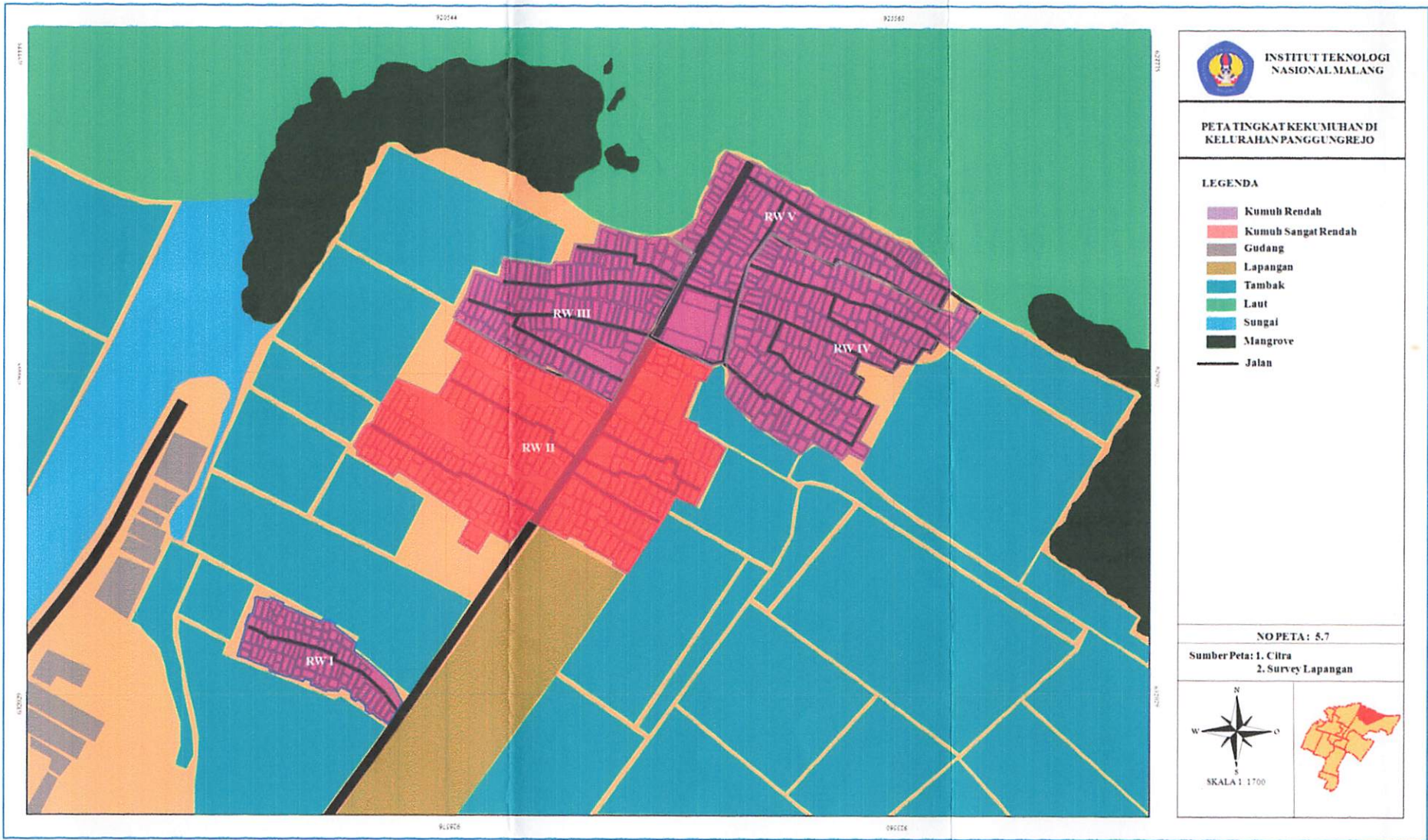












5.2 Analisis Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo

Analisis penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo terdiri atas analisis prospektif partisipatif dan Analisis Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat Kekumuhan dan Analisis Prospektif Partisipatif

5.2.1 Analisis Prospektif Partisipatif

Analisis struktural berbasis pada analisis pengaruh langsung, sebagai suatu cara untuk mengelompokkan variabel. Secara praktis, analisis pengaruh langsung terdiri dari valuasi pengaruh langsung masing-masing variabel terhadap variabel lainnya, dengan menggunakan skala dari 0 = tidak ada pengaruh sampai 3 = berpengaruh sangat kuat. Nilai yang telah didiskusikan dan disepakati oleh perwakilan *stakeholders* langsung dimasukkan di dalam matriks *influence/dependence* (I/D). Nilai skor pengaruh silang hasil kesepakatan secara lengkap disajikan pada tabel.

Berdasarkan hasil perhitungan skor pengaruh antar variabel dapat diketahui variabel yang memiliki skor tertinggi adalah variabel tingkat pendidikan dengan total nilai 18. Variabel tingkat kepadatan bangunan dan tingkat pendapatan masing-masing memiliki total nilai 15. Kepadatan penduduk berada pada urutan ketiga dengan total nilai 14. Fasilitas sosial budaya, tingkat kepadatan hunian dan tingkat kriminalitas masing-masing memiliki total nilai 0 yang menunjukkan bahwa tiga variabel ini memiliki nilai terendah diantara variabel-variabel lainnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.1

Grafik pengaruh langsung dan tidak langsung juga menunjukkan tingkat kekuatan variabel. Kuadran I (kiri atas) merupakan wilayah variabel penggerak (*driving*). Kuadran II (kanan atas) merupakan wilayah variabel kontrol (*leverage*) yang bercirikan pengaruh dan juga kebergantungan, beberapa variabel dalam kuadran ini dapat juga digolongkan sebagai variabel kuat. Kuadran III (kanan bawah) merupakan wilayah variabel keluaran (*output*), yang bersifat sangat bergantung dan hanya sedikit pengaruh. Kuadran IV (kiri bawah) merupakan wilayah variabel marginal (*marginal*), kelompok ini akan dikeluarkan dari analisis. Variabel yang berada pada Kuadran I dan II merupakan variabel kuat, dan akan dipilih sebagai variabel penentu dalam analisis selanjutnya.

Dari presentasi hasil analisis pengaruh langsung dan tidak langsung (total), diketahui bahwa variabel yang berada di kuadran I adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kemiskinan, tingkat kepadatan bangunan dan tingkat kepadatan penduduk dimana lima variabel. Dalam kasus ini, tidak ada variabel yang masuk dalam kuadran II. Dengan demikian, dapat dipilih lima variabel yang dapat dikatakan sebagai variabel

paling berpengaruh terhadap penanganan permukiman kumuh adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kemiskinan, tingkat kepadatan bangunan dan tingkat kepadatan penduduk dimana lima variabel ini sebagai variabel penggerak dalam upaya penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Panggunrejo Kota Pasuruan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.2

Gambar 5.1
Skor Pengaruh Antar Variabel

Pengaruh →	1: A1	2: A2	3: A3	4: A4	5: A5	6: A6	7: A7	8: A8	9: A9	10: A10	11: A11	12: A12	13: A13	14: A14	15: A15	16: A16	17: A17	18: A18	19: A19	20: A20	21: A21	22: A22
1: A1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2: A2	2	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3: A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
4: A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5: A5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
6: A6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
7: A7	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8: A8	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9: A9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
10: A10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
11: A11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12: A12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
13: A13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
14: A14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15: A15	2	3	0	0	0	1	1	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16: A16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17: A17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18: A18	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	2	2	2	2
19: A19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
20: A20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21: A21	0	0	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	3	0
22: A22	0	0	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0

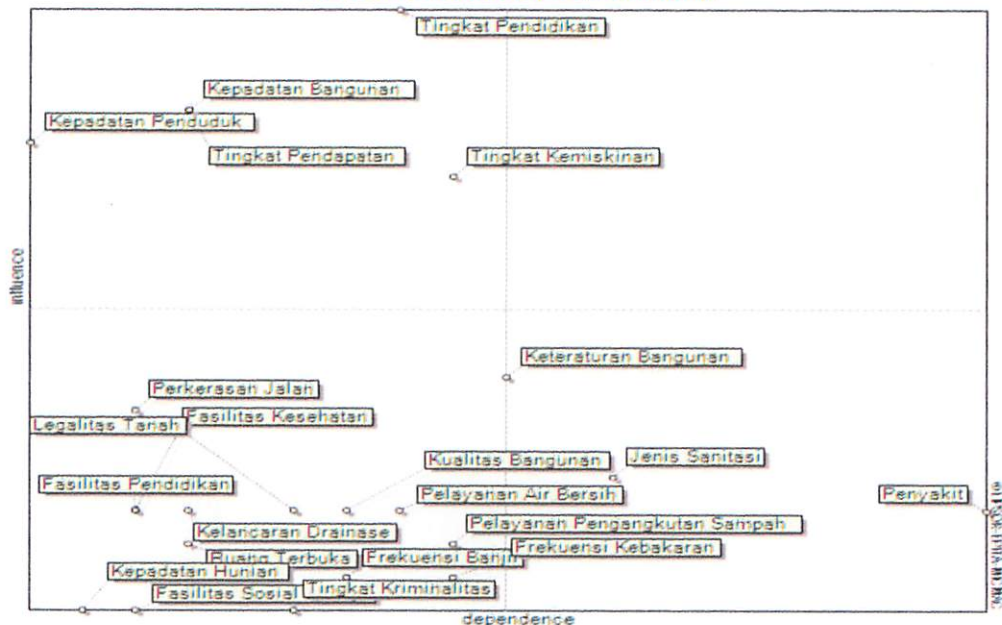
OJIBOR-ESTRANIMAC

Sumber: Hasil Analisa, 2015

Keterangan:

A1 = Keteraturan Bangunan, A2= Kepadatan Bangunan, A3= Kualitas Bangunan, A4= Kelancaran Drainase, A5= Pelayanan Air Bersih, A6= Jenis Sanitasi, A7= Pelayanan Pengangkutan Sampah, A8= Perkerasan Jalan, A9= Fasilitas Pendidikan, A10= Fasilitas Kesehatan, A11= Fasilitas Sosial Budaya, A12= RTH, A13= Frekuensi Banjir, A14= Frekuensi Kebakaran, A15= Kepadatan Penduduk, A16= Kepadatan Hunian, A17= Status Kepemilikan Tanah, A18= Tingkat Pendidikan, A19= Frekuensi Kriminalitas, A20=Angka Kesakitan, A21= Pendapatan, A22= Kemiskinan. Skor: 0 = Tidak ada pengaruh (no influence); 2 = Pengaruh sedang (mild influence); 3 = Pengaruh kuat (strong influence); 1 = Pengaruh lemah (little influence).

Gambar 5.2
 Hasil Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar Variabel
Direct influence/dependence map



Sumber: Hasil Analisa, 2015

5.2.2 Analisis Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat Kekumuhan dan Analisis Prospektif Partisipatif

Hasil analisis sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan di Kelurahan Panggunrejo terdiri atas kumuh rendah dan kumuh sangat rendah. Tiap wilayah RW memiliki karakteristik yang berbeda-beda. RW yang memiliki nilai kekumuhan paling tinggi adalah RW V sedangkan yang paling rendah adalah RW II. Masalah yang ada di setiap RW berbeda-beda ditinjau dari kondisi fisik bangunan, sarana dan prasarana, legalitas tanah, lokasi, sosial kependudukan dan sosial ekonomi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.15
RW Prioritas dan Masalah Kekumuhan

RW Prioritas	Masalah
V	- Kondisi Fisik Bangunan: terdapat rumah-rumah yang dibangun di sempadan pantai, memiliki kualitas bangunan yang tergolong permanen buruk dan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi.
	- Sarana dan Prasarana: sulitnya pelayanan akan air bersih sehingga masyarakat memenuhi kebutuhan air bersihnya dengan cara membeli di tukang jerigen keliling. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya MCK dan kebiasaan membuang sampah di laut. Kepadatan bangunan yang tinggi mengakitnya minimnya RTH.
	- Legalitas Tanah: Sebagian lahan tidak memiliki sertifikat hak milik, ini berkaitan dengan rumah yang dibangun diatas kawasan sempadan pantai.
	- Sosial Kependudukan: Tingkat pendidikan dan kesadaran akan kesehatan yang masih sangat rendah.
III	- Kondisi Fisik Bangunan: memiliki kepadatan bangunan yang tinggi. Terdapat beberapa rumah yang dibangun di sempadan pantai.
	- Sarana dan Prasarana: sulitnya pelayanan akan air bersih sehingga masyarakat memenuhi kebutuhan air bersihnya dengan cara membeli di tukang jerigen keliling. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya MCK dan kebiasaan membuang sampah di laut, tambak maupun tanah kosong. Kepadatan bangunan yang tinggi mengakitnya minimnya RTH.
	- Legalitas Tanah: Sebagian lahan tidak memiliki sertifikat hak milik, ini berkaitan dengan rumah yang dibangun diatas kawasan sempadan pantai.

	Sosial Kependudukan: Tingkat pendidikan dan kesadaran akan kesehatan yang masih sangat rendah..
I	- Kondisi Fisik Bangunan: memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi.
	- Sarana dan Prasarana: sulitnya pelayanan akan air bersih sehingga masyarakat memenuhi kebutuhan air bersihnya dengan cara membeli di tukang jerigen keliling. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya MCK dan kebiasaan membuang sampah di laut, tambak maupun tanah kosong. Kepadatan bangunan yang tinggi mengakitatnya minimnya RTH.
	- Sosial Kependudukan: Tingkat pendidikan dan kesadaran akan kesehatan yang masih sangat rendah
IV	- Kondisi Fisik Bangunan: memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi.
	- Sarana dan Prasarana: sulitnya pelayanan akan air bersih sehingga masyarakat memenuhi kebutuhan air bersihnya dengan cara membeli di tukang jerigen keliling. Kepadatan bangunan yang tinggi mengakitatnya minimnya RTH.
	- Sosial Kependudukan: Tingkat pendidikan dan kesadaran akan kesehatan yang masih sangat rendah
II	- Sulitnya pelayanan akan air bersih sehingga masyarakat memenuhi kebutuhan air bersihnya dengan cara membeli di tukang jerigen keliling atau masyarakat yang menggunakan PDAM. Masih ada masyarakat yang suka membuang sampah di tanah kosong. Kepadatan bangunan yang tinggi mengakitatnya minimnya RTH.
	- Sosial Kependudukan: Tingkat pendidikan dan kesadaran akan kesehatan yang masih sangat rendah.

Sumber: Hasil Analisa Tabel 5.14, 2015

Penanganan permukiman kumuh harus didasarkan pada upaya menanggulangi faktor-faktor yang menyebabkan kekumuhan, baik faktor yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Penanganan diutamakan pada faktor yang dinilai paling berpengaruh dalam mengatasi permukiman kumuh dan lokasi yang nilai kekumuhannya paling tinggi. . Penanganan permukiman kumuh memerlukan kerjasama dari semua pihak, terlebih masyarakat yang tinggal di wilayah perencanaan penanganan. Berikut penjabaran penanganan masalah permukiman kumuh pada tiap RW.

5.2.2.1 Penanganan Permukiman Kumuh RW V

RW V termasuk didalam kategori kumuh rendah dengan total nilai pembobotan 590. Penanganan permukiman kumuh di RW V disesuaikan dengan permasalahan yang ada, yakni masalah tingkat pendidikan yang rendah, minimnya MCK, masyarakat masih membuang sampah dilaut, sulitnya akses air bersih, legalitas tanah yang berkaitan dengan rumah-rumah di sempadan pantai, mayoritas bangunan tergolong permanen buruk, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan minimnya RTH. Lebih jelasnya terkait penanganan permukiman kumuh di RW V dapat dilihat pada tabel 5.16

Tabel 5.16
Penanganan Permukiman Kumuh RW V

Penanganan	Masalah								
	Tingkat pendidikan	MCK	Sampah	Air bersih	Legalitas Tanah	Keteraturan Bangunan	kuualitas bangunan	Kepadatan Bangunan	RTH
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Upaya mengatasi rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi faktor pendorong munculnya kawasan kumuh perlu diatasi dengan melakukan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu pemeliharaan sarana pendidikan formal dan pembangunan pendidikan non formal atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Perlu penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya wajib belajar 12 tahun melalui sosialisasi terhadap warga - Penyuluhan Kesehatan Lingkungan Penyuluhan kesehatan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya upaya menjaga kesehatan lingkungan dengan menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Masyarakat diberi kesadaran akan pentingnya penggunaan MCK. Terkait masalah sampah, masyarakat dikenalkan dengan program 4R Reduce (mengurangi), Reuse (Memakai kembali), Recycle (Mendaur Ulang), Repair (Memperbaiki). Adanya program bank sampah dapat meminimalisir masalah persampahan yang ada. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aktivitas posyandu atau pengajian, arisan, atau acara-acara sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kecil diharapkan masyarakat dapat memahami arti penting perilaku hidup yang sehat. 								

Penanganan	Masalah								
	Tingkat pendidikan	MCK	Sampah	Air bersih	Legalitas Tanah	Keteraturan Bangunan	kualitas bangunan	Kepadatan Bangunan	RTH
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan pengadaan program-program pemberdayaan sesuai dengan potensi karakteristik di lokasi penelitian. Secara riil program ini berbentuk pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian program ini diarahkan untuk membangun UKM berbasis masyarakat yang kuat sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi. Program ini meliputi pelatihan (teori dan praktek) serta pendampingan. Diupayakan adanya peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya yang ada. Peningkatan kemampuan pengelolaan sumberdaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah melalui pengolahan hasil-hasil laut yang selama ini hanya dijual tanpa olahan. hasil laut berupa ikan dapat diolah menjadi abon dan krupuk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan daya tahan kerusakan yang lebih lama. Kulit kerang yang oleh penduduk sering dibuang disebarkan tempat yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dapat diolah menjadi berbagai kerajinan yang bisa mengasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam kegiatan pelatihan perlu ada materi yang dikaitkan dengan upaya pengendalian lingkungan kumuh, sehingga diharapkan peningkatan ekonomi yang diperoleh masyarakat sebagian akan dimanfaatkan untuk perbaikan lingkungan kumuh.								
Peningkatan Sarana dan Prasarana	Keterbatasan pelayanan PDAM membuat masyarakat kesulitan dalam pemenuhan akan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Diperlukan kerja keras antara pihak pemerintah dan masyarakat agar meningkatkan pelayanan dan mutu air bersih. lokasi studi telah memiliki 4 MCK bersama, hal ini memerlukan kerjasama pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan dan perawatannya. Pelayanan pengangkutan sampah hendaknya mencakup seluruh wilayah kelurahan. Perbaikan drainase diperlukan untuk drainase yang mulai mengalami kemacetan, kegiatan ini bisa dilakukan dengan partisipasi penuh dari masyarakat setempat. Pengembangan RTH dengan pendekatan pemilihan jenis vegetasi dan optimalisasi lahan melalui penanaman dengan media pot-pot berupa tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kehidupan seperti tanaman sayuran, obat-obatan, dan buah-buahan.								
Pengelolaan Kawasan Bantaran/ Sempadan Pantai	Pengolahan kawasan bantaran / sempadan dapat dilakukan berupa penguatan peraturan tentang pemanfaatan daerah bantaran / sempadan sebagai daerah konservasi. Kegiatan ini diarahkan untuk mengatasi permasalahan rumah yang dibangun di daerah bantaran / sempadan pantai. Pola pendekatan yang disarankan adalah menggunakan model partisipatif. Pendekatan yang ditempuh terhadap masyarakat harus ditangani secara terpadu dan bersama-sama. Pembongkaran atau penggusuran rumah-rumah di bantaran / sempadan Kegiatan ini bertujuan untuk mengamankan bantaran / sempadan sebagai kawasan lindung (konservasi) dari bahaya banjir disamping menjaga								

Penanganan	Masalah								
	Tingkat pendidikan	MCK	Sampah	Air bersih	Legalitas Tanah	Keteraturan Bangunan	kuualitas bangunan	Kepadatan Bangunan	RTH
	keindahan kota. Sebagai solusinya pemerintah harus menyediakan kawasan perumahan sederhana pada lokasi-lokasi yang masih kosong (lahan tidak produktif). Kegiatan yang dapat dilakukan berupa penertiban bangunan-bangunan liar di bantaran sungai dan sempadan pantai sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada dan menata dan mengembangkan daerah hijau disepanjang bantaran pantai. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan sempadan / bantaran dari aktivitas yang mengganggu fungsi lindung.								

Sumber: Hasil Analisa Tabel 5.15, 2015

5.2.2.2 Penanganan Permukiman Kumuh RW III

RW III termasuk didalam kategori kumuh rendah dengan total nilai pembobotan 600. Penanganan permukiman kumuh di RW III disesuaikan dengan permasalahan yang ada, yakni masalah tingkat pendidikan yang rendah, minimnya MCK, masyarakat masih membuang sampah dilaut atau ditambak, sulitnya akses air bersih, legalitas tanah yang berkaitan dengan rumah-rumah di sempadan pantai, mayoritas bangunan tergolong permanen buruk, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan minimnya RTH. Lebih jelasnya terkait penanganan permukiman kumuh di RW III dapat dilihat pada tabel 5.17

Tabel 5.17
Penanganan Permukiman Kumuh RW III

Penanganan	Masalah							
	Tingkat pendidikan	Air bersih	MCK	Sampah	RTH	Legalitas Tanah	Keteraturan Bangunan	Kepadatan Bangunan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Upaya mengatasi rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi faktor pendorong munculnya kawasan kumuh perlu diatasi dengan melakukan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu pemeliharaan sarana pendidikan formal dan pembangunan pendidikan non formal atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Perlu penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya wajib belajar 12 tahun melalui sosialisasi terhadap warga - Penyuluhan Kesehatan Lingkungan Penyuluhan kesehatan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya upaya menjaga kesehatan lingkungan dengan menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Masyarakat diberi kesadaran akan pentingnya penggunaan MCK. Terkait masalah sampah, masyarakat dikenalkan dengan program 4R Reduce (mengurangi), Reuse (Memakai kembali), Recycle (Mendaur Ulang), Repair (Memperbaiki). Adanya program bank sampah dapat meminimalisir masalah persampahan yang ada. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aktivitas posyandu atau pengajian, arisan, atau 							

Penanganan	Masalah							
	Tingkat pendidikan	Air bersih	MCK	Sampah	RTH	Legalitas Tanah	Keteraturan Bangunan	Kepadatan Bangunan
	acara-acara sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kecil diharapkan masyarakat dapat memahami arti penting perilaku hidup yang sehat.							
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan pengadaan program-program pemberdayaan sesuai dengan potensi karakteristik di lokasi penelitian. Secara riil program ini berbentuk pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian program ini diarahkan untuk membangun UKM berbasis masyarakat yang kuat sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi. Program ini meliputi pelatihan (teori dan praktek) serta pendampingan. Diupayakan adanya peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya yang ada. Peningkatan kemampuan pengelolaan sumberdaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah melalui pengolahan hasil-hasil laut yang selama ini hanya dijual tanpa olahan. hasil laut berupa ikan dapat diolah menjadi abon dan krupuk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan daya tahan kerusakan yang lebih lama. Kulit kerang yang oleh penduduk sering dibuang disembarang tempat yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dapat diolah menjadi berbagai kerajinan yang bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam kegiatan pelatihan perlu ada materi yang dikaitkan dengan upaya pengendalian lingkungan kumuh, sehingga diharapkan peningkatan ekonomi yang diperoleh masyarakat sebagian akan dimanfaatkan untuk perbaikan lingkungan kumuh.							
Peningkatan Sarana dan Prasarana	Keterbatasan pelayanan PDAM membuat masyarakat kesulitan dalam pemenuhan akan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Diperlukan kerja keras antara pihak pemerintah dan masyarakat agar meningkatkan pelayanan dan mutu air bersih. lokasi studi telah memiliki 4 MCK bersama, hal ini memerlukan kerjasama pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan dan perawatannya. Pelayanan pengangkutan sampah hendaknya mencakup seluruh wilayah kelurahan. Perbaikan drainase diperlukan untuk drainase yang mulai mengalami kemacetan, kegiatan ini bisa dilakukan dengan partisipasi penuh dari masyarakat setempat. Pengembangan RTH dengan pendekatan pemilihan jenis vegetasi dan optimalisasi lahan melalui penanaman dengan media pot-pot berupa tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kehidupan seperti tanaman sayuran, obat-obatan, dan buah-buahan.							
Pengelolaan Kawasan	Pengolahan kawasan bantaran / sempadan dapat dilakukan berupa penguatan peraturan tentang pemanfaatan daerah bantaran / sempadan sebagai daerah konservasi. Kegiatan ini diarahkan untuk mengatasi permasalahan rumah yang							

Penanganan	Masalah							
	Tingkat pendidikan	Air bersih	MCK	Sampah	RTH	Legalitas Tanah	Keteraturan Bangunan	Kepadatan Bangunan
Bantaran/ Sempadan Pantai	dibangun di daerah bantaran / sempadan pantai. Pola pendekatan yang disarankan adalah menggunakan model partisipatif. Pendekatan yang ditempuh terhadap masyarakat harus ditangani secara terpadu dan bersama-sama. Pembongkaran atau penggusuran rumah-rumah di bantaran / sempadan Kegiatan ini bertujuan untuk mengamankan bantaran / sempadan sebagai kawasan lindung (konservasi). Sebagai solusinya pemerintah harus menyediakan kawasan perumahan sederhana pada lokasi-lokasi yang masih kosong (lahan tidak produktif). Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan sempadan / bantaran dari aktivitas yang mengganggu fungsi lindung.							

Sumber: Hasil Analisa Tabel 5.15, 2015

5.2.2.3 Penanganan Permukiman Kumuh RW I

RW I termasuk didalam kategori kumuh rendah dengan total nilai pembobotan 630. Penanganan permukiman kumuh di RW I disesuaikan dengan permasalahan yang ada, yakni masalah tingkat pendidikan yang rendah, minimnya MCK, masyarakat masih membuang sampah dilaut atau ditambak, sulitnya akses air bersih, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan minimnya RTH. Lebih jelasnya terkait penanganan permukiman kumuh di RW I dapat dilihat pada tabel 5.18

Tabel 5.18
Penanganan Permukiman Kumuh RW I

Penanganan	Masalah					
	Tingkat pendidikan	Air bersih	MCK	Sampah	RTH	Kepadatan Bangunan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Upaya mengatasi rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi faktor pendorong munculnya kawasan kumuh perlu diatasi dengan melakukan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu pemeliharaan sarana pendidikan formal dan pembangunan pendidikan non formal atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Perlu penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya wajib belajar 12 tahun melalui sosialisasi terhadap warga - Penyuluhan Kesehatan Lingkungan Penyuluhan kesehatan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya upaya menjaga kesehatan lingkungan dengan menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Masyarakat diberi kesadaran akan pentingnya penggunaan MCK. Terkait masalah sampah, masyarakat dikenalkan dengan program 4R Reduce (mengurangi), Reuse (Memakai kembali), Recycle (Mendaur Ulang), Repair (Memperbaiki). Adanya program bank sampah dapat meminimalisir masalah persampahan yang ada. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aktivitas posyandu atau pengajian, arisan, atau acara-acara sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kecil diharapkan masyarakat dapat memahami arti penting perilaku hidup yang sehat. 					

Penanganan	Masalah					
	Tingkat pendidikan	Air bersih	MCK	Sampah	RTH	Kepadatan Bangunan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	<p>Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan pengadaan program-program pemberdayaan sesuai dengan potensi karakteristik di lokasi penelitian. Secara riil program ini berbentuk pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian program ini diarahkan untuk membangun UKM berbasis masyarakat yang kuat sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi. Program ini meliputi pelatihan (teori dan praktek) serta pendampingan. Diupayakan adanya peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya yang ada. Peningkatan kemampuan pengelolaan sumberdaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah melalui pengolahan hasil-hasil laut yang selama ini hanya dijual tanpa olahan. Hasil laut berupa ikan dapat diolah menjadi abon dan krupuk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan daya tahan kerusakan yang lebih lama. Kulit kerang yang oleh penduduk sering dibuang disebarkan tempat yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dapat diolah menjadi berbagai kerajinan yang bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam kegiatan pelatihan perlu ada materi yang dikaitkan dengan upaya pengendalian lingkungan kumuh, sehingga diharapkan peningkatan ekonomi yang diperoleh masyarakat sebagian akan dimanfaatkan untuk perbaikan lingkungan kumuh.</p>					
Peningkatan Sarana dan Prasarana	<p>Keterbatasan pelayanan PDAM membuat masyarakat kesulitan dalam pemenuhan akan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Diperlukan kerja keras antara pihak pemerintah dan masyarakat agar meningkatkan pelayanan dan mutu air bersih. Lokasi studi telah memiliki 4 MCK bersama, hal ini memerlukan kerjasama pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan dan perawatannya. Pelayanan pengangkutan sampah hendaknya mencakup seluruh wilayah kelurahan. Perbaikan drainase diperlukan untuk drainase yang mulai mengalami kemacetan, kegiatan ini bisa dilakukan dengan partisipasi penuh dari masyarakat setempat. Pengembangan RTH dengan pendekatan pemilihan jenis vegetasi dan optimalisasi lahan melalui penanaman dengan media pot-pot berupa tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kehidupan seperti tanaman sayuran, obat-obatan, dan buah-buahan.</p>					

Sumber: Hasil Analisa Tabel 5.15, 2015

5.2.2.4 Penanganan Permukiman Kumuh RW IV

RW III termasuk didalam kategori kumuh rendah dengan total nilai pembobotan 660. Penanganan permukiman kumuh di RW III disesuaikan dengan permasalahan yang ada, yakni masalah tingkat pendidikan yang rendah, sulitnya akses air bersih, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan minimnya RTH. Lebih jelasnya terkait penanganan permukiman kumuh di RW III dapat dilihat pada tabel 5.19

Tabel 5.19
Penanganan Permukiman Kumuh RW IV

Penanganan	Masalah			
	Tingkat pendidikan	Air bersih	RTH	Kepadatan Bangunan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Upaya mengatasi rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi faktor pendorong munculnya kawasan kumuh perlu diatasi dengan melakukan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu pemeliharaan sarana pendidikan formal dan pembangunan pendidikan non formal atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Perlu penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya wajib belajar 12 tahun melalui sosialisasi terhadap warga - Penyuluhan Kesehatan Lingkungan Penyuluhan kesehatan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya upaya menjaga kesehatan lingkungan dengan menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aktivitas posyandu atau pengajian, arisan, atau acara-acara sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kecil diharapkan masyarakat dapat memahami arti penting perilaku hidup yang sehat. 			
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan pengadaan program-program pemberdayaan sesuai dengan potensi karakteristik di lokasi penelitian. Secara riil program ini berbentuk pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian program ini diarahkan untuk membangun UKM berbasis			

Penanganan	Masalah			
	Tingkat pendidikan	Air bersih	RTH	Kepadatan Bangunan
	<p>masyarakat yang kuat sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi. Program ini meliputi pelatihan (teori dan praktek) serta pendampingan. Diupayakan adanya peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya yang ada. Peningkatan kemampuan pengelolaan sumberdaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah melalui pengolahan hasil-hasil laut yang selama ini hanya dijual tanpa olahan. Hasil laut berupa ikan dapat diolah menjadi abon dan krupuk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan daya tahan kerusakan yang lebih lama. Kulit kerang yang oleh penduduk sering dibuang disembarang tempat yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dapat diolah menjadi berbagai kerajinan yang bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam kegiatan pelatihan perlu ada materi yang dikaitkan dengan upaya pengendalian lingkungan kumuh, sehingga diharapkan peningkatan ekonomi yang diperoleh masyarakat sebagian akan dimanfaatkan untuk perbaikan lingkungan kumuh.</p>			
Peningkatan Sarana dan Prasarana	<p>Keterbatasan pelayanan PDAM membuat masyarakat kesulitan dalam pemenuhan akan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Diperlukan kerja keras antara pihak pemerintah dan masyarakat agar meningkatkan pelayanan dan mutu air bersih. Perbaikan drainase diperlukan untuk drainase yang mulai mengalami kemacetan, kegiatan ini bisa dilakukan dengan partisipasi penuh dari masyarakat setempat. Pengembangan RTH dengan pendekatan pemilihan jenis vegetasi dan optimalisasi lahan melalui penanaman dengan media pot-pot berupa tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kehidupan seperti tanaman sayuran, obat-obatan, dan buah-buahan.</p>			

Sumber: Hasil Analisa Tabel 5.15, 2015

5.2.2.5 Penanganan Permukiman Kumuh RW II

RW II termasuk didalam kategori kumuh sangat rendah dengan total nilai pembobotan 730. Penanganan permukiman kumuh di RW II disesuaikan dengan permasalahan yang ada, yakni masalah tingkat pendidikan yang rendah, minimnya MCK, masyarakat masih membuang sampah ditambak dan tanah kosong, sulitnya akses air bersih, dan minimnya RTH. Lebih jelasnya terkait penanganan permukiman kumuh di RW II dapat dilihat pada tabel 5.20

Tabel 5.20
Penanganan Permukiman Kumuh RW II

Penanganan	Masalah			
	Tingkat pendidikan	Air bersih	Sampah	RTH
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Upaya mengatasi rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi faktor pendorong munculnya kawasan kumuh perlu diatasi dengan melakukan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu pemeliharaan sarana pendidikan formal dan pembangunan pendidikan non formal atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Perlu penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya wajib belajar 12 tahun melalui sosialisasi terhadap warga - Penyuluhan Kesehatan Lingkungan Penyuluhan kesehatan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya upaya menjaga kesehatan lingkungan dengan menerapkan pola hidup sehat sebagai upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aktivitas posyandu atau pengajian, arisan, atau acara-acara sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup kecil diharapkan masyarakat dapat memahami arti penting perilaku hidup yang sehat. 			
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	<p>Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan pengadaan program-program pemberdayaan sesuai dengan potensi karakteristik di lokasi penelitian. Secara riil program ini berbentuk pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian program ini diarahkan untuk membangun UKM berbasis masyarakat yang kuat sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi. Program ini meliputi pelatihan (teori dan praktek) serta pendampingan. Diupayakan adanya peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya yang ada. Peningkatan kemampuan pengelolaan sumberdaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah melalui</p>			

Penanganan	Masalah			
	Tingkat pendidikan	Air bersih	Sampah	RTH
	<p>pengolahan hasil-hasil laut yang selama ini hanya dijual tanpa olahan. hasil laut berupa ikan dapat diolah menjadi abon dan krupuk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan daya tahan kerusakan yang lebih lama. Kulit kerang yang oleh penduduk sering dibuang disembarang tempat yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dapat diolah menjadi berbagai kerajinan yang bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam kegiatan pelatihan perlu ada materi yang dikaitkan dengan upaya pengendalian lingkungan kumuh, sehingga diharapkan peningkatan ekonomi yang diperoleh masyarakat sebagian akan dimanfaatkan untuk perbaikan lingkungan kumuh.</p>			
Peningkatan Sarana dan Prasarana	<p>Keterbatasan pelayanan PDAM membuat masyarakat kesulitan dalam pemenuhan akan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Diperlukan kerja keras antara pihak pemerintah dan masyarakat agar meningkatkan pelayanan dan mutu air bersih. Pelayanan pengangkutan sampah hendaknya mencakup seluruh wilayah kelurahan.. Pengembangan RTH dengan pendekatan pemilihan jenis vegetasi dan optimalisasi lahan melalui penanaman dengan media pot-pot berupa tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung kehidupan seperti tanaman sayuran, obat-obatan, dan buah-buahan.</p>			

Sumber: Hasil Analisa Tabel 5.15, 2015

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasar pada tahap demi tahap yang telah dilakukan dalam penelitian ini, uraian berikut akan membahas 3 poin kesimpulan dari rumusan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan.

6.1.1 Karakteristik Permukiman Kumuh

Karakteristik permukiman kumuh setiap RW yang ada di Kelurahan Panggungrejo umumnya tidak jauh berbeda. Permasalahan yang ada terletak pada tingkat pendidikan masyarakat yang rendah yang berdampak sangat besar pada perilaku terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi. Air bersih masih menjadi permasalahan yang serius dikarenakan sebagian masyarakat belum terlayani oleh PDAM yang mengakibatkan sulitnya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Tingkat pendapatan yang tidak menentu karena sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan bergantung hidup pada laut dan cuaca yang ada, dengan ini memerlukan peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UKM-UKM untuk meningkatkan potensi laut yang ada. Masih terdapat rumah-rumah yang dibangun di sempadan pantai yang dapat membahayakan keselamatan penduduk dan merusak kelestarian pantai yang ada.

6.1.2 Tingkat Kekumuhan

Penilaian tingkat kekumuhan di lokasi penelitian berdasarkan aspek fisik bangunan, sarana dan prasarana, legalitas tanah, lokasi, sosial kependudukan dan sosial ekonomi. Hasil penilaian pada aspek fisik bangunan terbagi atas tiga kategori kumuh yaitu kumuh sangat rendah, kumuh rendah dan kumuh sedang. RW I dan RW V termasuk di dalam kategori kumuh sedang ditinjau dari aspek fisik bangunan. Penilaian terhadap aspek sarana dan prasarana menghasilkan dua tingkat kekumuhan yaitu kategori kumuh rendah dan kumuh sedang. Termasuk dalam kumuh sedang berdasarkan penilaian aspek sarana dan prasarana adalah RW V. Hasil penilaian terhadap aspek legalitas tanah menunjukkan bahwa RW V termasuk dalam kategori kumuh tinggi. Lima RW yang ada termasuk dalam kategori kumuh sangat rendah ditinjau dari aspek lokasi. Ditinjau dari aspek sosial

kependudukan RW I, RW II, RW III, dan RW V masuk didalam kategori kumuh sedang. Hasil penilaian terhadap aspek sosial ekonomi menunjukkan bahwa RW II, RW III dan RW V termasuk dalam kategori kumuh sedang. Berdasarkan total penilaian terhadap lima aspek yang ada diketahui bahwa permukiman di Kelurahan Panggungrejo terdiri atas dua kategori kumuh yaitu kumuh rendah dan kumuh sangat rendah. Termasuk dalam kumuh rendah adalah RW I, RW III, RW IV dan RW V. RW II termasuk dalam kategori kumuh sangat rendah. nilai tertinggi kekumuhan berada pada RW V sedangkan RW II memiliki nilai kekumuhan paling rendah.

6.1.3 Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo

Hasil analisa prospektif partisipatif menunjukkan lima variabel penggerak yang paling mempengaruhi kekumuhan di Kelurahan Panggungrejo yaitu variabel tingkat pendidikan, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, pendapatan dan tingkat kemiskinan. Lima RW yang ada memiliki permasalahan yang kurang lebih sama. Penanganan permukiman kumuh di lokasi studi memerlukan kerjasama antar semua pihak dan menitikberatkan pada masyarakat sebagai pihak aktif. Program penanganan yang direncanakan untuk menanggulangi masalah permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo adalah peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastruktur publik, dan pengelolaan kawasan sempadan pantai.

6.2 Saran

Saran dari penulis terbagi atas dua bagian yaitu saran terhadap pemerintah setempat dan terhadap peneliti selanjutnya

6.2.1 Saran Untuk Pemerintah Setempat

Beberapa hal yang penulis harapkan untuk menjadi perhatian pemerintah setempat dalam perencanaan pembangunan kedepannya adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan terampil. Kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan terstruktur dan terprogram.
- b. Mengembangkan potensi sumber daya laut yang ada dengan melibatkan masyarakat sebagai pemeran utamanya.
- c. Pengadaan air bersih yang dapat manjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Panggungrejo.

- d. Menertibkan bangunan yang ada di wilayah sempadan pantai dengan tidak menyampingkan kepentingan masyarakat.

6.2.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya:

- a. Studi lanjutan mengenai bentuk kemitraan dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai upaya penanganan permukiman kumuh.
- b. Studi lanjutan mengenai konsep pengembangan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi laut yang ada di Kelurahan Panggungrejo.
- c. Studi lanjutan mengenai penataan kawasan sempadan pantai sebagai upaya menjaga kelestarian alam.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Alfian. 2014. "Peran Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Dalam Penataan Perumahan Permukiman Kawasan Garis Sempadan Sungai Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang". *eJournal Ilmu Pemerintahan* Vol.2, ISSN 2338-3651.
- Basri, H, Ispurwono, dan Bambang S. 2010. "Model Penanganan Permukiman Kumuh Studi Kasus Permukiman Kumuh Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo" Seminar Nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota. Jurusan Arsitektur ITS – Maret.
- Butar, D. dan R.Setiawan. 2010. "Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya Melalui Pendekatan Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Teknik POMITS* Vol. 1, No. 1.
- .DamaiA.A. 2011. "Analisis Prospektif Partisipatif Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Lampung". *Forum Pascasarjana*, Vol.34 No.4 Oktober.
- Kadir, I. 2010. "Studi Karakteristik Dan Pola Penanganan Kawasan Kumuh Kota Bau-Bau", Vol. 8, No. 2, April.
- Kamal, M. 2005. "Manfaat Penataan Permukiman Kumuh Terhadap Masyarakat Nelayan di Kawasan Bandengan Kabupaten Kendal", Tesis.
- Keman, S. 2005. "Kesehatan Perumahan Dan Lingkungan Pemukiman", *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 2, NO. 1, Juli.
- Kusumastuti. "Kajian Prasarana Dan Sarana Lingkungan Permukiman Kumuh Di Bulak Banteng Surabaya", ISBN No. 978-979-18342-0-9.

- Malau, W. 2013. "Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (*Slum Area*) Di Daerah Perkotaan", *JUPIIS* Vol. 5, No. 2, Desember.
- Malau, Y. N. 2007. "Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Kumuh Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai", *Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah* Vol.2, No.1, Agustus.
- Muhtar dkk. 2012. *Rapid Assessment* Daerah Aliran Sungai Ciliwung Di Kelurahan Manggarai & Kelurahan Kampung Melayu, DKI Jakarta. Jakarta: P3KS Press (Anggota IKAPI)
- Oktaviansyah, E. 2012. "Penataan Permukiman Kumuh Rawan Bencana Kebakaran Di Kelurahan Lingkas Ujung Kota Tarakan", *Jurnal Tata Kota dan Daerah* Vol. 4, No. 2, Desember.
- Rahayu, M dan Rutiana D. 2007." Strategi Perencanaan Pembangunan Permukiman Kumuh, Kasus Pemukiman Bantaran Sungai Bengawan Solo, Kelurahan Pucangsawit, Surakarta", *Gema Teknik – No. 1/Tahun X Januari*.
- Santosa, B. 2012. "Kesiapan Dan Kesiediaan Pemangku Kepentingan Untuk Peremajaan Kawasan Kumuh Melalui Pembangunan Rumah Susun: Studi Kasus Di Kota Semarang", *Jurnal Perkotaan* Vol. 4 No. 2 Desember.
- Suharini, E. 2007. "Citra Penginderaan Jauh" *Jurnal* Vol.4, No.2, Juli
- Sukari. 2010. "Permukiman Kota Dan Masalahnya – Kasus Kota Yogyakarta", *JANTRA* Vol. V, No.10, Desember ,ISSN 1907 – 9605.
- Syarifuddin. 2005. "Kondisi Fisik Permukiman Penduduk Di Pesisir Pantai Teluk Palu". *Jurnal SMARTek* Vol. 3 No. 3, Agustus .

Buku:

- Kountur, R. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta, PPM:2004
- Mulyana, D. Metodologi Penelitian kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya:2002.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung, Alfabeta:2011.
- Suryandari, R. 2003. "Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Terhadap Masyarakat Berwawasan Ekologi". Jakarta: LP3ES
- Yudohusodo, S dkk. 1991. " Rumah Untuk Seluruh Rakyat". Jakarta:INKOPPOL.

Tesis

- Kamal, Mustofa. 2005. "Manfaat Penataan Permukiman Kumuh Terhadap Masyarakat Nelayan di Kawasan Bandengan Kabupaten Kendal", Tesis.

Internet:

- <http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/v2/ebook.php#prettyPhoto%5Biframe%5D/5/> diakses pada 31/03/2015 12:34 WIB)
- <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/pasuruan.pdf> diakses pada 30/3/2015 11:34 WIB
- <http://www.jatimprov.go.id/site/upah-minimum-kabupatenkota-jawa-timur-2015/> (diakses 6 Mei 2015 pukul 12.28 WIB)
- <http://www.jatimprov.go.id/site/upah-minimum-kabupatenkota-jawa-timur-2015/> (diakses 6 Mei 2015 pukul 12.28 WIB)

Lampiran

Lampiran 1

Wawancara Penelitian

"Penanganan Permkokiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan"

Sehubungan dengan penelitian terhadap Tugas Akhir yang sedang saya kerjakan pada jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, maka saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi Wawancara atau daftar pertanyaan yang telah saya buat di bawah ini. Informasi ini tidak mengandung kepentingan politik, sara serta tidak dipublikasikan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i saya ucapkan banyak terima kasih.

PROFIL RESPONDEN

- | | |
|------------------|---|
| 1. No.Responden | : 2 |
| 2. Hari/Tanggal | : Selasa, 21 Mei 2019 |
| 3. Nama | : Pa'udah |
| 4. Umur | : 23 Tahun |
| 5. Alamat | : Kelurahan Panggungrejo-RT 11/W 11 |
| 6. Lama Tinggal | : 25 Tahun |
| 7. Jenis Kelamin | : <input type="checkbox"/> Laki - laki
<input checked="" type="checkbox"/> Perempuan |

Petunjuk Pengisian Kuesioner :

1. Pilih salah satu jawaban pada setiap pertanyaan dengan memberi tanda silang (X) sesuai dengan kondisi atau kenyataan yang ada.
2. Jika dalam daftar jawaban tidak ada yang sesuai, maka dapat diisi dengan pendapat anda sendiri pada tempat yang tersedia.

1. Kepadatan Hunian :
 - a. $>7.2 \text{ m}^2/\text{jiwa}$
 - b. $5 - 7.2 \text{ m}^2/\text{jiwa}$ 3 jiwa, $16,5 \text{ m}^2$
 - c. $3 - 4 \text{ m}^2/\text{jiwa}$
 - d. $<3 \text{ m}^2/\text{jiwa}$

2. Bahan baku bangunan:
 - a. Permanen baik Ases, keramik, kaku
 - b. Permanen buruk
 - c. Non permanen baik
 - d. Non permanen buruk

3. Pendidikan terakhir yang ditempuh:
 - a. Lulus pendidikan tinggi
 - b. Lulus pendidikan menengah
 - c. Lulus pendidikan dasar
 - d. Tidak lulus pendidikan dasar

4. Kebutuhan air bersih berasal dari:
 - a. PDAM baik
 - b. PDAM kurang baik
 - c. PDAM buruk
 - d. Tidak terjangkau PDAM (Kecamatan)

5. Jenis pembuangan air limbah rumah tangga (Mandi, Cuci, Kakus):
 - a. MCK pribadi terhubung septic tank
 - b. MCK bersama terhubung septic tank
 - c. MCK tidak terhubung septic tank
 - d. Tidak terdapat MCK permanen

6. Pelayanan pengangkutan sampah domestik
 - a. Seminggu 2 kali 1x - 1 hari
 - b. Seminggu sekali
 - c. Lebih dari seminggu sekali
 - d. Tidak tertayani

7. Pendapatan per bulan :
 - a. $> \text{Rp.}1.600.000$
 - b. $\text{Rp.}1.210.000 - \text{Rp.}1.600.000$ 1,5 x
 - c. $\text{Rp.}800.000 - \text{Rp.}1.200.000$
 - d. $< \text{Rp.}800.000$

Rekap Kuisioner

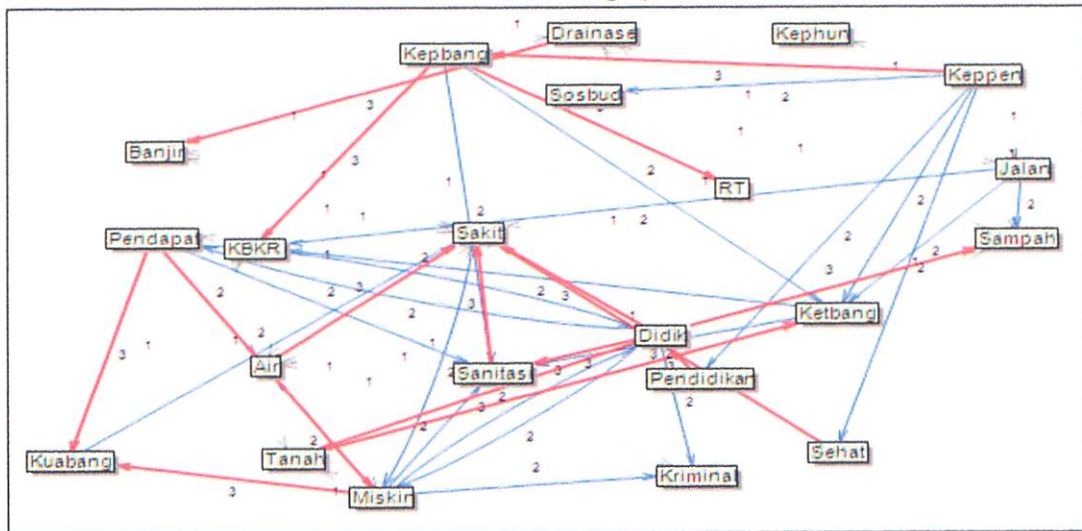
No Responden	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Lama Tinggal	RT/RW	Kepadatan Hunian	Bahan Baku Bangunan	Pendidikan	Air Bersih	MCK	Sampah	Pendapatan
1	Ferish	P	57	57	I/I	4	4	1	4	4	1	4
2	Maimunah	P	67	67	I/I	4	2	1	4	1	4	3
3	Jahro	P	54	54	I/I	1	2	1	1	1	4	1
4	Lusri	P	40	40	I/I	3	2	1	1	1	4	2
5	Sugeng	L	30	4	I/I	3	4	3	4	1	1	4
6	Maulida	P	35	35	I/I	4	4	2	1	4	1	4
7	Muaroma	P	42	42	I/II	4	2	2	1	4	4	2
8	lanah	P	44	44	I/II	4	4	2	1	1	4	3
9	Samsudin	P	52	52	I/II	4	4	1	4	1	1	4
10	Ithi Fatimah	P	33	33	I/II	4	4	2	1	3	1	3
11	M.Jimron	L	35	18	I/II	4	4	2	1	3	1	3
12	Fatimah	P	50	50	I/II	4	4	2	4	4	1	4
13	Ithi Aminah	P	45	45	I/II	4	2	1	1	3	1	3
14	Fadillah	P	50	50	I/II	4	2	1	1	4	1	4
15	Asriah	P	56	56	I/II	4	2	1	1	1	1	2
16	Utawatiun	P	35	35	I/III	2	4	3	4	4	4	4
17	Az	P	45	45	I/III	2	2	2	1	4	4	2
18	Solihah	P	23	23	I/III	2	2	2	1	1	4	1
19	Nani	P	30	30	I/III	4	2	1	1	4	4	2
20	Mansuro	P	32	32	I/III	2	1	2	1	3	4	1
21	Bir Sujastri	P	36	36	I/IV	4	1	1	4	3	4	3
22	Suzain	P	29	29	I/IV	4	4	1	4	4	4	20
23	Arlia	P	33	19	I/IV	4	2	2	4	3	4	3
24	Solihah	P	77	77	I/IV	4	4	2	4	4	4	26
25	Asah	P	77	77	I/IV	4	4	1	1	4	4	22
26	Hallimah	P	28	28	I/IV	3	4	1	1	3	4	4
27	Ratun Hesi	P	39	39	I/IV	4	4	3	1	4	4	24
28	Normah	P	27	27	I/IV	4	4	2	4	4	4	34
29	Firriah	P	28	28	I/IV	3	4	1	1	3	4	4
30	Hessah	P	43	43	I/V	3	4	2	1	4	1	4
31	Romawati	P	68	68	I/V	4	4	2	4	4	1	2
32	Sammad El	L	55	55	I/V	4	2	2	4	4	4	2
33	Ithi Hidayat	P	43	43	I/V	4	4	3	1	4	1	4
34	Roliah	P	38	38	I/V	4	4	2	1	4	4	3
35	Herwah	P	30	30	I/V	3	4	2	1	4	1	4
36	Nara Ulfah	P	32	32	II/I	4	2	2	1	3	4	2
37	Bahori	L	47	47	II/I	3	4	1	1	1	4	2
38	Ithi Fatimah	P	73	73	II/I	4	2	2	1	1	4	2
39	Asu	P	38	38	II/I	4	4	1	1	1	4	3
40	Sulastri	P	45	45	II/I	4	4	2	1	1	4	3
41	Solihah	P	30	30	II/I	4	2	1	1	4	2	16
42	ja Ulumud	L	32	32	II/II	3	4	3	4	4	4	26
43	Jumawah	P	55	55	II/II	4	4	1	4	4	4	2
44	Saipudin	L	47	47	II/II	4	4	1	4	4	4	2
45	Almas	L	50	50	II/II	4	2	1	1	1	1	1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
46	Ismail	L	51	51	ii/iii	3	4	2	4	4	4	2	23
47	Yusro	P	43	43	ii/iii	4	4	2	4	4	4	2	24
48	Amnah	P	46	46	ii/iii	4	2	2	1	1	1	3	14
49	Adri	L	32	32	ii/iii	4	4	2	1	1	1	2	15
50	Farida	P	52	52	ii/iii	4	4	2	1	4	4	4	23
51	Maimun	P	35	35	ii/iii	4	2	1	4	1	4	3	19
52	Musdarifah	P	27	27	ii/iv	2	3	2	1	3	4	3	18
53	Bociah	P	23	23	ii/iv	3	4	2	1	3	4	3	20
54	Anna	P	49	49	ii/iv	4	4	1	1	3	4	1	18
55	Ruhayah	P	31	31	ii/iv	1	2	1	1	3	4	3	15
56	Wisma	P	60	60	ii/iv	4	2	1	1	3	4	4	19
57	Muzali	L	57	57	ii/iv	4	1	1	1	3	4	2	16
58	Komarlah	P	26	26	ii/iv	3	4	2	1	3	4	4	21
59	Idi Fetiimah	P	72	72	ii/iv	4	2	2	1	3	4	1	17
60	Muhalah	L	68	68	ii/v	4	4	2	1	1	4	3	19
61	Jannah	L	55	55	ii/v	4	2	2	1	1	4	3	17
62	Alimatush	L	40	40	ii/v	3	2	2	1	1	4	3	18
63	Hotijah	P	50	50	ii/v	4	2	2	1	1	4	3	17
64	Mahroqah	P	40	40	ii/v	4	2	2	1	1	4	4	18
65	Ilmah	P	36	36	ii/v	4	2	2	1	4	4	3	20
66	Rosah	P	42	42	ii/v	4	2	2	1	1	4	3	17
67	Khotul	L	45	45	ii/v	3	2	2	1	1	4	3	16
68	Hadijah	P	39	39	ii/v	4	2	2	1	1	4	3	17
69	Jajah	L	40	40	ii/vi	4	2	2	1	4	4	4	21
70	Sepuan	L	49	49	ii/vi	4	4	2	4	4	4	4	3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
69	Khotul	L	45	45	ii/v	3	2	2	1	1	4	3	16
70	Hadijah	P	39	39	ii/v	4	2	2	1	1	4	3	17
71	Jajah	L	40	40	ii/vi	4	2	2	1	4	4	4	21
72	Sepuan	L	49	49	ii/vi	4	4	2	4	4	4	3	25
73	Lulu	P	35	20	ii/vi	4	4	2	1	4	4	2	21
74	Sepuan	L	49	49	ii/vi	4	4	2	4	3	4	3	24
75	Setengah	P	60	60	ii/vi	4	4	1	4	1	4	2	20
76	Soek	L	53	53	ii/vi	4	4	3	4	1	1	3	20
77	Sunarti	P	50	50	ii/vi	4	4	1	1	1	1	3	15
78	Romlah	P	36	36	ii/vi	4	4	2	1	1	1	4	17
79	Muslimah	P	50	50	ii/vi	3	2	2	1	1	1	1	11
80	Nurrahah	P	27	27	ii/vi	4	4	2	1	1	1	1	3
81	Jumayah	P	55	55	ii/vi	2	2	1	1	3	1	2	13
82	Saudah	P	33	33	ii/vi	2	2	1	1	1	3	4	16
83	Rahayu	P	25	25	ii/vi	3	4	2	1	3	4	4	21
84	Murnah	P	55	55	ii/vi	4	2	1	4	3	4	4	22
85	Ik Sriyati	P	36	36	ii/vi	4	4	1	1	1	4	3	20
86	Amir Pujiast	P	36	36	ii/vi	3	4	2	1	3	4	3	20
87	Ramunah	P	34	34	ii/vi	4	4	2	1	4	1	3	19
88	Sari	P	25	3	ii/vi	4	4	2	4	4	4	3	25
89	Haryati	P	60	60	ii/vi	4	2	1	1	4	4	2	18
90	Ravren	P	50	50	ii/vi	4	2	1	1	4	4	2	18
91	Syafatimah	P	60	60	ii/vi	4	2	1	1	4	4	4	20
92	Sivah	P	33	33	ii/vi	4	2	1	1	4	4	2	18
93	Zetra	P	26	26	ii/vi	4	2	1	1	4	4	2	18

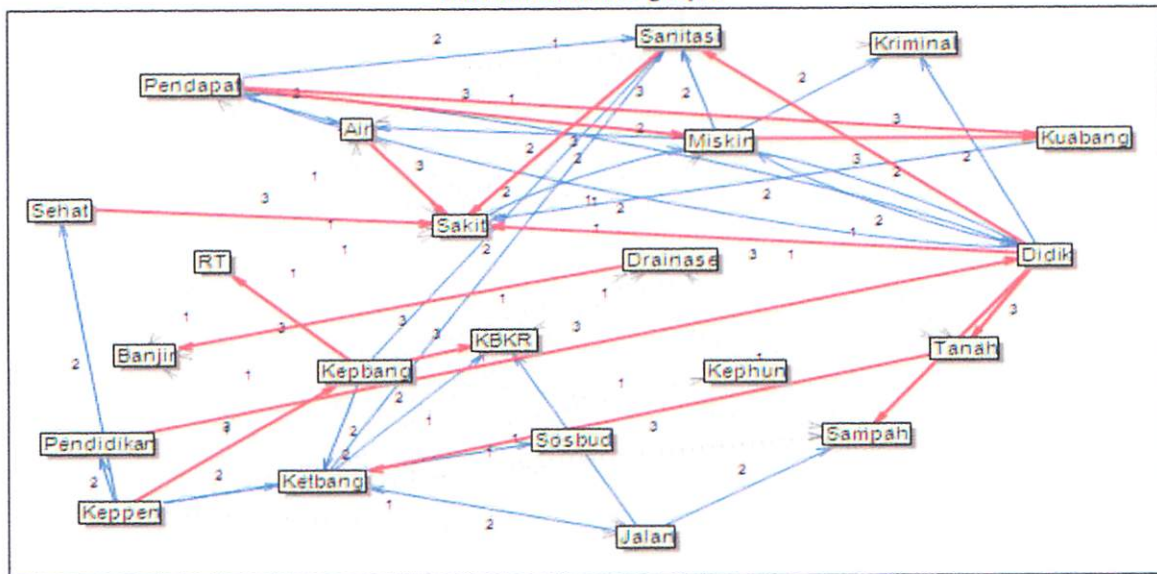
Lampiran 2 : PPA

Direct influence graph



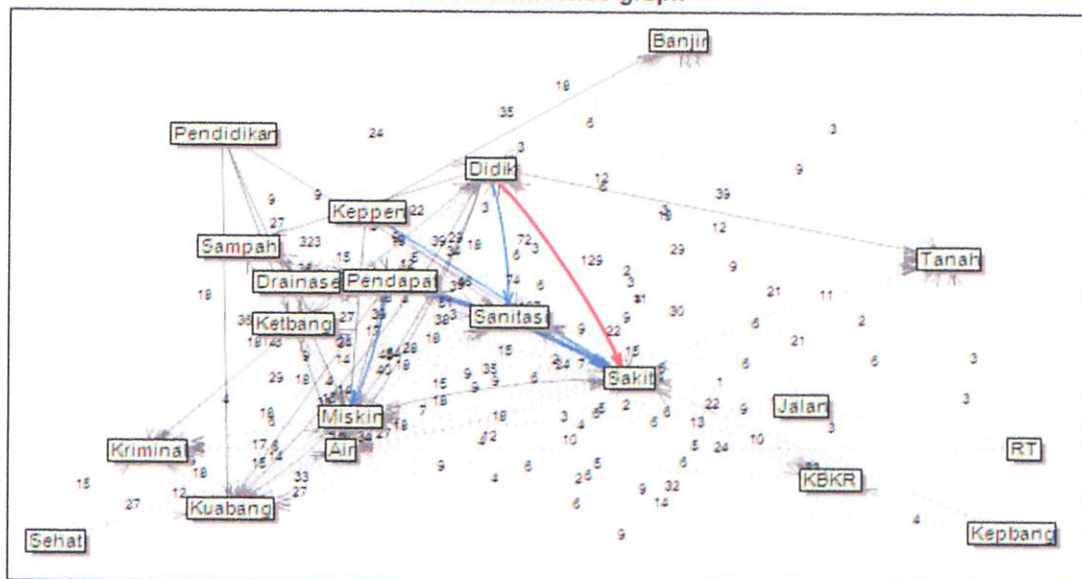
- Weakest influences
- Weak influences
- Moderate influences
- Relatively strong influences
- Strongest influences

Direct influence graph



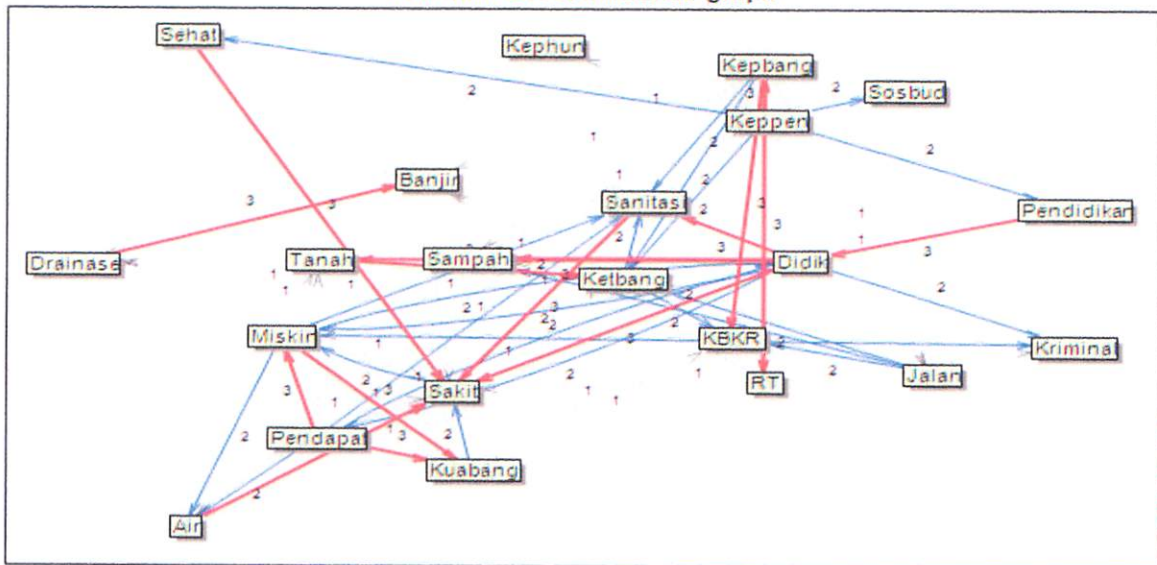
- Weakest influences
- Weak influences
- Moderate influences
- Relatively strong influences
- Strongest influences

Indirect influence graph



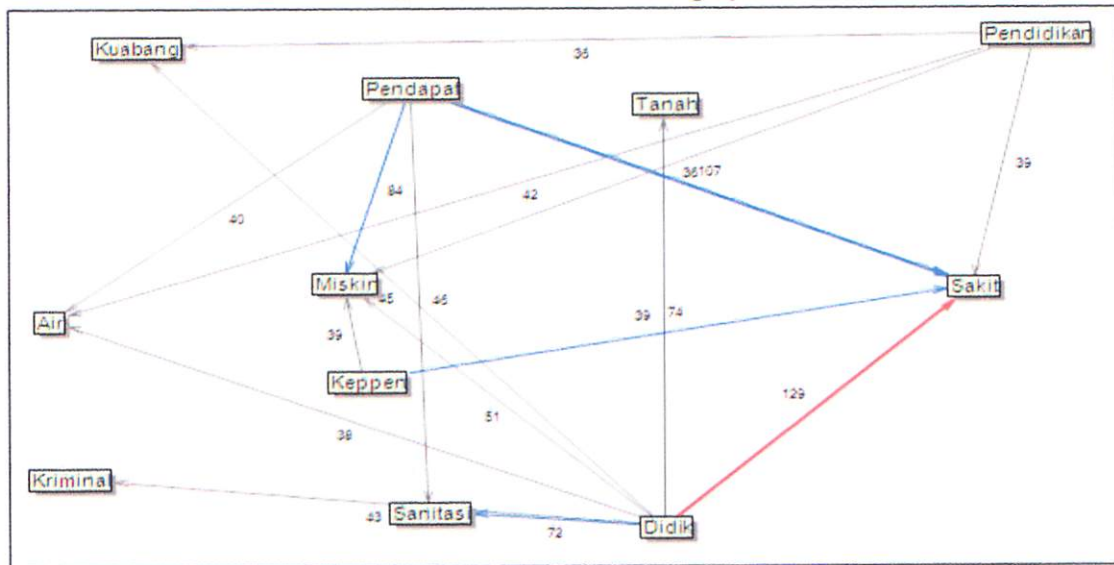
- Weakest influences
- Weak influences
- Moderate influences
- Relatively strong influences
- Strongest influences

Potential direct influence graph



- Weakest influences
- Weak influences
- Moderate influences
- Relatively strong influences
- Strongest influences

Potential indirect influence graph



- Weakest influences
- Weak influences
- Moderate influences
- Relatively strong influences
- Strongest influences

RANK	LABEL	DIRECT INFLUEN CE	LABEL	DIRECT DEPENDEN CE	LABEL	INDIREC T INFLUEN CE	LABEL	INDIRECT DEPENDEN CE
1	Didik	1512	Sakit	1512	Didik	1809	Sakit	1924
2	Kepba ng	1260	Sanitasi	924	Pendapat	1577	Miskin	1298
3	Pendap at	1260	Ketbang	756	Keppen	1007	Sanitasi	1039
4	Keppe n	1176	Sampah	672	Miskin	967	Air	945
5	Miskin	1092	KBKR	672	Pendidik an	863	Kuabang	929
6	Ketban g	588	Miskin	672	Sakit	732	Kriminal	694
7	Jalan	504	Air	588	Kepbang	463	Didik	619
8	Sanitas i	336	Didik	588	Sanitasi	413	Tanah	572
9	Kuaba ng	252	Kuabang	504	Air	384	Pendapat	528
10	Draina se	252	Banjir	504	Sehat	384	Sampah	359
11	Air	252	Tanah	420	Kuabang	297	Ketbang	319

RANK	LABEL	DIRECT INFLUEN CE	LABEL	DIRECT DEPENDEN CE	LABEL	INDIREC T INFLUEN CE	LABEL	INDIRECT DEPENDEN CE
12	Pendidikan	252	Kriminal	420	Jalan	219	Banjir	294
13	Sehat	252	Kepbang	252	KBKR	203	KBKR	278
14	Tanah	252	Drainase	252	Ketbang	194	Drainase	194
15	Sakit	252	RT	252	Tanah	150	Kepbang	0
16	Sampah	168	Pendapat	252	RT	137	Jalan	0
17	RT	168	Jalan	168	Banjir	128	Pendidikan	0
18	Banjir	84	Pendidikan	168	Sampah	37	Sehat	0
19	KBKR	84	Sehat	168	Drainase	28	Sosbud	0
20	Sosbud	0	Sosbud	168	Sosbud	0	RT	0
21	Kephun	0	Kephun	84	Kephun	0	Keppen	0
22	Kriminal	0	Keppen	0	Kriminal	0	Kephun	0

RAN K	LABEL	POTENTIAL DIRECT INFLUENCES	LABEL	POTENTIAL DIRECT DEPENDENCE	LABEL	POTENTIAL INDIRECT INFLUENCE	LABEL	POTENTIAL DIRECT DEPENDENCE
1	Didik	1512	Sakit	1512	Didik	1809	Sakit	1924
2	Kepbang	1260	Sanitasi	924	Pendapat	1577	Miskin	1298
3	Pendapat	1260	Ketbang	756	Keppen	1007	Sanitasi	1039
4	Keppen	1176	Sampah	672	Miskin	967	Air	945
5	Miskin	1092	KBKR	672	Pendidikan	863	Kuabang	929
6	Ketbang	588	Miskin	672	Sakit	732	Kriminal	694
7	Jalan	504	Air	588	Kepbang	463	Didik	619
8	Sanitasi	336	Didik	588	Sanitasi	413	Tanah	572
9	Kuabang	252	Kuabang	504	Air	384	Pendapat	528

RAN K	LABEL	POTENTIAL DIRECT INFLUENCES	LABEL	POTENTIAL DIRECT DEPENDENCE	LABEL	POTENTIAL INDIRECT INFLUENCE	LABEL	POTENTIAL DIRECT DEPENDENCE
10	Drainase	252	Banjir	504	Sehat	384	Sampah	359
11	Air	252	Tanah	420	Kuabang	297	Ketbang	319
12	Pendidikan	252	Kriminal	420	Jalan	219	Banjir	294
13	Sehat	252	Kepbang	252	KBKR	203	KBKR	278
14	Tanah	252	Drainase	252	Ketbang	194	Drainase	194
15	Sakit	252	RT	252	Tanah	150	Kepbang	0
16	Sampah	168	Pendapat	252	RT	137	Jalan	0
17	RT	168	Jalan	168	Banjir	128	Pendidikan	0

RAN K	LABEL	POTENTIAL DIRECT INFLUENCES	LABEL	POTENTIAL DIRECT DEPENDENCE	LABEL	POTENTIAL INDIRECT INFLUENCE	LABEL	POTENTIAL DIRECT DEPENDENCE
18	Banjir	84	Pendidikan	168	Sampah	37	Sehat	0
19	KBKR	84	Sehat	168	Drainase	28	Sosbud	0
20	Sosbud	0	Sosbud	168	Sosbud	0	RT	0
21	Kephun	0	Kephun	84	Kephun	0	Keppen	0
22	Kriminal	0	Keppen	0	Kriminal	0	Kephun	0

Tabel Variabel Penelitian

No	Variabel	Variabel Amatan	Pengumpulan Data		
			Observasi	Kuisisioner	Data Sekunder
1	Keteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arah hadap bangunan, ▪ jarak antar bangunan ▪ luas kavling ▪ luas bangunan. 	✓ ✓ ✓	✓	
2	Kepadatan bangunan	Jumlah bangunan dibagi luas lahan terbangun.	✓		✓
3	Kualitas bangunan	Bahan dan kondisi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ atap ▪ Dinding ▪ lantai. 	✓	✓	
4	Drainase	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi drainase (Ada tidaknya genangan/sampah) ▪ Dimensi 	✓		
5	MCK	Jumlah KK yang memiliki Jamban (Septic-Tank)		✓	

No	Variabel	Variabel Amatan	Pengumpulan Data		
			Observasi	Kuisisioner	Data Sekunder
6	Saluran buangan limbah Rumah Tangga	Ketersediaan saluran: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Saluran buangan pribadi ▪ Drainase ▪ Tambak ▪ Pantai ▪ Sungai 		✓	
7	Air Bersih	Sumber dan kondisi air bersih		✓	
8	Sampah	Sistem pembuangan sampah		✓	
9	Listrik	Sumber penerangan		✓	
10	Jalan	kondisi perkerasan dan lebar jalan	✓		
11	Fasilitas pendidikan	jumlah dan kondisi fasilitas	✓		

No	Variabel	Variabel Amatan	Pengumpulan Data		
			Observasi	Kuisisioner	Data Sekunder
12	Fasilitas kesehatan	jumlah dan kondisi fasilitas	✓		
13	Sarpras sosial budaya	jumlah dan kondisi fasilitas	✓		
14	RTH	Luas RTH	✓		
15	Kepadatan penduduk	jumlah penduduk dibagi luas wilayah			✓
16	Kepadatan hunian	jumlah penghuni rumah dibagi luas bangunan		✓	
17	Mata pencaharian	Pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan		✓	
18	Legalitas tanah	Status lahan			
19	Tingkat pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan terkahir ▪ Angka Partisipasi Kasar 		✓	✓

No	Variabel	Variabel Amatan	Pengumpulan Data		
			Observasi	Kuisisioner	Data Sekunder
20	Banjir	Frekuensi banjir			✓
21	Kebakaran	Frekuensi kebakaran			✓
22	Penyakit	Frekuensi dan jenis penyakit			✓
23	Tingkat pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengeluaran dan tabungan per bulan, ▪ pengeluaran dan tabungan per tahun. ▪ Tempat meminjam uang 		✓	
24	Tingkat kemiskinan	Jumlah KK Sejahtera I, Pra Sejahtera dan penerima Raskin			✓
25	Tingkat kriminalitas	Frekuensi tindak kejahatan			✓

Lampiran 3: Lembar Asistensi Proposal



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. Bendungan Sigura - gara 2
MALANG

LEMBAR ASISTENSI

NAMA : Diana Margaretha Aca
NIM : 1124071
DOSEN PEMBIMBING : Ir. Angeline Nani H. M.Tp
JUDUL : Perancangan Perencanaan Koneksi Kelembagaan Pengawasan Fata Parlemen

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
10	April 2018	* Uraian dan perbaikan subbab 1 dan 2	
30	April 2018	* Tampilan Urutan, lebih ditegasakan lagi Es : Variabel : pendulum tabel urut. Angka (berdasarkan unsur) * Urutan lagi kesimpulan dari tiap sub bab. Tampilan tabel urut, detailkan.	



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

MALANG

Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Malang

LEMBAR ASISTENSI

Nama : Dera Margatha An
Nim : 11241
Program studi : Kelokan
Dosen Pembimbing : Ir. Aguska Nural Hidayati, MT.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
	5 Juni 2015	<p>apakah kemasan sds bisa, jelaskan urutannya. a: daya kaputasi. seperti apa? b: ukuran label ukuran. kemasan harus jitu dan sesuai dg kondisi & variabel yang muncul. Tentukan label kemasan dari.</p> <p>→ Buat zona front paper. 4 bab.</p> <p>→ Utk → bisa paku Air / plastik → kemasan : jala & sup & perbandingan.</p>	
	6/6/15	<p>acc seminar proposal Duga survey : wawancara. data.</p>	



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

MALANG

Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Malang

LEMBAR ASISTENSI

Nama : Diana Margaretta An
Nim : 19071
Program studi : Kelektron (Preparat)
Dosen Pembimbing : Idris Soewarno, ST-047

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	10 April 2015	Cek lagi literatur tentang 5 manajemen masalah. Lalu condong ke partisipasi (stakeholder). Lakukan dasar teori / referensi terkait variabel-variabel. Ada atau penerapan kualitas? Dasar apa? Cari Data sekunder khusus.	
2.	15 Juni 2015	- Bab I : bahasan asing dengan bahasa - Bab I : Netrad dengan perkembangan? Perjalan pemerintahan urusan tata laksana. - Bab II : Cek prosed teknologinya variabel. Jelaskan penerapannya satu per satu (tabel)	
3.	17 Juni 15	Keterangan fgs fleblimadun fgh mele oleh penelitian ini. - Q : - D. Survei :	
4.	19 Juni 15	- Perbaiki keamiran & Design Survey - cek Tah tulis Aee keamiran Proposal !	

Lampiran 4: Surat Bimbingan



FT. BN. PERSERO MALANG
BANK NAGA MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : J. Bendungan Sigura-gura No. 3 Telp. (0341) 551437 (Huntri), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : J. Raya Karangrejo Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

Nomor : ITN.04.043-PWK.SKRIPSI.VII.2015 17 April 2015
Lampiran :
Perihal : Pembimbing Tugas Akhir

Kepada Yth : Ir. Agustina Nurul Hidayati, MT.
Dosen Perencanaan Wilayah Dan Kota PWK
Institut Teknologi Nasional
Di -

MALANG.

Dengan Hormat,

Kami dari Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang sedang mengembangkan perencanaan dari semua aspek, tidak hanya dari sisi pandang teknis, tetapi juga dari aspek lain, seperti : perilaku, budaya, sejarah, ekonomi dan sebagainya. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu / Bapak untuk membimbing Mahasiswa kami :

Nama : Diana Margaretha Asa

NIM : 11.24.071

Judul TA :

*"Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo
Kota Pasuruan."*

Sejak Tanggal : 17 April 2015 s/d 17 Oktober 2015

(Maksimum 6 bulan). Dalam masa pembimbingan tersebut, Ibu / Bapak didampingi oleh Pembimbing II dari Jurusan kami, yaitu :

Ida Soewarni, ST, MT untuk memudahkan penyamanan persepsi dalam penyusunan materi TA tersebut.

Besar harapan, Bapak / Ibu dapat menerima permohonan kami. Atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

an Dekan

Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota



Ida Soewarni, ST, MT
NIP. Y. 1039600293



PT (BU PERSERO) MALANG
BANK NAGARMALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : J. Bendojari Sigurapura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 562015 Malang 65145
Kampus II : J. Raja Kuningan Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

Nomor : ITN 04 043/PWK/SKRIPSI.VII/2015
Lampiran : -
Perihal : Pembimbingan Tugas Akhir

17 April 2015

Kejanda Yth : Ida Soewarni ST, MT
Dosen Perencanaan Wilayah Dan Kota/ PWK
Institut Teknologi Nasional
Di -

MALANG.

Dengan Hormat,

Kami dari Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang sedang mengembangkan perencanaan dari semua aspek, tidak hanya dari sisi pandang teknis, tetapi juga dari aspek lain, seperti : perilaku, budaya, sejarah, ekonomi dan sebagainya. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu / Bapak untuk membimbing Mahasiswa kami :

Nama : *Diana Margaretha Asa*

NIM : *11.24.071*

Judul TA :

"Perancangan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Punggungcejo Kota Pesuruban."

Sejak Tanggal : 17 April 2015 s/d 17 Oktober 2015

(Maksimal 6 bulan). Dalam masa pembimbingan tersebut, Ibu / Bapak didampingi oleh Pembimbing I dari Jurusan kami, yaitu :

Ir. Agustian Nurul Hidayati, MT ~~terdapat email dan nomor telepon yang dapat dihubungi~~

Besar harapan, Bapak / Ibu dapat menerima permohonan kami. Atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

an Dekan

Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota



Ida Soewarni, ST, MT
NIP. Y. 1039600293

Lampiran 5 : Berita Acara Seminar Proposal




**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jln. BendunganSigara – Gura No 2, Malang – Jawa Timur
Telp / Fax : (0341) 567154



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama Peneliti : Diana Margaretha Asa
 Nim : 11-24-071
 Jurusan / Prodi : Teknik Planologi / PWK S1
 Judul Penelitian : "Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan"
 Dosen Pembimbing I : Ir. Agustina Nurul Hidayati, MT
 Dosen Pembimbing II : Arif Setiawan, ST, MT
 Hari / Tanggal : Senin, 29 Juni 2015

Dosen Penguji	Pertanyaan / Saran	Keterangan / Tanggapan	Tanda Tangan
DR.IR. Ibnu Sasongko, MT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek materi dalam kalimat, agar yang membaca tidak bingung akan maksud yang disampaikan. 2. Perhatikan penulisan sumber teori. 3. Buat sintesa teori. Jelaskan secara rinci bagaimana proses keluarnya tiap variabel. 4. Terkait variabel, keluarkan berdasarkan referensi – referensi yang digunakan. 5. Paparkan bagaimana cara menentukan penanganan yang diinginkan. 6. Terkait bobot dari tiap variabel, bagaimana cara mengumpulkan data yang valid dan tidak membingungkan saat proses perhitungan data. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi dalam kalimat akan dicek dan diperbaiki. 2. Sumber teori akan dicek dan ditulis sesuai dengan pedoman yang berlaku. 3. Proses keluarnya variabel akan dibuat berdasarkan hasil sintesa teori yang digunakan. 4. Variabel yang digunakan akan disesuaikan berdasarkan hasil kajian teori – teori yang digunakan. 5. Terkait dengan penanganan yang akan dilakukan, akan dipaparkan dengan jelas metode apa yang digunakan (ditambahkan). 6. Tiap variabel yang akan diteliti akan dipilih sesuai dengan jenis dan 	



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Jln. BendunganSigura - Gura No 2, Malang - Jawa Timur
Telp / Fax (0341) 567154



Dosen/Penguji	Pertanyaan / Saran	Keterangan / Tanggapan	Tanda Tangan
IR. Titik Poerwati, MT	<ol style="list-style-type: none">1. Terkait redaksional, cek kembali tata tulis.2. Di latar belakang ataupun rumusan masalah, penulisan pernyataan harus diperhatikan. Harus memiliki dasar atau landasan yang kuat.3. Pada tabel rangkuman teori, beri tambahan kolom sasaran.4. Jumlah responden dirinci tiap RT.5. Kerangka pikir lebih di sistematiskan dan harus bersifat komunikatif.6. Daftar pustaka harus dibedakan antara buku, jurnal dan internet.	<p>sumber datanya. Metode terkait penanganan akan ditambahkan.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tata tulis akan diperhatikan dan diperbaiki sesuai dengan pedoman yang ada.2. Penulisan kalimat akan lebih diperhatikan lagi. Dan sumbernya akan dipaparkan.3. Akan ditambahkan kolom sasaran pada tabel rangkuman teori.4. Jumlah responden akan dipaparkan sesuai dengan jumlah KK di tiap RT.5. Kerangka pikir akan dibuat lebih sistematis6. Daftar pustaka akan dibedakan berdasarkan sumber perolehan data.	
Mira Setiawati A, ST, MT	<ol style="list-style-type: none">1. Terkait penulisan, cek kalimat, peta dan daftar pustaka yang digunakan.2. Kajian teori harus dibedakan antara kajian penelitian terdahulu dan kajian standar/peraturan.3. Cek lagi indikator untuk masing - masing variabel.4. Kuisioner & wawancara, harus dipilih indikator yang mau ditanyakan beserta respondennya.	<ol style="list-style-type: none">1. Penulisan dalam laporan akan lebih diperhatikan lagi.2. Peneliti akan membedakan sumber kajian teori yang digunakan.3. Indikator dari setiap variabel akan dicek lagi dan dipilih berdasarkan referensi yang digunakan.4. Kuisioner dan wawancara akan dipilih berdasarkan indikator yang	



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Jln. BendunganSigura - Gura No 2, Malang - Jawa Timur
Telp / Fax : (0341) 567134

DosenPenguji	Pertanyaan / Saran	Keterangan / Tanggapan	TandaT
	5. Harus ada metode yang jelas terkait jenis penanganan permukiman kumuh.	mau ditanyakan. 5. Metode terkait penanganan akan dipaparkan dengan lebih jelas.	

Malang, 29 Juni 2015

Mengetahui

Dosen Pembimbing I

Ir. Agustina Nurul Hidayati, MTP
NIP. Y. 1039300214

Dosen Pembimbing II

Iga Soewarni, ST, MT
NIP. Y. 1039600293



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG

Jl. Darmasari Sigantungan No. 2 Malang

LEMBARAN ASISTENSI TUGAS AKHIR (SKRIPSI)

Nama : Dina Margaretha Asa (1124971)
Judul : Perancangan Permutasi Komati Di Kelurahan Patungrejo Kota Pasuruan
Dosen Pembimbing I : Ida Soewarni, ST, MT

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
	21 / 8 '14	Ace Sidang TA :	

Lampiran 7 : Kartu Nonton

DAFTAR ABSENSI MENGIKUTI
SEMINAR HASIL
 JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI / PWK



Nama Mahasiswa : Dora Margaretha Aia
 NIM : 119021

No	NAMA MAHASISWA DAN NIM	JUDUL SKRIPSI	TTD PENGUJI
1	Muhianto M. Tanasels (07-29-013)	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Program Sosial Samping di Kelurahan Pelenan, Kota Malang.	1. 2. 3.
2	Rully A. Ome (10-29-099)	Pengembangan wisata outbound berdasarkan tingkat kepuasan pengunjung di Desa Wisata Buntang, Kecamatan Buntang, Kota Batu.	1. 2. 3.
3	Carany Fajar Pancahnan (10-29-025)	Pengembangan Desa Wisata berbasis Perikanan budidaya ikan Tanggung Jawab Sosial (Kul-Set)	1. 2. 3.
4	Puri P. Soehrisno (10-29-055)	Pemanfaatan Fasilitas Pengembangan Perikanan Kota berdasarkan Profesi Pengusaha Si Tersebut dalam Penjualan Produk	1. 2. 3.
5	Nama P. Pita 122901	Strategi Pengembangan Berdagang Kota Batu Jawa Timur, Indonesia.	1. 2. 3.

Mengetahui
 Sekretaris Jurusan
